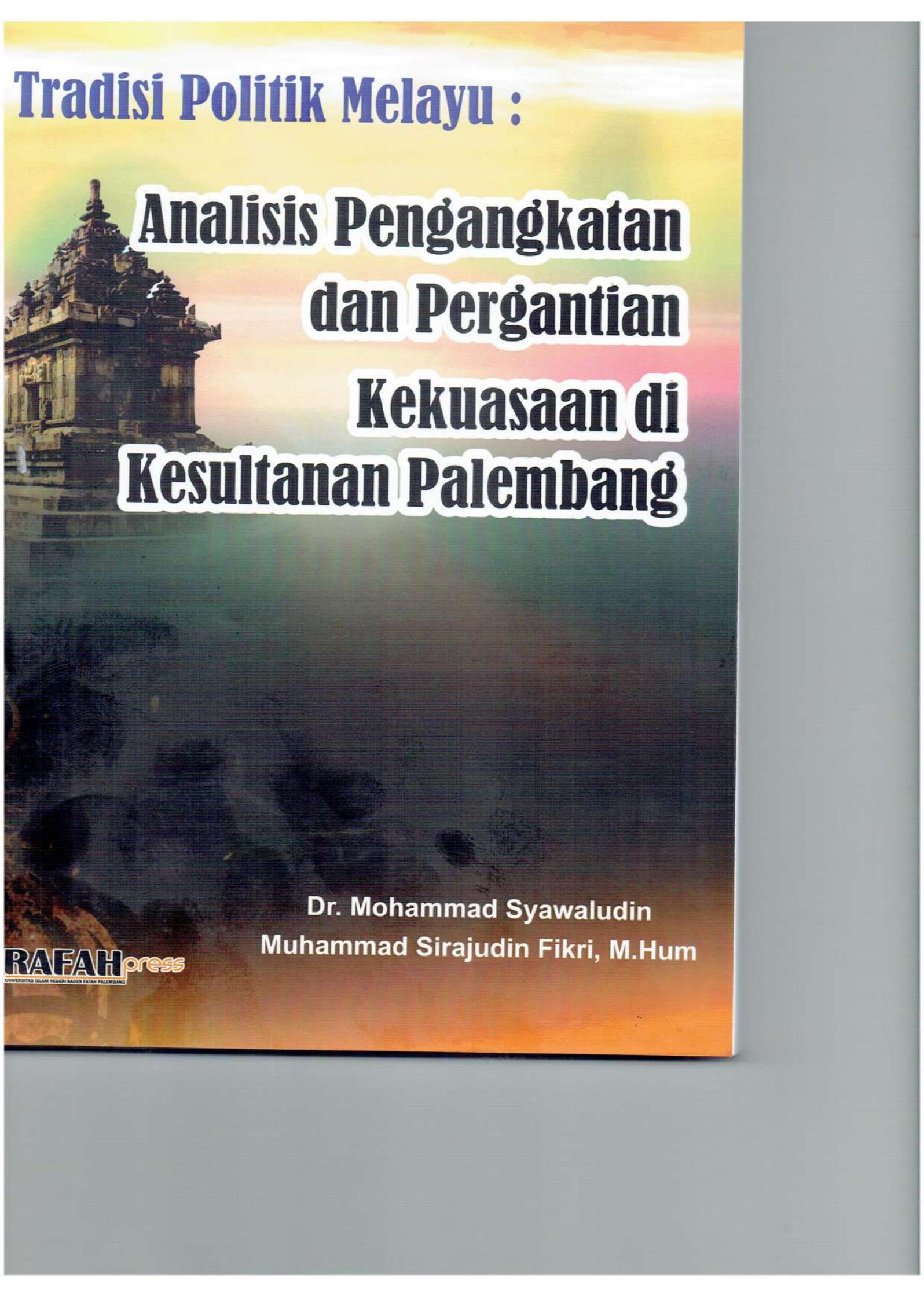


Tradisi Politik Melayu :



**Analisis Pengangkatan
dan Pergantian
Kekuasaan di
Kesultanan Palembang**

**Dr. Mohammad Syawaludin
Muhammad Sirajudin Fikri, M.Hum**

RAFAHpress
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATMA PALEMBANG

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan
Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana

Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TRADISI POLITIK MELAYU :
ANALISIS PENGANGKATAN DAN PERGANTIAN KEKUASAAN
DI KESULTANAN PALEMBANG

Penulis : Dr. Mohammad Syawaludin
Muhammad Sirajudin Fikri, M.Hum
Layout : Tri Septiana
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:

Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Anggota IKAPI

Dicetak oleh:

CV. Amanah

Jl. Mayor Mahidin No. 142

Telp/Fax : 366 625

Palembang – Indonesia 30126

E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Oktober 2019

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis

All right reserved

ISBN: 978-623-250-070-9

**TRADISI POLITIK MELAYU :
ANALISIS PENGANGKATAN
DAN PERGANTIAN KEKUASAAN
DI KESULTANAN PALEMBANG**

**Dr. Mohammad Syawaludin
Muhammad Sirojudin Fikri. M.Hum**

KATA SAMBUTAN



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat dan inayah-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, sehingga mampu melaksanakan semua aktivitas keseharian kita. Shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita pada pencerahan spiritual dan intelektual, sehingga menemukan hakikat makna kesejatian nilai-nilai kemanusiaan universal.

Alhamdulillahirobbil'alamin, buku berjudul *“Tradisi Politik Melayu : Analisis Pengangkatan dan Pergantian Kekuasaan di Kesultanan Palembang”* telah selesai ditulis dan sudah terbit di tangan pembaca.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini banyak terdapat kekurangan. Namun, penulis tetap berharap agar laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Kritik dan saran dari penulisan laporan penelitian ini sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan berikutnya. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih

Akhirnya, semoga buku dihadapan pembaca ini dapat bermanfaat dan Allah Swt selalu memberi petunjuk dan hidayah-Nya pada kita semua.Amin.Selamat Membaca!.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 6 |
| E. Kerangka Teoritik..... | 6 |
| F. Kajian Kepustakaan dan Hasil Penelitian yang Relevan..... | 11 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| | |
| BAB II PROSES PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN RAJA DAN SULTAN DI INDONESIA | |
| A. Akulturasi Islam Terhadap Tradisi Hindu dan Budha..... | 19 |
| B. Agama dan Politik | 28 |
| C. Sistem Pergantian Raja..... | 32 |
| D. Corak Pergantian Raja-Raja di Nusantara..... | 39 |
| E. Struktur Birokrasi di Kerajaan-Kerajaan Bercorak Islam | 48 |
| | |
| BAB III TRADISI MELAYU ISLAM DALAM PELEMBAGAAN KEKUASAAN SULTAN DI KESULTANAN PALEMBANG | |
| A. Arti Nama Palembang Dan Georafisnya | 61 |
| B. Sejarah Kerajaan Palembang..... | 66 |
| C. Sejarah Sultan Kesultanan Palembang Darusalam | 71 |
| D. Pola -pola Tradisi Penggantian Kekuasaan Raja dan Sultan..... | 75 |
| E. Struktur Pemerintahan | 93 |

| | |
|---|-----|
| F. Sejarah Suksesi Raja dan Sultan Palembang Darussalam | 96 |
| G. Analisis Sosiologis Terhadap Pergantian Sultan | 109 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------|-----|
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran | 118 |

| | |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 120 |
|----------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| GLOSARIUM | 125 |
|-----------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| INDEKS | 127 |
|--------------|-----|

Abstrak

Dalam praktek Islam di Indonesia bisa ditemukan nilai budaya dari agama bukan Islam yang dipelihara dan dipraktikkan oleh entitas Islam seperti praktek-praktek dalam pergantian kekuasaan Raja dan Sultan. Persoalan institusi sosial dan politik yang hadir ditengah-tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainya. Kehadiran wujud kekuasaan tradisional dengan sejumlah konsep yang ada dalam kekuasaan itu sendiri, menentukan suatu proses suksesi raja atau sultan terjadi di masa itu. Melalui pendekatan teoritik tentang masyarakat sosial yang melihat evolusi raja-raja. sering dijadikan sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan dan peralihan kekuasaan, dipadukan dengan Elite; Political Culture and Cultural Politics. Dilanjutkan dengan analisis verstehen yang diperluas dengan pemikiran penelitian phenomena penelitian ini menemukan bahwa sistem pengangkatan dan pergantian kekuasaan di Kesultanan Palembang yakni adanya keunikan tersendiri berkaitan dengan perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik berpengaruh besar terhadap proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menitik beratkan perekonomiannya di bidang maritim dan simbolisasi arabismetentunya akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih bersifat agraris dan sinkretis.

Kata kunci: Stratifikasi Sosial, Sultan, Simbol, Karismatik, Kerajaan

Abstract

In the practice of Islam in Indonesia, cultural values of non-Islamic religions can be found that are maintained and practiced by Islamic entities such as practices in the replacement of the power of the King and Sultan. Issues of social and political institutions that are present in the midst of power such as heredity, creed, court and others. The presence of traditional forms of power with a number of concepts that exist in the power itself, determine a succession process of the king or sultan occurred at that time. Through a theoretical approach to social society that sees the evolution of kings. often used as an approach to explain the history of state administration and the transfer of power, combined with Elite; Political Culture and Cultural Politics. Continued with a verstehen analysis that was expanded with research thinking this research phenomenon found that the system of appointment and change of power in the Sultanate of Palembang, namely the existence of its own uniqueness related to the fusion of Malay and Javanese culture. Differences in political culture greatly influence the process of succession that occurs. Malay culture which emphasizes more on its economy in the maritime field and its symbolism of arabism will certainly be different from Javanese culture which is more agrarian and syncretic.

Keywords : Social Stratification, Sultan, Symbol, Charismatic, the Kingdom

ملخص

بف ممارسة ا سلميف اذو بس فا ، مكن العنور عمل الومي النوانية ال دابن غري السالمية ايت سارسا وبارسها لوانت السالمية مثل الامارسات بف اسبدال سلطة الملك والسطان. رضاي المؤسسات الاجامعية والسيسية الموجهة بف وسط السلطة مثل الوراثة والعبادة واهلكة وغريها. وجود أشاكل السلطة النوليدية مع عدد من المادمي الموجهة بف السلطة نسها ، وحيد مملوكة خالفة الملوك أو السالطني وعتت بف ذلك الويت. من خالل النهج النظري للمجتمع الاجامعي الذي يرى تطور الملوك. غالا ما بس نخدم كنج لشرح اترخي ادارة الدول وسل السلطة ، ايل جاب الزخية ؛ النوانة السيسية والسيسية النوانية. نلها حليل نرس نحني ايت مت نوس يعها مع ظواهر التكري البحث اذه الدراسة وجدت أن نظام النعيني واسبدال السلطة بف سلطنة البلباجن ، أي وجود نرد خاص بها يرتبط ادمج النوانة المالوية واجلاوية. يؤثر الاختالات بف النوانة السيسية بشكل كبير عمل معلية اخلالفة ايت حدثت. نوانة المال هو ايت نركز أكرث عمل انصرادها بف اجمال البحري ورمزية العروبة لها س نختلف ابناً أهد عن النوانة اجلاوية ايت نعرب أكرث زراعاً

الكلمات المفتاحية: النوسمي الطيوي الاجامعي ، سلطان ، الرموز ، الكريزية ، المملكة
وتواناً .

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan kajian tentang Islam, Melayu dan tradisi lokal sering di lihat sebagai dua hal yang saling memberi warna didalam terbentuknya formasi sosial khususnya di Indonesia. Islam sebagai agama yang didalamnya mengajarkan berbagai aspek normative dan humanis tentunya mengalami proses penerimaan dan penolakan dalam masyarakat, sebaliknya Melayu dan tradisi sebagai suatu identitas masyarakat tertentu juga mengalami proses elektik dalam membangun penyesuaiaan dengan ajaran keislaman.

Tidak berlebihan bila antara Islam, Melayu dan tradisi lokal selalu dikaji dengan pendekatan-pendekatan keilmuan yang umumnya berbasis ideografik. Ini membuktikan perjumpaan Islam, Melayu dan tradisi lokal tidak saja dipahami sebagai suatu proses ajaran tapi mampu menciptakan intitusi sosial, budaya, ekonomi bahkan intitusi kekuasaan politik yang mentolerir nilai-nilai lokal. Dalam lingkaran tersebut Islam, Melayu, dan tradisi lokal menjadi magnetum yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika dan perubahan yang terjadi. Lebih jauh membentuk formasi sosial lebih luas dan dominan.

Bila dikaitkan dengan “Melayu”, maka tidaklah identik dengan komunitas etnik atau sukubangsa tertentu. Melayu sesungguhnya entitas yang bersifat fleksibel dan semirip bangsa bahkan kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Didalamnya ikut melebur penduduk keturunan asing seperti Arab, Persia, Cina dan India, disamping keturunan dari etnik Nusantara lain. Adaptasi dan diikuti dengan proses defusi bisa terjadi karena ada faktor migrasi dan proses mukim yang menjadikan mereka hidup lama bersama orang Melayu dan suku lokal, sisi lain adanya memeluk agama yang sama serta menggunakan bahasa Melayu dalam penuturan sehari-hari.

Inilah yang menyebabkan orang Melayu memiliki kekhasannya tersendiri, tidak seperti budaya yang berasal dari orang Jawa, Sunda, atau Betawi. Orang Melayu tinggal di

beberapa wilayah yang terpisah, baik di daratan maupun perairan, bahkan di antaranya saling berjauhan. Namun demikian di mana pun berada, bahasa dan agama mereka sama justru menjadi core culture identitas utama Melayu. Ada beberapa faktor mengapa proses tersebut bisa membentuk struktur dan fungsional “Melayu” khas dari suku Indonesia lainnya antara lain:

- 1) Perdagangan dan Pelabuhan yang menjadi pintu masuk berbagai aktivitas baik terkait dengan perniagaan maupun relasi kekuasaan
- 2) Perkawinan antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk kekerabatan baru di antara keluarga.
- 3) Ekspansi kekuasaan Politik dan mulai berkurangnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha.
- 4) Mulai diterimanya ajaran Islam ortodoksi maupun heterodoksi yang ditandai dengan hadirnya ulama sufi dan fiqh
- 5) Terjadinya proses pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf;
- 6) Bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam baik secara lisan maupun tulisan (Arab Melayu dengan berbagai jenisnya)
- 7) Entitas sufi dan ulama mulai membangun tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan-kerajaan bahkan ada yang menjadi penasihat Raja atau sultan .

Semua faktor tersebut menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun sulit untuk mengatakan bahwa tradisi lokal tidak identik dengan Islam atau sebaliknya Islam adalah yang membentuk wujud tradisi lokal kekuasaan. Karena itu, dalam praktek Islam di Indonesia bisa ditemukan nilai budaya dari agama bukan Islam yang dipelihara dan dipraktikkan oleh entitas Islam seperti praktek-praktek dalam pergantian kekuasaan Raja dan Sultan.

Dalam mengkaji sistem pengangkatan dan pemberhentian raja atau sultan tidak dapat dipisahkan dari persoalan intitusi sosial dan politik yang hadir di tengah tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainya. Kehadiran wujud kekuasaan tradisional dengan sejumlah konsep yang ada dalam kekuasaan itu sendiri,

sesuai dengan kebudayaan politik yang dianut dan menentukan suatu proses suksesi raja atau sultan terjadi di masa itu. Titik peleburannya adalah bertemu dua tradisi besar Hindu Budha dan Melayu dalam proses penciptaan tradisi raja-raja dan sultan.

Di Sumatera ada beberapa kerajaan hindu budha yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap budaya Melayu, para ahli sejarah menyebutnya dengan Kerajaan - Kerajaan masa Hindu- dan Budha di Sumatra diantaranya: Kerajaan Melayu Jambi. dikenal Mo-lo-you, berdiri sejak 644/645 M. Kerajaan ini berlangsung sampai 771 M, dan sesudah itu dibawah kekuasaan Sriwijaya. Lembaga Adat Jambi menyatakan pula kerajaan itu sebagai kerajaan Melayu sejak abad ke 4 dan 5. Pelanjut dari Kerajaan Jambi adalah Dharmasyraya yaitu lokasinya sekitar 300 km ditepi Batang Hari kearah hulu, ada sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar disebut Muara Jambi, situs Muara Jambi, dibangun sekitar tahun 1304 dan 1436, ditulis sebelum 1397 atau ditegaskan sebelum 1377, selama masa kerajaan Adityawarman.

Gelar Maharaja Dharmasyraya menunjukkan bawahan Maharajadiraja Adityawarmanyang hendak mengukuhkan hubungan (termasuk hubungan perdagangan pula) antara Melayu dan Kerinci. (sebuah Mandala Melayu), Sistem pemerintahan Melayu Jambi menggunakan gelar Raja”yang tua” yang lazim disebut setelah Islam berkuasa, Sultan,dan “ raja yang muda” atau Pangeran Ratu Raja Muda (putra mahkota).

Kerajaan Minangkabau berdiri sekitar 1347 M berpusat di Pagaruyung Batusangkar - Sumatra Barat. Masyarakat Minangkabau menganut adat Perpatih. Adat ini bermula dikembangkan oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang menganut garis keturunan dari pihak ibu atau matrilineal. Kerajaan Minangkabau berkembang bahkan sampai ke Negeri sembilan di Tanah Semenanjung Malaysia. Negeri Sembilan rajanya keturunan Raja Minangkabau. Raja Budha (Tantrik) ini, Adityawarman (1356-1375), banyak meninggalkan patung dan prasasti yang melukiskan dia sebagai penguasa sebagian besar Sumatera Tengah. Pada abad 14 M Surawaso dibawah Adityawarman disebut juga Pemerintah “Bumi Emas”.

Kerajaan Sriwijaya lebih dikenal pemerintahannya bernama Kedatuan yang dapat disamakan juga dengan kerajaan secara umum tetapi sementara ahli menyebutnya pemerintahannya dipimpin Datu, maka kerajaan disebut Kedatuan. Prasasti- prasasti memberi petunjuk Sriwijaya paling awal pengguna bahasa Melayu pada priode 683-686

Masehi. Ibu kotanya merupakan pusat agama Budha yang penting sampai abad ke 13 M. Salah satu Prasasti yaitu Kedudukan Bukit. Beberapa kerajaan masa budha hindu di sumatera tentunya memberi pengaruh terhadap munculnya kesultanan Melayu di Sumatera.

Demikian juga halnya kerajaan-kerajaan di Jawa masa hindu budha: Kahuripan dulu juga pecah menjadi dua Daha dan Jenggala, masa kesultanan di Jawa seperti Surakarta pecah menjadi dua Kesunanan dan Mangkunegaran, Yogyakarta menjadi Kesultanan dan Pakualamam. Kraton Cirebon pecah menjadi Kasepuhan dan Kanoman. Kesultanan Solo.Yogya, dan Cirebon, meskipun pecah menjadi dua, ternyata keduanya tetap eksis hingga sekarang dan keduanya mampu menjadi teladan (budaya) bagi masyarakat sekitar yang mengapresiasinya.

Dari berbagai fenomena kekuasaan yang terjadi di seputar suksesi tahta kerajaan yang paling mendasar adalah munculnya dualisme kepemimpinan meskipun juga bukan hal yang aneh. Misalnya kasus yang terjadi di Palembang yakni pengangkatan sultan baru pada tahun 2003 di era kesultanan Palembang yang sudah dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1823, bahkan sultan terakhir yang berkuasa dibuang ke Batavia. Pengangkatan tersebut menarik karena setelah lebih 200 tahun institusi keraton dan sultannya tidak ada sekarang dimunculkan kembali oleh sekelompok masyarakat Palembang. Pengangkatan R.M.S. Prabu Diraja sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 (29 Dzulhijjah 1423 H.) di Masjid Lawangkidul. Pengangkatan ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan tersebar luas melalui media masa lokal.

Pengangkatan dan pemberhentian Raja dan Sultan sesungguhnya wujud dari perpaduan Islam, Melayu, dan tradisi lokal. Proses ini berlangsung lama dan terus menerus menjadi entitas dan identitas Islam Indonesia yang hidup dalam jaringan peradaban agama-agama yang bisa saja identitas Muslim tersebut menjadi bagian dari kesejarahan Islam Melayu dan memiliki perbedaan mendasar. Fakta ini sebagai pola baru dari kemunculan Islam Melayu yang berfungsi sebagai *agent social* atau yang melihat bahwa Islam dan Melayu sebagai suatu episode dari lempengan peradaban masyarakat Indonesia yang memiliki karakter terbuka dan dinamis. Khususnya dalam aspek kekuasaan politik, sebab faktor geneologi dan kesinambungan tahta raja atau sultan tidak

satgnan atau menghilang. Inilah yang melatarbelakangi perlunya diadanya penelitian tentang sistem pergantian Sultan di Kesultanan Palembang yakni adanya keunikan tersendiri berkaitan dengan kebudayaannya, yang merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa. Perbedaan budaya politik dan sistem perekonomian berpengaruh besar terhadap proses suksesi yang terjadi. Budaya Melayu yang lebih menitikberatkan perekonomiannya di bidang maritime dan simbolisasi arabisme tentunya akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih bersifat agraris dan sinkretis. Peneliti berasumsi bahwa perlu mengkaji mendalam tentang bagaimana politik Melayu menjadi identitas sosial dan pelembagaan kekuasaan bagi pengangkatan dan pemberhentian Sultan di Kesultanan Palembang.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar penelitian ini fokus dan dapat menghasilkan pembahasan yang terukur, maka perlu rumusan masalah penelitian secara empiris sebagaimana berikut :

1. Bagaimana proses pengangkatan pemberhentian Raja dan Sultan Dalam Tradisi Kerajaan atau Kesultanan di Indonesia ?
2. Bagaimana pola bentuk pengangkatan dan pemberhentian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam ?
3. Apakah Islam Politik memberi pengaruh terhadap proses pelembagaan kekuasaan Sultan baik pengangkatan maupun pemberhentian di kesultanan Palembang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penelitian ini bertujuan antara lain :

1. Mendeskripsikan berbagai proses pengangkatan dan pemberhentian raja dan sultan di Indonesia.
2. Menjelaskan pola pembentukan pengangkatan dan pemberhentian sultan di Kesultanan Palembang dan mencari keterkaitan antara pola Raja dengan Pola Sultan.
3. Menjelaskan kontribusi politik Islam dalam proses pembentukan dan pemberhentian sultan di kesultanan Palembang.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN.

Sebagaimana umumnya penelitian sejarah politik yang menggunakan pendekatan sosiologi dan politik dalam pembidangan tertentu akan banyak memberikan manfaat keilmuan dan kemasyarakatan antara lain :

1. Memperluas pemahaman keilmuan khususnya sejarah kekuasaan dengan pendekatan sosiologi dan politik.
2. Memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan sejarah Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.
3. Menambah koleksi khasanah keilmuan sejarah Keislaman dalam kajian tradisi kekuasaan dan sejarah lokal.
4. Dapat dijadikan bahan Rujukan bagi matakuliah sejarah pelebagaan, sejarah aliran, Melayu dan kawasan. Dengan pendekatan keilmuan bantu seperti sosiologi dan politik.

E. KERANGKA TEORITIK

Dalam sosiologi politik tipe kepemimpinan yang menurut teori Weberian ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja.

Peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas itu, khususnya berkaitan dengan gestuur dan views world. Sebaliknya, perlu diakui bahwa tokoh sejarah acapkali lebih jauh memandang ke depan atau berperan sebagai perintis atau protagonis. Protagonisme atau inovasi sering menuntut perubahan evolusioner sehingga

pelaksanaannya menuntut kepribadian atau kepemimpinan yang kuat. Tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa tokoh menjadi orang marginal dan pencipta sub-kultur, akhirnya dapat menciptakan kultur dominan dalam kajian sosiologi politik.

Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*). Di sini tindakan, kelakukan, serta sikap perlu dilembagakan. Untuk membahas kerajaan tradisional, sebagai contoh lain, tepatlah kiranya analisis sosiologi dan politik dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrionalisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya.

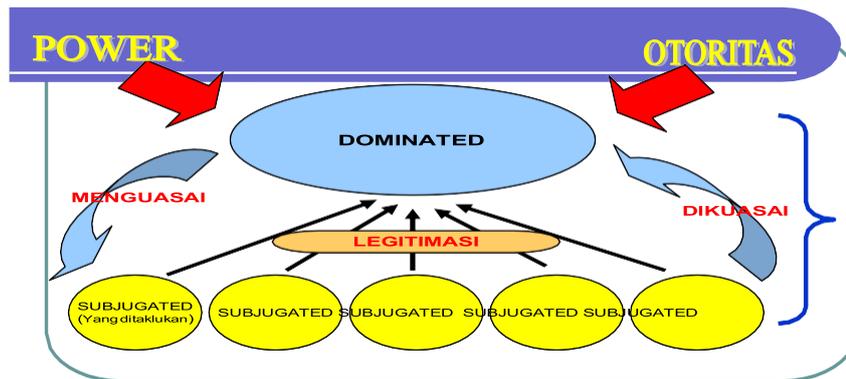
Dalam perpektif sosiologi kekuasaan selalu dihubungkan dengan penjelasan tentang suksesi suatu kepemimpinan. Karena itu, kekuasaan dilihat dari hubungannya dengan negara organisasi birokrasi, pemimpin, tradisi, dan kebudayaan. Dalam konteks demikian pendekatan keilmuan tersebut sering dijadikan sebagai pendekatan untuk menjelaskan sejarah ketatanegaraan dan peralihan kekuasaan, tidak terlepas dari kerangka politik yang mendukungnya.

Karena itu, analisis terhadap keanekaragaman perkembangan masyarakat kesukuan "*tribe communities*" dan "*feudal society*", meskipun agak sulit untuk melangkah suatu hubungan linear bahwa masyarakat feodal merupakan perkembangan dari "*tribe communities*". Namun dalam kenyataannya, ada "*tribe communities*" yang selamanya menjadi komunitas kesukuan. Tetapi di beberapa masyarakat di dunia, masyarakat kesukuan berkembang menjadi masyarakat kerajaan, misalnya masyarakat kesukuan di Benua Afrika. Perlu dicatat disini bahwa di Indonesia, pengertian masyarakat kerajaan bukan merupakan perkembangan langsung dari masyarakat kesukuan, misalnya pertumbuhan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan bergeser ke Jawa Timur, tidak dapat disebut sebagai perkembangan masyarakat kesukuan meskipun kenyataannya mereka mampu menciptakan suatu bentuk pemerintahan¹.

Dari pendekatan itulah Block menggunakan pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. Ini berarti bahwa dalam masyarakat Islam di Asia Tenggara, ada kelompok sosial

¹ March Block, *Social society*, , Chaniago, The University of Chaniago Press (1961), Vol. I. p: 23-26.

yang dikuasai. Di Asia tenggara kelompok yang dikuasai adalah rakyat yang dalam ikatan khusus adalah petani atau buruh, penguasa adalah tuan-tuan tanah, pedagang dan penguasa. Komunitas-komunitas yang dikuasai ini adalah raja-raja kecil yang oleh Block disebut *homage*, yaitu rasa hormat yang disertai dengan pemberian upeti kepada komunitas kerajaan. Bila diskematisasikan seperti tabel rasio hubungan berikut :



Sumber : diadaptasi dari teori sosiologi konflik perpektif struktural Block

Di Indonesia, pengertian masyarakat feodal agak lain dengan di Eropa. Jika mendasarkan pada sumber-sumber arkeologi, sangat jelas bahwa masyarakat kerajaan muncul begitu saja dari tingkat komunitas yang kecil dan dibimbing oleh seorang raja, dan kemudian berkembang secara invasi ke daerah-daerah dan para pegawainya digaji dengan tanah. Dalam perkembangannya yang terakhir dari masyarakat kerajaan di Jawa, pegawai kerajaan yang mendapat gaji itu menggunakan sistem *apanage*. Ini merupakan hasil studi G.P. Rouffaer "*Vorstenlanden*" yang sangat khas membicarakan dan membahas struktur birokrasi kerajaan Jawa dengan sistem apanage. Makin tinggi jabatan seseorang dalam birokrasi tersebut, maka gaji yang berupa tanah akan semakin luas. Tanah ini dikerjakan oleh petani dengan sistem pengabdian sosial.

Temuan Rouffaer ini diperkuat oleh temuan D.H. Burger (1960), menurutnya di Jawa, para raja untuk mengokohkan dirinya secara hukum dan secara religius, maka raja-raja itu banyak melakukan upacara-upacara keagamaan. Sistem upacara yang mereka jalankan adalah sistem kebudayaan Hindu dan Budha. Upacara itu tampaknya merupakan gejala umum di Asia Tenggara. Upacara-upacara dikemas menurut aturan-

aturan agama Hindu dan Budha sehingga raja sebagai penguasa dianggap bukan orang biasa oleh rakyat. Rakyat menganggap bahwa mereka adalah utusan para dewa, untuk memerintah di bumi, sehingga muncul konsep *dewa raja*.

Menurut Tjandrasasmita, dalam pandangan orang Indonesia pada masa kuno, raja dianggap sebagai seorang tokoh yang diidentikan dengan dewa². Pada masa pengaruh Islam, unsur-unsur tersebut masih tetap ada, di mana Sultan juga dianggap seorang tokoh yang menguasai masyarakat hidup dan dapat menghubungkannya dengan masyarakat gaib. Hal itu dapat kita saksikan dari tradisi pemberian gelar-gelar pangeran, susuhunan, panembahan, bahkan kepada beberapa orang sultan atau raja. Selain itu, setelah raja atau sultan wafat, makamnya pun sering dikunjungi orang dengan tata cara adat sebagaimana orang menghadap kepada raja atau sultan yang masih berkuasa.

Leirissa³, sering menjelaskan bahwa suksesi raja-raja dan sultan di Nusantara dilihat melalui teori **Patront-Client**, fokus analisisnya pada dua bidang yaitu: (1) membahas teori Barat yang berhubungan dengan *patront-client*, (2) membahas pengalaman masyarakat dalam mengembangkan kebudayaannya, sehingga terbentuk struktur pelebagaan kekuasaan yang dipengaruhi tiga tradisi besar: Islam, Melayu dan Tradisi lokal.

Dalam pandangan Geldern⁴, konsepsi tentang negara dan kedudukan raja, dapat dilihat dari sisi hubungan *patron tclient* dan kharismatik berarti menganalisis teori-teori kepemimpinan. Ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat dunia selalu terdiri dari pemimpin dan orang yang dipimpin. Yang dipimpin adalah rakyat yang selalu didominasi oleh para kaum kolonial istilah *sub-ordinasi*, yaitu sebagai masyarakat yang dikuasai. Oleh karena itu menurutnya, pemimpin selalu mempunyai dua hal yaitu **power** dan **authority**. Dalam pandangan Teori konflik dialektika kekuasaan (power) dan otoritas (authority) merupakan sumber yang langka dan selalu diperebutkan dalam sebuah *imperatively coordinated associations*. Dalam kajiannya, hubungan *patront-client* melalui teorinya yaitu: (1)

² Tjandrasasmita, Uka (Editor).. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka. (1993) : 217

³ Leirissa, R.Z. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*. Jakarta: Balai Pustaka, (1996): 45-54

⁴ Geldern, Robert Heine. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Terjemahan Deliar Noer. Jakarta: CV. Rajawali (1982): 44

teori yang tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patront* memperoleh kedudukannya melalui secara turun temurun.

Emmerson⁵ menyatakan bahwa Ada lima kategori seorang pemimpin mendapatkan kekuasaannya untuk boleh mempengaruhi orang lain. Lima kategori adalah: 1. *legitimate power*. 2, *expert power*.3, *charismatic* .4. *power* 5, *reward power* dan *coercive power*. Kelima kategori sumber kekuasaan bertalian erat atau berkaitan dan melekat pada diri seorang pemimpin. Namun, diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, maka kepemimpinan berbasis kharismatik merupakan pelatak dasar setiap kepemimpinan tradisional di berbagai entitas sosial dan pelebagaan kekuasaan.

Gesick⁶ menjelaskan kebudayaan Islam di Indonesia yang dikembangkan oleh kerajaan kerajaan Islam pada abad ke-17 ketika ada potensi ekonomi yang luar biasa di bidang perdagangan, ternyata hubungan *patront-client* mulai berubah ke arah yang egalitarian yang kemudian disebut demokrasi, menurut konsep masyarakat modern. Abad ke-17 adalah abad Islam dalam sejarah Indonesia, karena potensi ekonomi perdagangannya.

Hadi⁷, Ini dikarenakan Kepulauan Melayu merupakan gerbang masuk terdepan bagi pelayaran ke timur. Karena itu tidak heran jika kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai (1270-1514 M) dan Malaka (1400-1511 M) muncul di sini. Kerajaan-kerajaan ini tumbuh dari pelabuhan atau bandar dagang, dan menjadi kerajaan Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan ini maka perlebagaan Islam, termasuk lembaga pendidikan, dapat didirikan. Semua itulah yang memungkinkan penyebaran agama Islam dan transformasi budayanya dapat dilakukan. Menurutny faktor lain bagi pesatnya perkembangan Islam ialah mundurnya perkembangan agama Hindu dan Buddha, mengikuti surutnya kerajaan Hindu dan Buddha yang diikuti oleh mundurnya peranan politiknya. Abad ke-13 M ketika agama

⁵ Donald Emmerson, "Indonesia's Elite; Political Culture and Cultural Politics" makalah dalam seminar Departemen Politik, Monash University (1977) :5. Dimuat dalam majalah Indonesia, no. 31, April, 1981.

⁶ Gesick, Lorraine, Editor, *Pusat, Simbol, Dan Hirarki Kekuasaan Esai-esai Tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor (1989): 33-42

⁷ Hadi, Abdul W.M, *Islam Di Nusantara Dan Transformasi Kebudayaan Melayu* : ICAS Jakarta (1995): 21

Islam mulai berkembang pesat di kepulauan Melayu, sebagai contoh, ditandai dengan mundurnya kerajaan Sriwijaya atau Swarnabhumi. Pusat imperium Buddhis di Nusantara ini mulai mengalami kemunduran disebabkan rongrongan dua kerajaan Hindu Jawa - Kediri dan Singasari - disusul dengan krisis ekonomi yang membelitnya. Seabad berikutnya negeri ini dua kali diserbu Majapahit, sebuah imperium Hindu yang mulai bangkit di Jawa Timur. Serbuan terakhir pada penghujung abad ke-14 M menyebabkan negeri itu hancur dan tamat riwayatnya.

Kajian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan cara menggali secara mendalam proses, arti, dan pemahaman tentang pengalaman serta penghayatan yang terjadi pada hubungan-hubungan sosial di dalam sistem sosial khususnya pelebagaan kekuasaan tradisional baik raja maupun sultan. Jenis pendekatan sosiologi dan politik dipilih sebab lebih menekankan rasionalisme dan realitas sosial, politik dan budaya yang ada.

F. KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN

Hasil penelitian Horikoshi⁸ (1986), menegaskan bahwa sifat kepemimpinan sesungguhnya dapat dibangun melalui proses sosial, yaitu interaksi ketauladanan dan ketokohan yang terjadi antara tokoh-tokoh agama mempengaruhi pengikut di bawahnya, selanjutnya respon pengikut terhadap kualitas-kualitas yang diinginkannya. Fenomena kharismatik ini hanya terjadi pada suatu interaksi sosial yang diprakarsai oleh penampilan tokoh yang mempunyai kemampuan inheren, terpelajar dan disiplin.

Hasil penelitian Din Syamsudin⁹, berpandangan bahwa Hubungan Islam dan Kepemimpinan merupakan wacana klasik yang terus berkembang. Pertengahan abad 20 negara-negara Islam mengalami kesulitan di dalam mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara Islam dan Kepemimpinan, kenyataan menjelaskan memang di banyak negara Islam belum mampu menunjukkan hubungan yang harmonis antar Islam dan Kepemimpinan modern. Dalam tulisannya, Din, juga mengelaborasi secara tajam berbagai paradigma pemikiran kepemimpinan Islam dan politik di Indonesia.

⁸ Horikoshi, Hirokoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M (1986)

⁹ Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Kepemimpinan Orde baru*, Jakarta, logos (2001)

Hasil penelitian al-Attas¹⁰, datangnya Islam menyebabkan kebangkitan rasional dan intelektual yang bercorak religius di Nusantara yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kecuali itu Islam juga mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Islam menyuburkan kegiatan ilmu dan intelektual serta membebaskan mereka dari belenggu mitologi yang menguasai jiwa mereka sebelumnya. Hadirnya Islam membuka lembaran baru dan menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang sangat mendasar. Lebih jauh lagi dalam masyarakat terjadi proses pembentukan Islam ke dalam wajah institusi kekuasaan di seputar kerajaan yang sebelumnya sudah dipengaruhi oleh peradaban Melayu dan lokal. Dari Pasai dan Aceh, Islam kemudian tersebar ke wilayah-wilayah lain di kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di pulau-pulau lain sejak abad ke-16 M setelah penguasa setempat memeluk agama Islam dan kerajaannya terlibat dalam kegiatan perdagangan regional.

Hasil penelitian Muarif¹¹, di Jawa muncul kerajaan Demak, Banten, Pajang, Mataram, Cirebon dan Madura pada abad ke-16 dan 17 M; di Maluku kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 juga; di Sulawesi Buton, Selayar dan Gowa, di Nusatenggara Bima dan Lombok, di Kalimantan Banjarmasin dan Pontianak, dan seterusnya pada abad ke-17 dan 18 M. Melayu sendiri pusat-pusat kekuasaan dan peradaban Islam yang lain juga muncul menyusul kemunduran Aceh Darussalam sejak awal abad ke-18 M. Misalnya Palembang, Johor, Riau, Banjarmasin, Minangkabau, dan lain-lain.

Taufik Abdullah¹² Faktor penting lain yang menyebabkan Islam berkembang pesat ialah penempatan pusat-pusat lingkaran peradaban di tiga titik yang tepat, yaitu Istana, Pesantren dan Pasar (Taufik Abdullah 1988, dalam Sidiq Fadil 1991). Istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Di sini

¹⁰ Naquib Al-Attas, Muhammad Syed, *The Concept of Education in Islam: A Framework for An Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization/ISTAC (1999)

¹¹ Muarif, Hasan Ambari, *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu (1998)

¹² Taufik Abdullah. "Pemikiran Islam di Nusantara Dalam Perspektif Sejarah". Makalah Diskusi Peluncuran Buku *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta 5 September 2002 (2002)

dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan.

Di sini pula kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa Muslim. Pesantren berperan di bidang pendidikan, dan merupakan pusat kebudayaan kedua setelah istana. Proses penggantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuna "Hikayat Palembang" (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:

"Adapun cerita dari segala raja-raja yang memerintah diatas tahta kerajaan negeri Palembang itu, terlalu banyak fasal ia berganti-ganti menjadi raja diatas tahta kerajaan memerintah didalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni pesan. /Tatkala masanya raja lagi hidup, berwasiat kepada sekalian punggawa menterinya dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: "Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anakku mengganti akan menjadi raja". Demikianlah yang dikerjakan oleh segala punggawa menterii dan sekalian orang didalam negeri Palembang sepertimana yang wasiat itu juga. Dan adakalanya dengan sebab berperang dengan orang putih, yaitu Belanda. Dan apabila alah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti jadi raja diatas tahta didalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih"¹³

Van Leur¹⁴ dalam pernyataan laporan hasil disertasinya yang membahas pengaruh Hindu dan Islam serta Barat dalam sejarah Asia Tenggara, khususnya Indonesia lama. Masih menurut Van leur bahwa penyebaran dan perkembangan Islam berkaitan langsung dengan pelayaran internasional, karena para pedagang Islam juga pendakwah, Akan tetapi penerimaan Islam tidak terjadi dengan paksaan dari luar atau karena adanya daya tarik dari system budaya yang lebih tinggi yang masuk ke dalam sistem kekuasaan lokal. Sejalan dengan Mua'rif bahwa, di Jawa muncul kerajaan Demak, Banten, Pajang, Mataram, Cirebon dan Madura pada abad ke-16 - 17 M, di Maluku kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 juga; di Sulawesi Buton, Selayar dan Gowa, di Nusatenggara Bima dan Lombok, di Kalimantan Banjarmasin dan Pontianat, dan seterusnya pada abad ke-17 dan

¹³Wolders, Michiel Otto. 1975. *Het Sultanaat Palembang 1811 - 1825*. 's-Gravenhage. Lihat juga Wolters, O. W. *The Fall of Sriwijaya in Malay History*. Ithaca, New York: Cornell University (1970)

¹⁴J.C van Leur, *Indonesia Trade and society*, Den Haag:VanHoeve (1955)

18 M (Muarif :1998). Di kepulauan Melayu sendiri pusat-pusat kekuasaan dan peradaban Islam yang lain juga muncul menyusul kemunduran Aceh Darussalam sejak awal abad ke-18 M. Misalnya Kesultanan Palembang Darussalam, Johor, Riau, Banjarmasin, Minangkabau, dan lain-lain.

Seturut dengan berbagai temuan dan kajian diatas, dapat dikatakan bahwa pengaruh Islam, Melayu dan tradisi lokal, sesungguhnya turut membentuk proses konversi suksesi raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara ini termasuklah kesultanan Palembang. Hanya saja perlu memilah dalam hal pelembagaan kekuasaan terkait dengan pergantian sultan, pemberian gelar yang dikaitkan dengan agama umpamanya yang digunakan oleh raja-raja Mataram memakai gelar *Panembahan*, *Susuhunan* (*susuhunan*) atau *Sultan* dan pemakaian gelar *Sayidin Panatagama* seperti tampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh Susuhunan, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh sultan, raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar khalifatullah seperti terlihat pada rentetan gelar sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja

Jadi berbagai konstruksi teori dan hasil penelitian terdahulu terhadap sistem pengangkatan dan pergantian Raja atau Sultan di Nusantara selalu menyangkut masalah budaya dan pelembagaan kekuasaan yang dipengaruhi oleh Islam, Melayu dan tradisi lokal. Karenanya analisis sosiologis melalui teori patron client dan kharismatik dipakai untuk mengupas sistem politiknya, yang mencakup otoritas kharismatis atau tradisional, patrionalisme, feodalisme, birokrasi tradisional, dan lain sebagainya, sebab ranah Raja dan Sultan masuk dalam kajian sejarah klasik yang bercirikan nilai-nilai simbolis dalam masyarakat yang memiliki tipe kepemimpinan berbasis *genealogic-hereditically* (keturunan) dan kharismatik.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis dengan pendekatan sosiologi dan politik. Penelitian ini berusaha menyibakkan dinamika perubahan sosial, politik, budaya dari proses Islamisasi dan proses institusional serta proses

sosiokultural Islam dan Melayu pada masa kesultanan Palembang Darussalam. Untuk mempertajam studi ini, maka akan dilakukan pengambilan tema tertentu saja dari sejarah Kesultanan Palembang Darussalam misalnya proses terbentuknya Kerajaan Palembang dan mulai digunakannya kata *Kesultanan*, Tradisi Politik Suksesi Kesultanan Palembang, Ulama Kesultanan, Pola terbentuknya entitas Muslim Arab dan Muslim Melayu, munculnya strategi penyesuaian Arab dan Pribumi, terbentuknya institusi politik dari kerajaan ke kesultanan.

Pemahaman sosiologis dan sejarah terkait semua pengalaman sejarah maupun historiografi menjadi sangat penting. Sebab ekspresi dari ide, gagasan, pemikiran, kepercayaan, sistem organisasi, sistem sosial dan sistem budaya yang menggerakkan pengalaman sejarah yang lainnya, terutama proses islamisasi yang berlangsung bersamaan dengan perluasan aktivitas perdagangan yang tidak dapat dipisahkan dari munculnya pusat perekonomian baru di kerajaan lokal yang memiliki ciri keislaman yang kuat. Keberadaan jaringan sosial keagamaan dan ekonomi ini sangat penting bagi kelangsungan peran dan fungsi kaum Muslim dalam aktivitas perdagangan dan hubungan dengan peran kerajaan lokal.

2. Sumber data dan teknik pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui dua sumber yakni :

- a) Sumber-sumber kepustakaan dan dokumenter sebagai data primer
- b) Sumber-sumber lapangan sebagai data sekunder digunakan sebagai sumber informasi komplementer

Sumber data kepustakaan dan dokumenter akan dicari melalui teknik observasi dan kajian dokumentasi baik buku maupun literasi lainnya yakni; Islamisasi, wong Arab dan pribumisasi, Sejarah Palembang, Sejarah Kesultanan Palembang dan terbentuknya pola penggantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. seperti Husni Rahim, *Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang*, G.J. Resink *Raja dan Kerajaan yang merdeka di Indonesia 1850-1910*. M.C. Riklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Siti Hawa Haji. "Mitos dan legenda dalam konsep ke-raja-

an Melayu tradisional”, dalam Wan The, Wan Hashim dan Daniel Perret. Di Sekitar Konsep Negeri. Wolders, Michiel Otto.. *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*. “s-Gravenhage. Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Van den Berg, L.W.C, 1989, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, terj.

Rahayu Hidayat Jakarta: INIS, Hanafiah, Djohan. 1987. *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Parawisata Jasa Utama. Van Sevenhoven, JL, 1971, Lukisan tentang Ibukota Palembang, diterjemahkan oleh Sugarda Purbakawatja, Jakarta: Bratara Prabu Diradja, R.M.Syafe’i, Tanpa Tahun, Catatan Pribadi Tentan Silsilah Zuriat Sultan Kesultanan Palembang Darussalam, Palembang: Tidak diterbitkan. Prabu Diradja, R.M.Syafe’i , 2006, *Selayang Pandang Kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam*, termasuk peninggalan-peninggalannya., Palembang: Tidak diterbitkan. *Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta, 1947. Zuhdi, Susanto. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Ali Fachri. 1986. Refleksi “ Paham Kekuasaan Jawa” *Dalam Indonesia Modern*. Hasjmy A. (ed.), 1993, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* , Bandang al- ma’arif, Alwi Shahab, Hadramaut dan Koloni Arab (Republika Minggu, 13 Oktober 2002), Blusse, Leornard, 1987. *Persekutuan Aneh Pemukim Cina, Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*. Jakarta: Pustaka Azet. Utomo, Bambang Budi, 2005.

Sementara data sekunder dari lapangan akan digali melalui teknik wawancara dengan informan. Teknik ini digunakan untuk lebih memahami interpretasi kohensi terhadap berbagai data sejarah yang ditemukan. Hasilnya berupa gambaran kronologi, rekonstruksi dan kesimpulan yang kuat terhadap subyek penelitian.

3. Analisis Data

Dalam memahami berbagai keadaan yang mengendap pada hubungan-hubungan sosial, konflik dan dinamika formasi kekuasaan seperti status, peran, nilai, norma, pengetahuan, gagasan, simbol, yang mendeskripsikan peristiwa dan, maka akan digunakan analisis **interpretasi**. Analisis ini merupakan metode dalam *cultural science* untuk menghasilkan *scientific knowledge of an*

objectivity. Sebab penggunaan analisis ini peneliti mencoba mengetengahkan dimensi-dimensi yang terabaikan ke dalam analisis sosiologi yakni analisis aspek-aspek sosial, budaya, material dengan memahami makna sesuai situasi historis atau sosial yang melihat *social cultur world* (lingkungan sosial kultur) sebagai suatu fenomena yang dibentuk oleh manusia. Fokus analisis ini terletak pada apa yang disebut *shared meaning* (pemaknaan berbagai hal) dalam suatu proses sosial. Diharapkan dapat menjelaskan kebermaknaan berbagai kondisi dan hubungan yang ada dan secara implisit menciptakan konflik dan akan diperoleh makna sebenarnya (*the deepest insights*) tentang tindakan-tindakan yang terjadi pada relasi sosial.

4. Sistematika Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi sebuah laporan penelitian yang didalamnya merupakan data-data penelitian sesuai dengan obyek yang diteliti berdasarkan pokok ide dan gagasan, tema dan alur sejarah, hubungan kausalitas antara berbagai proses intitusional dan proses sosiokultural dengan setting Islamisasi dan Kekuasaan Raja-Raja Lokal serta kultur yang terbentuk melalui peran dan jejaring Kaum Muslim. Rancangan sistematika penulisan penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian Kerangka Teori Tinjauan Pustaka Metodologi Penelitian Teknik Analisis Data Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Proses pengangkatan pemberhentian Raja dan Sultan Dalam Tradisi Kerajaan atau Kesultanan di Indonesia

Bab III, Tradisi Melayu Islam Dalam memberi pengaruh terhadap proses pelembagaan kekuasaan Sultan baik pengangkatan maupun pemberhentian di kesultanan Palembang,

BAB IV. Penutup dan Kesimpulan

BAB II

PROSES PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN RAJA DAN SULTAN DI INDONESIA

A. AKULTURASI ISLAM TERHADAP TRADISI HINDU DAN BUDHA

Di daerah-daerah yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, agama islam mempunyai pengaruh yang mendalam. Misalnya di aceh, banten, Kalimantan selatan, Kalimantan barat. Di daerah-daerah yang pengaruh kebudayaan pra-islam telah kuat seperti di jawa tengah dan jawa timu, agama islam bersentuhan dengan unsur-unsur budaya pra-islam, sekaligus menciptakan tatanan kehidupan sosial budaya yang penuh toleransi. Proses akulturasi antara agama dan budaya pra-islam dan islam mengembangkan corak kehidupan keagamaan yang khas. Misalnya, tradisi pemakaman dengan segala atributnya yang seerba menonjol sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran islam. Islam juga tidak mengenal kegiatan perkabungan dalam bentuk persedekahan (Salleh, 1999: 59).

Perpaduan Tradisi Lokal, Hindu-Buddha, dan Islam di Masyarakat Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan islam membawa banyak perubahan terhadap corak kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Masuknya budaya islam tidak menyebabkan hilangnya kebudayaan Indonesia pra-islam (prasejarah dan hindu-buddha), tetapi justru memperkaya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan pra-islam yang baik terus di pertahankan dan di kembangkan sesuai dengan pola budaya islam dalam wujud akulturasi kebudayaan. Perwujudan akulturasi kebudayaan itu terlihat dari berbagai aspek kehidupan, misalnya seni bangun, seni rupa, seni tari, aksara, seni sastra, sistem pemerintahan, kalender, dan tasawuf.

1. Seni Bangun

Seni bangun islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-islam yang menonjol adalah makam dan masjid.

a. Makam

Makam sebagai hasil kebudayaan zaman islam mempunyai cirri-ciri perpaduan antara unsur budaya islam dan unsur budaya sebelumnya. Misalnya dilihat dari segi fisik, tata upacara pemakaman, dan letak makam.

b. Masjid

Dalam sejarah islam, masjid memiliki perkembangan yang beragam sesuai dengan daerah tempat berkembangnya. Di Indonesia, masjid mempunyai bentuk khusus yang merupakan perpaduan agama islam dengan budaya setempat. Misalnya, dari bentuk bangunan, menara, dan letaknya.

2. Seni Rupa

Cabang seni rupa yang berkembang adalah seni ukir dan seni lukis. Pola-pola hiasannya meniru zaman pra-islam, seperti daun-daunan, bunga-bunga, bukit-bukit karang, pemandangan, garis-garis geometri, kepala kijang, dan ular naga. Contoh, masjid yang di hias dengan ukiran adalah masjid Mantingan, dekat jepara yang terdapat lukisan kaca, ukiran gapura di candi Bentar di Tembayat, Klaten, yang dibuat pada masa Sultan Agung pada tahun 1633, dan gapura Sendang Duwur di Tuban. Pada zaman islam juga berkembang seni rupa yang disebut *kaligrafi*, yaitu seni menulis indah

3. Seni Tari.

Di beberapa daerah di Indonesia terdapat bentuk-bentuk tari yang berkaitan dengan bacaan selawat dan dalam tari itu sangat di pengaruhi oleh paham *sufi(tasawuf)*. Misalnya, pada permainan *debusyung* diawali dengan bacaan ayat-ayat tertentu dari Alquran atau selawat dengan menggunakan lagu-lagu tertentu.

4. Aksara

Sering dengan kedatangan islam ke Indonesia, masuk pula unsur budaya berupa huruf (aksara) arab. Aksara arab yang di gunakan dalam kitab suci agama islam (Alquran).

5. Seni Sastra

Kesusastraan pada zaman islam banyak berkembang di daerah sekitar selat malaka (daerah melayu) dan jawa. Kebanyakan karya sastra pada zaman islam yang sampai pada kita sekarang ini telah berubah dalam bentuknya yang baru, baik bahasa maupun susunannya. Pengaruh yang kuat dalam karya sastra pada zaman itu berasal dari Persia. Misalnya, *Hikayat Amir Hamzah*, *Hikayat Bayan Budiman*, dan *Hikayat 1001 malam (alif laila wa laila)*.

6. Sistem Pemerintahan

Pengaruh agama Islam di Indonesia juga meluas di bidang pemerintahan sehingga terjadi pula proses akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan pra-Islam. Bentuk-bentuk akulturasi dalam bidang pemerintahan itu adalah sebagai berikut:

- * Penyebutan nama raja
- * Sistem pengangkatan raja

7. Sistem Kalender

Ketika Islam masuk ke Nusantara, peninggalan Islam berupa kalender Hijriyah pun ikut masuk. Kalender Hijriyah menggunakan perhitungan peredaran bulan (lunar system atau sistem komariah). Semakin banyaknya penganut Islam di Nusantara, makin banyak pula diantara mereka yang menggunakan kalender Hijriyah sehingga menimbulkan masalah. Hal itu karena pemakaian kalender Hijriyah tidak sama dengan kalender yang selama ini di gunakan, yaitu kalender Saka yang menggunakan perhitungan peredaran matahari (solar system). Akibatnya, muncul usaha untuk memperbaharui kalender dengan cara menggabungkan kedua sistem kalender tersebut.

Percampuran Kepercayaan Lokal, Hindu-Buddha, dan Islam Dalam Kehidupan Keagamaan di Kerajaan-Kerajaan bercorak Islam Di daerah-daerah yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, agama Islam mempunyai pengaruh yang mendalam. Misalnya di Aceh, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Di daerah-daerah yang pengaruh kebudayaan pra-Islam telah kuat seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur, agama Islam bersentuhan dengan unsur-unsur budaya pra-Islam, sekaligus menciptakan tatanan kehidupan sosial budaya yang penuh toleransi. Proses akulturasi antara agama dan budaya pra-Islam dan Islam mengembangkan corak kehidupan keagamaan yang khas.

Misalnya, tradisi pemakaman dengan segala atributnya yang serba menonjol sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Islam juga tidak mengenal kegiatan perkabungan dalam bentuk persedekahan. Perbandingan Konsep Kekuasaan di Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha dengan Kerajaan-Kerajaan bercorak Islam. Pada zaman Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai seorang tokoh yang diidentikkan dengan dewa (kultus dewa-raja). Kekuasaan raja dianggap tidak terbatas. Ia tidak dapat di atur dengan cara-cara

duniawi, tetapi dalam dirinya terdapat kekuatan yang mencerminkan roh dewa atau jiwa illahi yang mengendalikan kehendak pribadinya.

Negara dianggap sebagai citra kerajaan para dewa, baik dalam aspek materialnya maupun aspek spiritualnya. Raja dan para pegawainya harus memiliki kekuasaan dan kekuatan yang sepadan dengan yang dimiliki oleh para dewa. Jadi, dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam yang keramat sifatnya, konsep magis religius memainkan peranan yang menentukan. Konsep magis religius ini tidak hanya dalam membenarkan dan memperkuat kekuasaan raja, tetapi juga dalam menjelaskan peranan orang yang memerintah dan yang diperintah serta hubungan antara raja dan rakyatnya.

Kaitannya dengan obyek penelitian ini dapat dipaparkan bahwa Pengakuan kedudukan raja (sultan) disahkan oleh para pendeta atau ulama. Raja mempunyai kewibawaan dan karisma yang besar, maka tidak hanya dirinya sendiri yang mempunyai status demikian, tetapi juga keturunannya. Itulah sebabnya keturunan mempunyai peranan penting pula dalam hubungannya dengan kekuasaan Negara (Sunoto, 1983; Purwadi, t.t.: 11).

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa konsep Negara dan kedudukan raja di nusantara tidak lepas dari masa-masa sebelumnya, yaitu konsep Hindu-Budha. Oleh karena itu sistem pengangkatan raja pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidak mengabaikan cara-cara pengangkatan raja seperti pada masa sebelum Islam (Tjandrasasmita, 1993).

Meskipun demikian, tampak adanya pengecualian pada saat pengangkatan raja pertama dalam suatu kerajaan. Raja-raja pertama pada masa permulaan kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Cirebon, Banten, umumnya waktu penobatan dilakukan oleh para wali sembilan yang diketuai oleh Susuhunan Ampel Denta. Susuhunan Gunungjati yang menjadi raja pertama di Cirebon telah mendapatkan restu dari Dewan wali sembilan dan diberi gelar raja pendeta yang menguasai tatar Sunda. Ketika para wali berkumpul di Demak untuk merencanakan perkawinan Pangeran Hassanuddin dinobatkan menjadi raja di Banten (Tjandrasasmita, 1993: 300). Setelah raja-raja pertama tersebut barulah sistem penggantian raja-raja mengikuti tradisi.

Bagaimana perjumpaan Islam dengan kebudayaan sebelumnya berjalan harmonis dan nyaris tanpa konflik, ini dapat dilihat dari teori tentang masuk dan menyebarnya

Hindu-Buddha ke kepulauan Indonesia yang umumnya Islam juga berkembang baik sebagai agama maupun sebagai institusi politik di daerah tersebut.

1. Teori Waisya (N.J.Krom)

Teori ini menyatakan bahwa kaum pedagang dari india, disamping berdagang, juga membawa adat kebiasaan, seperti melakukan upacara keagamaan.

Menurut N.J.Krom, kaum pedagang merupakan golongan terbesar yang datang ke nusantara. Mereka pada umumnya menetap di nusantara dan kemudian memegang peranan penting dalam proses penyebaran kebudayaan india melalui hubungan dengan penguasa-pengyasa indonesia.

2. Teori Ksatria (F.D.K.Bosch)

Teori ini berpendapat adanya raja-raja dari india yang datang menaklukkan daerah-daerah tertentu di indonesia dan menghindukan penduduknya.

3. Teori Brahmana (J.C.Van Leur)

Teori ini menyatakan bahwa kaum Brahmanalah yang menyebarkan agama Hinddu di Nusantara. Hal ini disebabkan karena kaum Brahmana merupakan golongan yang menguasai soal keagamaan.

4. Teori Sudra

Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke indonesia di bawa oleh kasta Sudra. mereka yang datang ke indonesia bertujuan untuk mengubah kehidupan karena di inddia hanya hidup sebagai budak. alasan itulah yang menjadi dasar dari teori ini, meskipun para ahli sejarah indonesia menyangsikan kekuatan teori ini.

5. Teori Gabungan

Teori ini beranggapan bahwa kaum Brahmana, Bangsawan, dan para pedagang bersama-sama menyebarkan agama Hindu sesuai dengan peranan masing-masing. Secara geografis indonesia terletak di lintas jalur perdagangan internasional zaman purba melalui jalur laut, yaitu India-Indonesia-Cina dan sebaliknya. hal itu telah di mulai sejak abad pertama Masehi. Berdasarkan bukti-bukti temuan arkeologis, di perkirakan hubungan dagang antara indonesia dan

India lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Cina. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut ini, diketahui angin musim yang baik untuk menyeberangi Samudra Hindia ke Timur (Indonesia) dan sebaliknya (Herwig Zahorka, 2007).

Dalam catatan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pernah ada diantaranya :

1. Kerajaan Kutai

Kerajaan Hindu tertua adalah kerajaan Kutai yang terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di Muarakaman di tepi sungai Mahakam. Kerajaan Kutai atau Kerajaan Kutai Martadipura (Martapura) merupakan kerajaan Hindu yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di Muara Kaman, Kalimantan Timur.

Diperkirakan kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini dibangun oleh Kudungga. Diduga ia belum menganut agama Hindu. Peninggalan terpenting kerajaan Kutai adalah 7 Prasasti Yupa, dengan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta, dari abad ke-4 Masehi. Salah satu Yupa mengatakan bahwa "Maharaja Kundunga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman (Dewa Matahari). Aswawarman mempunyai tiga orang putra. yang paling terkemuka adalah Mulawarman." Salah satu prasastinya juga menyebut kata Waprakeswara yaitu tempat pemujaan terhadap Dewa Syiwa.

2. Kerajaan Tarumanegara

Kerajaan Hindu tertua kedua adalah kerajaan Tarumanegara. diperkirakan berlokasi di lembah sungai Citarum, Jawa Barat, berdasarkan prasasti-prasasti dari kerajaan Tarumanegara yang ditemukan diantara sungai Citarum dan sungai Cisdane. **Poerbatjaraka** memperkirakan pusat pemerintah kerajaan Tarumanegara terletak di Bekasi berdasarkan isi prasasti Tugu.

Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat hampir bersamaan waktunya dengan Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Rajadirajaguru

Jayasingawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382 - 395). Maharaja Purnawarman adalah raja Tarumanegara yang ketiga (395 - 434 M). Menurut Prasasti Tugu pada tahun 417 ia memerintahkan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga sepanjang 6112 tombak (sekitar 11 km).

Dari kerajaan Tarumanegara ditemukan sebanyak 7 buah prasasti. Lima diantaranya ditemukan di daerah Bogor. Satu ditemukan di desa Tugu, Bekasi dan satu lagi ditemukan di desa Lebak, Banten Selatan. Prasasti-prasasti yang merupakan sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Prasasti Kebon Kopi,
- b) Prasasti Tugu,
- c) Prasasti Munjul atau Prasasti Cidanghiang,
- d) Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor
- e) Prasasti Muara Cianten, Ciampea, Bogor
- f) Prasasti Jambu, Bogor
- g) Prasasti Pasir Awi, Bogor.

3. Kerajaan Kalingga

Kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing diperkirakan berkembang sekitar abad ke-7 sampai abad ke-9 M. Nama Kalingga berasal dari nama kerajaan di India Selatan, yaitu kerajaan Kalingga. Para pakar masih berselisih pendapat tentang letaknya. Ada yang menduga terletak di Blora dan Purwodadi, di Malaysia, di Salatiga (dengan ditemukannya bekas kerajaan Klepu Pudukpayung), atau di Jepara, Jawa Tengah .

4. Kerajaan Sriwijaya

Sejak awal abad ke-1 M sudah terjalin hubungan dagang antara Indonesia dan India yang melewati Selat Malaka. Oleh karena itu, daerah Selat Malaka menjadi ramai dan diikuti dengan munculnya pusat-pusat perdagangan yang akhirnya menjadi pusat kerajaan. Salah satu kerajaan yang muncul di kawasan Selat Malaka adalah Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang

bercorak agama Budha. Raja yang pertamanya bernama Sri Jaya Naga, sedangkan raja yang paling terkenal adalah Raja Bala Putra Dewa.

Letaknya yang strategis di Selat Malaka (Palembang) yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Keadaan alam Pulau Sumatera dan sekitarnya pada abad ke-7 berbeda dengan keadaan sekarang. Sebagian besar pantai timur baru terbentuk kemudian. Oleh karena itu Pulau Sumatera lebih sempit bila dibandingkan dengan sekarang, sebaliknya Selat Malaka lebih lebar dan panjang. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar antara lain sebagai berikut :

- a) Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi selat Malaka, sehingga membawa keuntungan yang besar bagi Sriwijaya.
- b) Keruntuhan Kerajaan Funan di Vietnam Selatan akibat serangan kerajaan Kamboja memberikan kesempatan bagi perkembangan Sriwijaya sebagai negara maritim (sarwajala) yang selama abad ke-6 dipegang oleh kerajaan Funan.

Berdasarkan berita dari I Tsing ini dapat kita ketahui bahwa selama tahun 690 sampai 692, Kerajaan Melayu sudah dikuasai oleh Sriwijaya. Sekitar tahun 690 Sriwijaya telah meluaskan wilayahnya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Hal ini juga diperkuat oleh 5 buah prasasti dari Kerajaan Sriwijaya yang kesemuanya ditulis dalam huruf Pallawa dan bahasa Melayu Kuno. Prasasti-prasasti tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Prasasti Kedukan Bukit
- b) Prasasti Talang Tuwo
- c) Prasasti Kota Kapur
- d) Prasasti Telaga Batu
- e) Prasasti Karang Birahi
- f) Prasasti Ligor

Selain peninggalan berupa prasasti, terdapat peninggalan berupa candi. Candi-candi budha yang berasal dari masa Sriwijaya di Sumatera antara lain Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, dan Biaro Bahal, akan tetapi tidak

seperti candi periode Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit, candi di Sumatera terbuat dari bata merah. Beberapa arca-arca bersifat budhisme, seperti berbagai arca budha dan bodhisatwa Awalokiteswara ditemukan di Bukit Seguntang, Palembang, Jambi, Bidor, Perak dan Chaiya.

Pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa Sriwijaya menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat pengajaran agama Budha. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok I Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695. I Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha.

Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya. Letak Sriwijaya strategis membawa keberuntungan dan kemakmuran (Mulyana :2005) . Walaupun demikian, letaknya yang strategis juga dapat mengundang bangsa lain menyerang Sriwijaya. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan :

- a) Adanya serangan dari Raja Dharmawangsa 990 M.
- b) Adanya serangan dari kerajaan Cola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendracoladewa.
- c) Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara, 1275 - 1292.
- d) Muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai.
- e) Adanya serangan kerajaan Majapahit dipimpin Adityawarman atas perintah Mahapatih Gajah Mada, 1477. Sehingga Sriwijaya menjadi taklukkan Majapahit (ibid)

5. Kerajaan Majapahit

Lokasi pusat kerajaan Majapahit diperkirakan berada di dekat Trowulan yang letaknya kurang lebih 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto sekarang. Dugaan itu didasarkan atas banyaknya penemuan di lokasi berupa pondasi bangunan, gapura, candi, saluran air dan umpak-umpak rumah. Dalam sejarah Indonesia, periode Majapahit merupakan suatu periode yang paling

mengesankan. Hal ini dikarenakan pada periode itulah di nusantara terdapat suatu kerajaan besar yang di segani oleh mancanegara dan membawa keharuman nama indonesia sampai jauh ke luar wilayah Indonesia (Onghokham, 2003: 45).

B. AGAMA DAN POLITIK

Agama dan politik adalah institusi sosial yang berbeda secara fungsi dan peranannya. Namun sebuah institusi yang berbeda tidaklah menutup kemungkinan untuk bersatu saat sebuah nilai-nilai dalam agama mampu diwujudkan dalam membentuk sebuah sistem yang lebih tidak hanya terbatas pada urusan peribadatan pemeluknya. Nilai-nilai pada agama tidaklah menutup kemungkinan baginya untuk dijadikan sandaran politik. Roland Robertson Alford mengatakan bahwa hubungan antar politik dan agama muncul sebagai masalah pada bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama, ia juga menambahkan pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kondisi kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan berlawanan dengan nilai-nilai tertinggi masuk ke arena politik, mereka akan mulai bertikai dan makin jauh dari kompromi (Alford, 1988:379). Dari segi sikap negara terhadap agama dibagi menjadi empat bagian, yaitu negara agama, negara yang punya agama tertentu, negara membantu pembangunan agama dengan bersikap adil terhadap agama-agama bangsanya, dan negara sekuler.

Agama dan politik adalah institusi sosial yang berbeda secara fungsi dan peranannya. Namun sebuah institusi yang berbeda tidaklah menutup kemungkinan untuk bersatu saat sebuah nilai-nilai dalam agama mampu diwujudkan dalam membentuk sebuah sistem yang lebih tidak hanya terbatas pada urusan peribadatan pemeluknya. Nilai-nilai pada agama tidaklah menutup kemungkinan baginya untuk dijadikan sandaran politik. Roland Robertson Alford mengatakan bahwa hubungan antar politik dan agama muncul sebagai masalah pada bangsa-bangsa yang tidak homogen secara agama, ia juga menambahkan pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kondisi kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan berlawanan dengan nilai-nilai tertinggi masuk ke arena politik, mereka akan mulai bertikai dan makin jauh dari kompromi (Alford, 1988:379).

Dari segi sikap negara terhadap agama dibagi menjadi empat bagian, yaitu negara agama, negara yang punya agama tertentu, negara membantu pembangunan agama dengan bersikap adil terhadap agama-agama bangsanya, dan negara sekuler pandangan keagamaan berbaur dan bersaing dengan pandangan dunia non-agama, sehingga organisasi-organisasi keagamaan harus mengalami rasionalisasi dan de-birokratisasi. Hal yang sama dikemukakan Talcott Parsons, sosiolog terkemuka dari pendekatan fungsional. Menurut Parsons, dalam masyarakat multi-religius proses-proses politik yang berlangsung akan menjadi semacam diferensiasi yang menyediakan agama pada tempat yang lebih sempit tetapi jelas dalam sistem sosial dan kultural. Karena keanggotaan dalam suatu organisasi kemasyarakatan bersifat sukarela, maka konten dan praktik keagamaan dengan sendirinya mengalami privatisasi dan menyebabkan perkembangan *civil religion*.

Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pra-Islam, di sekitar abad ketujuh dan sebelumnya, adalah masyarakat dagang dengan ciri kosmopolitan yang sangat kental. Bahkan Burger menyatakan bahwa, jauh sebelum masa pra-sejarah, masyarakat Indonesia telah berkenalan dengan bangsa-bangsa lain di luar kepulauan. Perkembangan yang menarik buat masyarakat Indonesia adalah bahwa lambat laun ciri agrarisnya lebih menonjol dibandingkan dengan ciri baharinya.

Dampak penjonolan ini sangat besar pengaruhnya terhadap bentuk kerajaan, sistem kekuasaan, dan corak keagamaan masyarakatnya. Dengan demikian dapat pula berpengaruh terhadap struktur sosial yang berkembang pada masa itu. Bagi Indonesia, dampak kedatangan para pedagang sangat berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam di nusantara. Apalagi bila diingat bahwa, sejak dimulainya proses penyebaran Islam di Indonesia, belum terdapat suatu organisasi dakwah yang mapan untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat luas. Proses tersebarnya Islam pada waktu itu, semata-mata mengandalkan kemampuan dan ketekunan tenaga-tenaga da'i pedagang atau guru sufi.

Sangat beralasan bila dikatakan proses penyebaran Islam di Indonesia membutuhkan waktu yang relative lama bahkan berabad-abad. Latarbelakang sejarah berkembangnya kelompok pedagang Muslim di kepulauan Indonesia merupakan indikasi bahwa Islam disebarluaskan kepada masyarakat oleh kaum pedagang. Mereka tidak semata-mata berperanan sebagai pedagang, namun sekaligus bertindak sebagai da'i guru

agama (Islam), orang sufi yang memberikan bimbingan keagamaan dan kehidupan sehari-hari kepada masyarakat setempat. Kerana itu, terdapat kesan kuat bahawa Islam di Indonesia, pada awalnya, berpusat di kota yang juga merupakan pusat kegiatan dagang dan komersial. Pemeluk-pemeluk pertamanya adalah golongan pedagang – suatu masyarakat yang ketika itu, menempati posisi kelas sosial yang cukup baik.

Dalam penyebarannya kemudian, Islam dipeluk oleh masyarakat kota, baik dari lapisan atas maupun lapisan bawah. Keberhasilan Islam menembus dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadikan dirinya sebagai agama utama bangsa ini, merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Hal itu, terutama, jika dilihat dari segi geografis, di mana jarak Indonesia dengan Negara asal Islam, Jazirah Arab, cukup jauh. Kini, Islam relative telah berkembang di seluruh kepulauan Indonesia. Tetapi hal itu tidak berarti bahawa masyarakat Indonesia sepenuhnya menerima Islam. Sebagaimana di dunia Islam pada umumnya, proses Islamisasi tetap berlanjut dan, pada kenyataannya hal itu merupakan suatu proses yang tidak pernah selesai. Makalah ini akan mengelaborasi berbagai masalah sekitar perkembangan Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, hukum dan ekonomi. Di samping itu, juga akan dibahas upaya-upaya atau peranan Majelis Ulama Indonesia dalam perkembangan Islam di Indonesia.

Di antara ciri-ciri Islam yang dapat menduduki ranking par-excellence (istimewa) ialah kerana sifatnya yang universal, setiap aspek kehidupan tidak terlepas dari peraturannya tidak terkecuali aspek politik. Tidak heran bila dalam nas-nasnya senantiasa kita dapatkan berbagai hukum yang berhubungan dengan urusan kenegaraan berikutan sistem pemerintahannya, hukum perang dan damai serta hubungan internasional antara negara Islam dengan negara lainnya. Membahas pembangunan politik di Indonesia dalam perspektif Islam akan melahirkan dua pemikiran penting, yaitu pemikiran tentang hubungan antara politik dan Islam dan perlakuan oleh berbagai kekuatan politik terhadap Islam terutama dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia.

Sejak zaman kolonial sampai era kemerdekaan, tindakan dan kebijakan berbagai kekuatan politik terhadap Islam di Indonesia, tampak dalam peranan yang dimainkan oleh para pemimpin yang berorientasi kepada Islam. Peranan tersebut adalah implikasi dari situasi yang mereka hadapi dan dalam hubungan dialogis politik Islam

dengan budaya politik Indonesia yang selalu berubah. Dalam wacana tentang orientasi, gerakan atau institusionalisasi Islam di Indonesia sering digunakan istilah-istilah: "Islam Kultural", "Islam Struktural", dan "Islam Politik". Istilah "Islam Kultural" dan "Islam Struktural", tidak lazim digunakan dalam wacana Islam di luar Indonesia, meskipun istilah-istilah ini sebenarnya cukup tepat untuk menjelaskan fenomena perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia dengan di luar, yakni adanya orientasi pada hampir semua gerakan Islam di luar Indonesia pada Islam struktural dan ideologis, meski tidak semuanya mendukung atau terlibat dalam Islam politik. Namun, penggunaan istilah-istilah ini sering kurang pasti, terutama tentang "Islam structural" dan "Islam politik" yang sering dianggap identik. Untuk menelusuri lebih jauh term-term tersebut, paling tidak perlu membedakan karakteristik Islam ke dalam dua perspektif. Pertama, adalah institusionalisasi ajaran Islam, termasuk dalam konteks pembentukan sistem nasional, yang dikelompokkan ke dalam Islam cultural dan Islam structural; Kedua, gerakan atau aktifitas Islam, yang dikelompokkan dalam gerakan Islam kultural dan Islam politik.

Politik dan Islam di Masa Kolonial dalam kasus di Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia khususnya Hinduisme dan Buddhisme, sehingga Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Signifikansi hubungan yang begitu erat antara Islam dan Indonesia sebagai suatu daerah teritorial, menyebabkan penjajahan lebih dari tiga abad oleh Belanda dan Jepang gagal dalam upaya deislamisasi agar akidah Islam tercabut dari umat Islam. Sebab melalui hubungan itu juga menjelaskan terinternalisasinya nilai-nilai Islam baik dalam bentuk akidah, pesan-pesan moral dan sosial dalam diri pemeluknya guna membendung kolonialisme. Agaknya, uraian di atas ada benarnya, sebab mengakarnya Islam di Indonesia tidak terlepas dari sebuah proses panjang program sosialisasi Islam yang dilakukan oleh para pemuka Islam melalui aktifitas dakwah dan pendidikan.

Dalam proses tersebut, Islam di Indonesia telah berhadapan dengan berbagai tantangan ideologi, budaya, dan kekuatan sosial politik penguasa, sehingga memaksa Islam harus tampil dalam berbagai bentuk gerakan, seperti, gerakan Islam melawan kolonialisme, sebagai Islam politik, dan Islam sebagai kekuatan moral, kultural dan intelektual. Bentuk-bentuk gerakan tersebut di atas sebagai akibat dari upaya umat Islam

untuk menjadikan Islam sebagai agama yang dinamis melalui pola-pola sosialisasi seperti pola akomodasi, modifikasi dan sosialisasi, sehingga Islam tersosialisasi dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat Indonesia.

Menurut Fachry Ali, dinamika Islam yang tampil dalam berbagai bentuk gerakan, sangat dipengaruhi oleh dominasi Barat, baik yang bersifat "positif" seperti dalam bentuk intelektualisme, sains dan teknologi, maupun dalam hal-hal "negative" seperti kolonialisme. Namun demikian, untuk menghadapi dominasi itu, Islam sangat kaya dengan doctrinal dan pengalaman politik yang dapat ditransformasi dan direkonstruksi menjadi ideologi politik tanpa meminjam ideologi lain. Berbeda dengan Fachry Ali, Yusri Ilhza Mahendra mengklaim bahwa gerakan Islam dipengaruhi oleh faktor rekayasa-rekayasa politik penguasa dan faktor-faktor persaingan antara kelompok bangsa sendiri.

Mengamati berbagai uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi faktor-faktor dominan dalam dinamika gerakan Islam di Indonesia baik pada masa kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini. Gerakan-gerakan yang dilakukan kekuatan Islam agaknya mendapat banyak tentangan dari pihak kolonial. Sebab pemerintah kolonial Belanda dalam melestarikan penjajahannya di Indonesia menerapkan berbagai tindakan guna melumpuhkan kekuatan Islam.

C. SISTEM PERGANTIAN RAJA

Sistem pergantian raja di Asia Tenggara tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang baku, tetapi samar. Kadang-kadang raja sendiri yang memilih penggantinya. Kadang-kadang menteri-menteri mengangkat seorang pangeran sebagai raja. Ada pula, permaisuri-permaisuri secara tidak resmi tetapi efisien menyebarkan pengaruh mereka untuk kepentingan seorang pangeran pilihan mereka. Sering juga mahkota itu jatuh pada seorang pangeran yang paling cepat dan lebih dahulu merampas istana dan yang paling cepat membunuh saudara-saudaranya. Dalam keadaan seperti ini tidak mengherankan jika kerajaan-kerajaan Asia Tenggara dahulu itu memang sejak awal tepecah belah karena seringnya terjadi pemberontakan-pemberontakan yang sering mengakibatkan kejatuhan raja-raja, bahkan jatuhnya suatu dinasti. Sumber berita Cina menyebutkan bahwa peristiwa seperti itu sudah terjadi sejak abad ke-3 Masehi (Geldern 1982: 27).

Tidak berbeda jauh dengan sistem penggantian raja-raja di Asia Tenggara lainnya, menurut tradisi dan kebiasaan di kerajaan-kerajaan masa lampau di Indonesia, bisa terjadi kekuasaan jatuh pada pangeran mahkota yang diangkat oleh raja yang berkuasa. Sering pilihan ini tidak pada putra tertua yang sah dari permaisuri. Bila raja wafat, sementara pangeran mahkota belum diangkat, kadangkala rapat dewan sesepuh keluarga raja memilih calon di antara para pangeran keluarga raja. Lebih sering lagi pengganti raja yang wafat merebut tahta dan mempertahankannya dengan kekerasan, bahkan tak jarang dinasti diganti dan pusat kekuasaan pindah ke tempat lain (Onghokham, 2002: 158). Pengakuan kedudukan raja (sultan) disahkan oleh para pendeta atau ulama. Raja mempunyai kewibawaan dan karisma yang besar, maka tidak hanya dirinya sendiri yang mempunyai status demikian, tetapi juga keturunannya. Itulah sebabnya keturunan mempunyai peranan penting pula dalam hubungannya dengan kekuasaan Negara (Sunoto, 1983; Purwadi, t.t.: 11).

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa konsep Negara dan kedudukan raja di nusantara tidak lepas dari masa-masa sebelumnya, yaitu konsep Hindu-Budha. Oleh karena itu sistem pengangkatan raja pada masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tidak mengabaikan cara-cara pengangkatan raja seperti pada masa sebelum Islam (Tjandrasmita, 1993). Meskipun demikian, tampak adanya pengecualian pada saat pengangkatan raja pertama dalam suatu kerajaan. Raja-raja pertama pada masa permulaan kerajaan Islam di Jawa seperti Demak, Cirebon, Banten, umumnya waktu penobatan dilakukan oleh para wali sembilan yang diketuai oleh Susuhunan Ampel Denta. Susuhunan Gunungjati yang menjadi raja pertama di Cirebon telah mendapatkan restu dari Dewan wali sembilan dan diberi gelar raja pendeta yang menguasai tatar Sunda. Ketika para wali berkumpul di Demak untuk merencanakan perkawinan Pangeran Hassanuddin dinobatkan menjadi raja di Banten (Tjandrasmita, 1993: 300). Setelah raja-raja pertama tersebut barulah sistem penggantian raja-raja mengikuti tradisi.

Suksesi atau pergantian tahta di kerajaan Jawa tradisional tak sepenuhnya pasti dan jelas. Akibatnya, kosongnya suatu tahta hampir selalu menimbulkan keguncangan. Tak jarang seorang raja baru terpaksa menyuruh membunuh para pesaingnya—mungkin adik atau pamannya sendiri. Ini berbeda dengan sistem kerajaan Eropa. Di sana, anak lelaki tertua yang lahir dari permaisuri yang berhak atas tahta sesudah raja wafat. Kalau

tak ada anak lelaki, hak jatuh pada anak perempuan tertua dari permaisuri (Onghokham, 2003: 45).

Pendapat lain berkaitan dengan proses penggantian raja dikemukakan Pangeran Suryawijaya dari Yogyakarta, yaitu bahwa menurut konsep Jawa syarat utama pengganti raja adalah berdarah Mataram, tak harus selalu putra dari *garwa padmi* (permaisuri). Faktor lain yang juga utama adalah hak raja yang sedang berkuasa untuk mengangkat putra mahkota. Selain itu, calon penerima tahta harus berbadan sehat—tak boleh cacat—dan kekuatan seksualnya termasuk dalam ukuran berbadan sehat ini. Calon untuk tahta juga harus disenangi rakyat.

Di sisi lain, aturan suksesi kekuasaan di Jawa sangat dipengaruhi oleh konsep reinkarnasi, pengaruh kebudayaan Hindu. Menurut konsep reinkarnasi seseorang dilahirkan sebagai raja karena merupakan titisan dewa atau penerima wahyu, *pulung*, dan sebagainya, yang mengesahkan dia sebagai raja. *Pulung* adalah lambang kekuasaan Negara. Konsep reinkarnasi mungkin khas kerajaan agraris, sebab suksesi di kerajaan maritim lebih ditekankan pada tradisi dan adat, biarpun kekerasan tidak kurang banyaknya. Di kerajaan maritim tidak terdapat gejala ratu adil seperti di Jawa, di mana seorang petani, pejabat rendah, atau siapa saja dapat mengklaim dirinya ratu adil yang baru dan karena itu menuntut kekuasaan.

Gejala ratu adil menunjukkan bahwa sah tidaknya kekuasaan lebih berdasarkan pada kepercayaan daripada pertimbangan kekuasaan ekonomis, militer, dan politis. Oleh karena itu, orang sering mengatakan bahwa untuk mengerti proses politik di Indonesia orang harus mempertimbangkan segi mistis, budaya, dan tradisi politik masa lampau.

Di Kerajaan Mataram, yang didirikan sekitar akhir abad ke-16 - Mangkunegara juga berasal dari garis kerajaan ini - pengganti tahta adalah anggota dinasti yang memerintah, yang dianggap penerima *wahyu kedaton*. Tetapi ketidakjelasan tentang siapa yang menerima wahyu ini sering menimbulkan ketegangan, bahkan perang. Kekerasan yang terjadi melibatkan kalangan keraton dan keluarga raja. Pergantian dari Sultan Agung (wafat tahun 1646) ke Amangkurat I, misalnya, mengakibatkan dibunuhnya adik sang raja baru, karena dicurigai hendak merebut tahta. Ribuan ulama yang dituduh menghasut sang adik raja juga dibunuh.

Perang suksesi di Jawa terlihat pada munculnya lebih dari satu keraton setelah masa Mataram pada pertengahan abad ke-18. Atas desakan Kompeni, yang bertindak sebagai penengah antara para pesaing tahta, Mataram dipecah menjadi dua: kasunanan di Surakarta dan kesultanan di Yogyakarta. Sementara itu, masih ada seorang pangeran yang memberontak, yakni Raden Mas Said, yang juga dikenal oleh rakyat sebagai Sember Nyawa. Lantaran pangeran pemberani ini tak dapat dikalahkan, pada 1757, VOC, Susuhunan, dan Sultan mengakuinya sebagai Pangeran Midji, dengan gelar Pangeran Adipati Mangkunegara. Dialah peletak dasar Istana Mangkunegaran yang sekarang.

Sejak pembagian Kerajaan Mataram pada abad ke-18 itu, VOC menjadi penguasa yang dominan di Jawa. Sejak itu juga, Kompeni – dan kemudian pemerintah Hindia Belanda—selalu mencampuri pergantian tahta di keraton Jawa. Proses suksesi harus mendapat persetujuan dari Belanda, yang menganggap masalah ini penting untuk menjamin perdamaian di Jawa dan tentu saja untuk kedudukannya sendiri. Tetapi prinsip yang dipakai Belanda dalam menentukan suksesi adalah konsep Eropa, yakni sang pengganti adalah anak lelaki tertua dari *padmi* atau permaisuri yang sah. Konsep ini bertentangan dengan konsep “penerima wahyu” dalam pemikiran Jawa tradisional. Akibatnya timbul masalah, seperti pada pergantian Sultan Hamengkubuwono IV, menjelang meletusnya perang Diponegoro. Putra sulung Sultan Hamengkubuwono IV dari *garwa padmi* masih terlalu kecil (usianya baru lima tahun), tapi oleh Belanda ia ditentukan menjadi Hamengkubuwono V. Sebagai pendamping, ditunjuk beberapa orang wali raja, yaitu Pangeran Mangkubumi (paman Hamengkubuwono IV) dan Pangeran Diponegoro (paman Hamengkubuwono V), juga patih dan residen Belanda.

Konsep wali dan anak kecil sebagai raja ini kurang cocok bagi elite Jawa pada waktu itu. Muncul dengan segera ketidakpuasan dan cekcok antara para wali, biarpun masing-masing sudah mendapat pembagian tugas. Mangkubumi dan Diponegoro merasa tak dilibatkan dalam urusan kerajaan. Diponegoro akhirnya memberontak.

Sejak itu Belanda meninggalkan prinsip legitimasi Eropanya dan memakai tolok ukur lain bagi suksesi di keraton-keraton. Misalnya, ketika Hamengkubuwono V wafat, Juni 1855. Raja ini tak diganti oleh Raden Muhammad, putranya dari *garwa padmi* yang lahir beberapa hari setelah Sultan wafat. Yang jadi Hamengkubuwono VI adalah saudara Sultan almarhum.

Tetapi berangsur-angsur kekuasaan keraton hilang akibat faktor politis yang menimbulkan peperangan di Jawa. Sementara itu Hindia-Belanda makin menjadi negara kolonial yang modern. Keraton hanya menjadi sandiwara kekuasaan (*theatre state*) dengan pemerintah Hindia-Belanda. Dengan sang pemegang tahta baru kontrak perjanjian baru diadakan sebelum dia diakui sebagai raja. Walaupun demikian tidak berarti Belanda 100 persen menentukan suksesi. Adat Jawa tetap diperhatikan. Tapi pada umumnya kebijakan suksesi Belanda didasarkan pada loyalitas seorang pangeran terhadap pemerintah Hindia–Belanda. Di samping itu juga pada sikapnya yang bersahabat terhadap masyarakat Eropa setempat—atau *Europesche gezindheid*-nya.

Dukungan Belanda tentu merupakan kekuasaan konkrit bagi raja pengganti. Unsur popularitas di kalangan rakyat, sebaliknya, dapat dikesampingkan. Bahkan kehendak raja, misalnya pada pergantian Mangkunegara VI (tahun 1916), yang ingin digantikan oleh putranya dari selir. Pemerintah Hindia Belanda, dengan persetujuan beberapa pangeran, menolaknya, sehingga Baginda mengundurkan diri dari tahta. Pemerintah Hindia-Belanda mengabulkan pengunduran diri ini dan mengangkat kementerian raja yang bersekolah di Negeri Belanda, R.M. Surio Suparto, sebagai Prang Wadono, yang kemudian terkenal sebagai Mangkunegara VII, dan disebut sebagai salah seorang Mangkunegara terbesar.

Di Sumatera salah satu contoh pengangkatan sultan atau raja adalah proses pengangkatan Sultan Malik as-Saleh di Samudera Pasai, yang merupakan sultan pertama di nusantara. Sultan Malik as-Saleh, yang berdasarkan tradisi dari Hikayat Raja-raja Pasai pengangkatannya sebagai raja ialah sebagai berikut: Sebelum ia diangkat sebagai sultan namanya Merah Selu, putra Merah Gajah dan Merah Gajah adalah putra angkat Ahmad. Ia dinobatkan jadi sultan oleh utusan Syarif Mekah bernama Ismail yang ketika bertemu dengan Merah Selu telah mengajarkan agama Islam dan ajaran Rasul Muhammad. Merah Selu ternyata paham tentang apa yang diajarkan oleh syekh tersebut dan segera dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Malik as-Saleh (*Ibid.*). Setelah itu proses penggantian raja pada kerajaan-kerajaan di Aceh mengikuti hukum adat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan himpunan hukum adat Aceh yang tercantum dalam adat Makuta Alam, yang disusun secara lengkap pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dapat

diketahui bahwa sistem pengangkatan dan penobatan sultan di kerajaan Aceh tampaknya sudah dibakukan, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai aturan yang ada. Menurut lembaran sejarah adat yang berdasarkan hukum (Syara') dalam pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat. Oleh karena itulah waktu sultan dinobatkan, sultan berdiri di atas tabal, ulama memegang Quran berdiri di kanan, perdana menteri yang memegang pedang berdiri di kiri. Pada umumnya di Tanah Aceh pangkat sultan turun kepada anak. Sultan diangkat oleh rakyat atas mufakat dan persetujuan ulama dan orang-orang besar cerdas pandai. Adapun orang-orang yang diangkat menjadi sultan dalam hukum agama harus memiliki syarat-syarat bahwa ia mempunyai kecakapan untuk menjadi kepala negara (merdeka, dewasa, berpengetahuan, adil), ia cakap untuk mengurus negeri, hukum, dan perang, mempunyai kebijaksanaan dalam hal mempertimbangkan serta menjalankan hukum dan adat. Jikalau raja mangkat sebelum adanya pengganti oleh karena beberapa sebab lain, maka Panglima Sagi XXII mukimlah yang menjadi wakil raja, menerima hasil yang didapat dalam negeri Aceh dan daerah takluk atau jajahannya. Jikalau sudah ada yang patut diangkat menjadi raja, maka perbendaharaan itu pun dengan sendirinya berpindah kepada raja (*Ibid.* Hlm. 300).

Di Sulawesi Selatan dari beberapa catatan hukum adat yang dihimpun secara terus menerus dari abad ke-16 hingga abad ke-18, yang di Bone disebut "Latowa", di Gowa dinamakan "Rappang" dan di Wajo disebut "Lontara", bisa dilihat sistem pengangkatan raja yang pernah terjadi di kerajaan-kerajaan tersebut. Raja diangkat oleh Dewan Pemangku Adat. Setiap pengangkatan raja harus ditentukan oleh hasil pemilihan dari calon-calon oleh 40 orang Dewan Pemangku Adat.

Sistem penobatan raja di Maluku oleh Antonio Galvao dicatat secara terperinci pada masa kerajaan Ternate. Ia mencatat bahwa raja Islam yang pertama di Ternate sekitar tahun 1460 yaitu Vongi, merupakan raja yang pertama masuk Islam.

Di Ternate yang berhak naik tahta apabila ada pengangkatan raja ialah putra raja yang tertua yang berasal dari permaisuri. Menurut Antonio Galvao cara penobatan raja di Ternate ialah sebagai berikut: Sang Pangeran pada saat penobatannya memakai pakaian yang terbagus yang ia miliki, lalu dengan mahkota emas di kepalanya duduk di singgasana dengan pengiringnya yang selalu siap mengawal. Di pintu gerbang pun ditempatkan pengawal yang berpakaian perang. Para bangsawan yang menghadiri penobatan juga

memakai pakaian terindah yang mereka miliki. Setelah berkumpul semua mereka melakukan sembahyang. Setelah sembahyang selesai semua hadirin berlutut atau menyembah dan mencium raja sebagai lambang kesetiaan kepadanya. Sesudah upacara dilakukan di istana, semua menuju masjid. Raja naik kereta yang dikawal oleh pasukan bersenjata dengan pedang terhunus di tangan. Di depan kereta berkibar bendera kerajaan yang mereka sebut panji, yang melambangkan kebesaran raja. Panji tersebut dipasang pada kayu yang terbuat dari pohon palem berwarna merah dan putih dari atas ke bawah. Warna ini merupakan simbol raja. Musik yang dibunyikan ialah gong dan gamelan. Selain itu terdapat juga musik yang berupa serunai dan tifa. Setelah selesai peresmian dan pentasbihan di mesjid, raja yang telah resmi dinobatkan itupun kembali ke bangsal kerajaan (Ibid. Hlm. 301).

Di Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan bercorak Islam, seperti di Pontianak, Sambas di Kalimantan Barat, Kerajaan Kota Waringin di Kalimantan Tengah, Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, dan Kerajaan Kutei Kartanegara di Kalimantan Timur. Sistem pengangkatan raja di daerah-daerah tersebut tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang pernah ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah system pengangkatan raja di Kerajaan Banjar.

Menurut adat kebiasaan dalam Negara Banjar, pengganti raja adalah putra mahkota yang diangkat dari putra sulung raja yang meninggal dengan permaisuri dari golongan bangsawan (Leirissa, 1993: 53). Dengan demikian faktor keturunan menjadi prioritas utama dalam penentuan seseorang menjadi raja. Meskipun demikian, keturunan raja yang dapat dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Di samping garis keturunan yang dibenarkan oleh adapt, tabiat dan perilaku calon raja juga merupakan faktor penting dalam pemilihan. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan politik dan pribadi seringkali mengabaikan syarat-syarat tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kericuhan dalam istana dan kekecewaan di kalangan rakyat (Ibid.).

Dari sejumlah paparan di atas dapat diketahui bahwa menurut tradisi istana, sebagai pengganti raja ditetapkan putra laki-laki tertua atau satu-satunya putra laki-laki dari raja dengan permaisuri (*garwa padmi*). Apabila permaisuri tidak mempunyai putra laki-laki, maka putra laki-laki tertua dari selir (*garwa ampeyan*) dapat diangkat sebagai

pengganti raja. Apabila kedua-duanya tidak ada, dapat diangkat saudara laki-laki dari raja, paman atau saudara tua dari ayah raja sebagai pengganti. Penyimpangan dapat terjadi apabila calon yang berhak, tidak memenuhi syarat sebagai raja, seperti mempunyai sakit ingatan atau cacat badan. Penyimpangan dari tradisi, baik di sengaja maupun tidak disengaja dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para bangsawan dan bahkan dapat menjerumuskan ke arah intrik dalam istana dan pertentangan intern para bangsawan.

Dalam hubungan ini kepribadian dan sifat yang baik maupun kecakapan dalam memerintah mempunyai pengaruh besar atas otoritas raja. Dalam keadaan begini loyalitas baik dari kalangan istana, para pejabat birokrasi dan rakyat pada umumnya dapat terjaga. Sebaliknya, sifat dan tindakan yang tidak baik dari raja dapat menimbulkan ketegangan dalam istana ataupun rasa ketidakpuasan. Tindakan dari raja yang menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat kerajaan dapat pula menimbulkan kebencian dan penentangan (Leirissa, 1993: 6).

D. CORAK PERGANTIAN RAJA-RAJA DI NUSANTARA

1. Corak Suksesi Kerajaan Islam (Patron Client-Kharismatik)

Sejarah mencatat pergantian kekuasaan di kerajaan Aceh menganut pola hubungan *patron-client*, dalam hal ini dapat diambil contoh kerajaan Aceh. Di Aceh, kerajaan Aceh mempunyai dua kitab undang-undang yaitu *Tajusalatin* dan *Bustanu Salatin*. Dua buku ini merupakan dua sumber untuk membaca pengaturan dan perilaku masyarakat Islam Aceh dalam hal hubungan antara raja dengan rakyat (*patron-client*). Ada perbedaan raja sebagai *patron* antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu.

Dalam kebudayaan Islam *patron* adalah: (1) raja dalam konsep Islam dianggap sebagai orang biasa yang mempunyai kelebihan; (2) dalam kebudayaan Islam, *patron* atau raja, sultan, harus mampu mengemban keadilan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, menurut adat Aceh, seperti yang terungkap dalam dua kitab tersebut, raja dituntut oleh *klient*-nya: (a) bertindak adil pada orang yang mencuri, memberikan hukuman berat pada orang yang mencuri; (b) raja harus menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup.

Artinya yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan; (c) raja-raja Islam Aceh, dituntut oleh *client* untuk memberikan sebagian hartanya pada rakyat. Menurut al-Attas (1972), datangnya Islam menyebabkan kebangkitan rasional dan intelektual yang bercorak religius di Nusantara yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kecuali itu Islam juga mendorong terjadinya perubahan besar dalam jiwa bangsa Melayu dan kebudayaannya. Islam menyuburkan kegiatan ilmu dan intelektual serta membebaskan mereka dari belenggu mitologi yang menguasai jiwa mereka sebelumnya. Hadirnya Islam membuka lembaran baru dan menyebabkan terjadinya proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang sangat mendasar (Kern 1917; Schrieke 1955). Lebih jauh lagi dalam masyarakat terjadi proses pembentukan Islam ke dalam wajah institusi kekuasaan di seputar kerajaan. Dari Pasai dan Aceh, Islam kemudian tersebar ke wilayah-wilayah lain di kepulauan Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam pun bermunculan di pulau-pulau lain sejak abad ke-16 M setelah penguasa setempat memeluk agama Islam dan kerajaannya terlibat dalam kegiatan perdagangan regional.

Di Jawa muncul kerajaan Demak, Banten, Pajang, Mataram, Cirebon dan Madura pada abad ke-16 - 17 M; di Maluku kerajaan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 juga; di Sulawesi Buton, Selayar dan Gowa, di Nusatenggara Bima dan Lombok, di Kalimantan Banjarmasin dan Pontianak, dan seterusnya pada abad ke-17 dan 18 M (Hasan Muarif Ambariyah 1998). Di kepulauan Melayu sendiri pusat-pusat kekuasaan dan peradaban Islam yang lain juga muncul menyusul kemunduran Aceh Darussalam sejak awal abad ke-18 M. Misalnya Kesultanan Palembang Darussalam, Johor, Riau, Banjarmasin, Minangkabau, dan lain-lain. Artinya pengaruh Islam dalam turut membentuk proses konversi suksesi sultan-sultan di dalam Kesultanan Palembang sangat kuat sebab didukung dengan terbentuknya jaringan kekerabatan yang tidak hanya memiliki fungsi sosial dan keagamaan, fungsi ekonomis melainkan juga fungsi politik yang sangat kuat. Melalui jaringan inilah akhirnya berbagai kegiatan kesultanan berlangsung diantaranya adalah pergantian kekuasaan dan gelar Islam yang dikenakan.

Faktor lainnya adalah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bukan saja sebagai sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus merupakan kekuatan alternatif yang cukup diperhitungkan. Islam merupakan daya dobrak bagi pengikutnya untuk menghancurkan tatanan sosial yang timpang. Islam juga merupakan kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme. Kenyataan tersebut bukan merupakan sesuatu yang asing bagi Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan alternatif yang mampu mengubah setiap bentuk tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan dan diktum-diktum universal (Fachry Ali,ed, 1986 :32).

Kondisi tersebut didorong juga oleh penyebaran Islam yang massif di Nusantara, diikuti munculnya kerajaan-kerajaan baru bercorak Islam pada abad 13, ternyata menciptakan momentum baru bagi hubungan-hubungan social, politik, agama antara Timur Tengah dan Nusantara. Bahkan manakalah Malaka jatuh ke tangan Paortugis (1511), posisinya digantikan Aceh yang mengambil inisiatif bersama kerajaan Islam lainnya seperti Demak untuk menghadapi kekuasaan Portugis di perairan selat Malaka.

Raja-raja Mataram memakai gelar *Panembahan*, *Susuhunan* (*susuhunan*) atau *Sultan*. Agama Islam diangkat menjadi agama Negara. Pemakaian gelar *Sayidin Panatagama* seperti tampak pada rentetan gelar yang dipakai oleh Susuhunan, raja-raja Surakarta, demikian pula oleh sultan, raja-raja Yogyakarta, menunjukkan bahwa raja-raja tersebut dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar khalifatullah seperti terlihat pada rentetan gelar sultan Yogyakarta menunjukkan pula unsur keagamaan dari kedudukan raja (Berg, 1901: 21-25, Leirissa 1993: 7). Leirissa menyimpulkan bahwa adat kebiasaan dalam Negara Banjar, pengganti raja adalah putra mahkota yang diangkat dari putra sulung raja yang meninggal dengan permaisuri dari golongan bangsawan , ini juga berlaku di kesultanan nusantara lainnya (Leirissa, 1993: 53).

Dengan demikian faktor keturunan menjadi prioritas utama dalam penentuan seseorang menjadi raja. Meskipun demikian, keturunan raja yang dapat dicalonkan harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Di samping

garis keturunan yang dibenarkan oleh adat, tabiat dan perilaku calon raja juga merupakan faktor penting dalam pemilihan. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan politik dan pribadi seringkali mengabaikan syarat-syarat tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kericuhan dalam istana dan kekecewaan di kalangan rakyat. Dalam pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat. Masih dalam tulisan Leirissa menurutnya waktu sultan dinobatkan, sultan berdiri di atas tabal, ulama memegang *Quran* berdiri di kanan, perdana menteri yang memegang pedang berdiri di kiri. Pada umumnya di Tanah Aceh pangkat sultan turun kepada anak. Sultan diangkat oleh rakyat atas mufakat dan persetujuan *ulama* dan orang-orang besar cerdik pandai.

Adapun orang-orang yang diangkat menjadi sultan dalam hukum agama harus memiliki syarat-syarat bahwa ia mempunyai kecakapan untuk menjadi kepala negara (merdeka, dewasa, berpengetahuan, adil). Geertz mengistilahkannya dengan *istana yang identik dengan bangsawan* sementara ldquo mengistilahkannya dengan *darah biru*, Geertz menyatakan bahwa tanpa istana seorang bangsawan tidak mempunyai arti politis sama sekali. Status sosial seorang bangsawan akan merosot jika ia tidak mempunyai atau tidak berkedudukan di istana.

2. Corak Suksesi Raja-Raja Mataram (Patron Client)

Konsepsi tentang negara dan kedudukan raja di Asia Tenggara tidak terlepas dari peranan regalia, alat-alat kebesaran raja-raja. Sifat magis dari regalia ini punya peranan yang sangat dominan di Semenanjung Melayu dan Indonesia. Pemikiran ini bisa dilihat di kalangan Bugis-Makasar, yang meyakini bahwa sebenarnya regalia itulah yang memerintah, sedangkan raja bersangkutan memerintah negeri itu hanya atas nama regalia tadi (Geldern 1982: 25-26).

Di Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan terdapat semua unsur kerajaan atau *polity* tradisional, yang berfokus pada kekeramatan, atau *kasekten* di Jawa, *Daulat* di dunia Melayu dan seterusnya yang dalam istilah asing mungkin dapat diterjemahkan dengan “magi”.

Menurut Shelly Errington (1989:89-139), masyarakat Luwu yang memberikan kekuasaan pada seorang pemimpin itu adalah geografi, regalia

(benda-benda pusaka), genealogi yang dikatakan menjadikan seorang pemimpin pemilik “darah putih”.¹ Walaupun dalam kesatuan politik Luwu semua unsur ini (yakni geografi, regalia dan lain-lain, tetap memancarkan kekuasaan bagi hidupnya suatu *polity*) adalah tetap, tetapi kekuasaan-kekuasaan sifatnya tidak stabil (*impermanent*) atau tidak abadi, selalu goncang. Kekuasaan pada dasarnya tergantung dari perorangan dan kepemimpinan.

Sejarah mencatat bahwa Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan periferan dan menjadi peta perjalan peradaban kawasan kuno dengan menghubungkan jalur perdagangan antara Cina dan India. Dari situ pula, penyebaran kebudayaan kedua pengaruh bangsa Cina dan India tersebut masuk, sebelum akhirnya pengaruh Islam dan Barat masuk juga berkembang di Asia Tenggara. Namun dalam perkembangan dan penyebaran kebudayaan India, jelas lebih berpengaruh kuat dikawasan Asia Tenggara daripada pengaruh budaya Cina. Hal ini terlihat dari corak-corak kerajaan-kerajaan kuno di Asia Tenggara yang lebih banyak memperlihatkan corak kerajaan Hindu-Budha, sehingga menunjukkan pengaruh budaya India yang sangat khas dan kuat. Pengaruh India tidak hanya sebatas pada agama, tetapi pengaruh itu juga terdapat dalam sistem politik dan kekuasaan di Asia Tenggara yang terlihat dalam konsepsi politik, bentuk dan tata pemerintahan di beberapa kerajaan di Asia Tenggara. Pengaruh budaya India terhadap masyarakat Asia Tenggara sangatlah besar terutama pada konsep negara dan pemerintahan serta kedudukan raja.

Konsep negara sebagian besar merupakan wujud pengaruh India yang berusaha menyelaraskan hubungan antara Raja, Dewa dan alam semesta. Penyelarasan hubungan antara Raja, Dewa dan alam semesta diwujudkan dalam sebuah konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Tentu banyak konsep-konsep politik dan kekuasaan dalam kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara ini. Namun nampaknya, konsep Dewa-Raja lah yang paling mewakili konsep politik dan kekuasaan pada sebagian besar raja-raja di Asia Tenggara seperti kerajaan kuno di Birma, Kamboja, Thailand, Nusantara seperti Kerajaan Mataram maupun kerajaan Sriwijaya. Bagi agama Hindu, Doktrin Brahma menjadi legitimasi kekuasaan Raja, sedangkan Doktrin Buddha menjadi legitimasi kekuasaan raja-

raja di kerajaan bercorak Buddha. Nusantara yang merupakan negeri dengan banyak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Budha telah memperlihatkan perwujudan konsep Dewa Raja ini dalam sistem politik dan kekuasaan raja. Namun lambat laun pengaruh Hindu-Budha memudar seiring dengan masuknya pengaruh Islam dan Barat (Eropa) .

Akan tetapi konsepsi mengenai kekuasaan dengan konsep *Dewa Raja* ini selanjutnya tetap terlihat pada kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara, meskipun terdapat beberapa perbedaan. Hal ini dapat terlihat pada Kerajaan Mataram Islam yang akhirnya terbagi menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kraton Yogyakarta bercorak Islam dan telah mendapat pengaruh modernisasi yang merasuk kedalam aspek-aspek kenegaraan dan masyarakat, namun perwujudan konsep Dewa-Raja tetap melekat dalam kekuasaan raja, kehidupan kenegaraan dan kepatuhan masyarakat sekitarnya terhadap sistem keraton.

Meskipun konsep Dewa-Raja ini lebih kental dengan nuansa Hindu-Buddha, akan tetapi konsep ini menjadi corak serta karakter yang unik dan menarik dalam konsep kekuasaan di Keraton Yogyakarta yang bercorak Islam. Ini bisa terlacak dalam tradisi pemberian gelar di Keraton Yogyakarta (Poesponegoro, 1993: 5). Gelar Sultan Kraton Yogyakarta adalah *Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ing Nalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalipatullah*”, secara singkat hanya gelar ketiga yang dijadikan gelar panggilan di keraton Yogyakarta yaitu Hamengkubuwana. Gelar tersebut memiliki makna Ngayogyakarta Adiningrat , yang menyiratkan bahwa sultan Hamengkubuwana mengidentifikasikan dirinya dengan Wisnu, sebab Hamengkubuwana berarti “Yang Memelihara Dunia”, jadi Wisnu. Ngayogyakarta Adiningrat berarti “Ayodya Yang Makmur, Yang Indah di Dunia”.

Dalam kebudayaan Hindu, *patront* dituntut bahwa: (a) raja sebagai *patront* dianggap sebagai orang yang luar biasa, karena ia mengandung unsur magis dan sakral. Dunia diri raja sebagai *patront*, digambarkan sebagai mikrokosmos, di mana klien yakni /rakyat beranggapan dan percaya bahwa

hubungan mikrokosmos atau alam raya harus serasi dan seimbang. Jika terganggu akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Untuk itu patront harus disakralkan dengan berbagai upacara dan ritual. (b) pada masa kejayaan Majapahit, kepala perang daerah, pada waktu upacara bulan purnama setahun sekali harus menghadap raja bersama upetinya berupa emas dan hasil bumi. Karena raja dianggap sebagai sakral, maka mekanisme ini tidak mengalami kesulitan.

Seperti konsepsi *Ayodya* yang merupakan nama ibukota kerajaan Rama, dan Rama adalah inkarnasi Wisnu, bahkan dalam babad-babad, Sultan Hamengkubuwana sering dikatakan sebagai Wisnu yang sedang turun ke bumi Raja-raja di Jawa juga memakai gelar Panembahan, Susuhunan (Sunan), atau Sultan. Sering dengan dijadikannya Islam sebagai agama Negara. Gelar Sayidin Panatagama yang berarti orang yang ahli dibidang keagamaan, sering dipakai raja-raja Yogyakarta untuk menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai pemuka agama. Penggunaan gelar *Khalifatullah* juga menunjukkan adanya unsur keagamaan dari kedudukan raja (Poesponegoro, 1993: 6). Bahkan menurut Geldern (1982:18). Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan (*legitimacy*) sebagai raja.

Sistem kekuasaan pada kerajaan-kerajaan hindu-budha dan islam pada umumnya adalah berasaskan keturunan atau turun-temurun. Jika tidak demikian seseorang bisa menjadi raja karena ditahbiskan oleh pendeta melalui upacara Vratoyastoma. Pada masa perkembangan islam seseorang bisa menjadi raja karena ditobatkan oleh para wali seperti di demak, Cirebon, dan banten. Sementara malik al saleh dari samudra pasai dinobatkan menjadi sultan oleh syeh ismail dari arab. Konsep Kekuasaan pada kerajaan hindu-budha menganggap bahwa raja adalah keturunan dewa di bumi. Raja memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hirarki kerajaan.

Dalam melaksanakan tugasnya raja dibantu sejumlah pejabat birokrasi. Seperti di masyarakat, seorang raja dibantu oleh dewan sapta prabu, ada maha menteri kartini, ada pancaring wilwakita dan paningkah sri narendradwipa. Di dalam kerajaan hindu-budha tidak ada gelar khusus bagi sebutan raja. Berbeda

dengan kerajaan-kerajaan islam, ada beberapa sebutan bagi raja-raja islam seperti sebutan bagi raja-raja jawa adalah sultan, susuhunan, panembahan dan maulana. Di Sulawesi selatan rajanya bergelar samboya (yang disembah). Sementara di luwu rajanya bergelar mapayunge dan di bone bergelar mangkaue (yang bertahta). Didalam kebudayaan jawa konsep kekuasaan di kerajaan hindu-budha dan islam pada umumnya menyatakan raja adalah makhluk yang tertinggi di rakyat. Pribadi yang sacral penuh kharisma. Didalam serat niti praja dikatakan bahwa raja diumpamakan bahwa raja berkuasa atas hidup dan matinya sandang dan pangan rakyatnya.

Raja dalam konsep kekuasaan Jawa yang biasa disebut *Ratu-binathara* memiliki tiga macam wahyu, yaitu *wahyu nubuwah*, *wahyu hukumah*, dan *wahyu wilayah*. Yang dimaksud dengan *wahyu nubuwah* adalah wahyu yang mendudukan raja sebagai wakil Tuhan; *wahyu hukumah* menempatkan raja sebagai sumber hukum dengan wewenang *murbawisesa*. Kedudukannya sebagai sang *murbawisesa*, atau Penguasa Tertinggi ini, mengakibatkan raja memiliki kekuasaan tidak terbatas dan segala keputusan tidak boleh ditentang, karena dianggap sebagai kehendak Tuhan. *Wahyu wilayah*, yang melengkapi dua macam wahyu yang telah disebutkan di atas mendudukan raja sebagai yang berkuasa untuk memberi *pandam pangauban*, artinya memberi penerangan dan perlindungan kepada rakyatnya (Darsiti, 2000 vide Purwadi, 2003: 5-6).

Selain itu, apa yang disebut sumber kekuasaan tidak saja ada pada diri Raja namun juga pada kerajaan atau keraton. Ia juga dipandang sebagai lambang kekuasaan raja dan merupakan tiruan (replika) alam semesta (Behrend, 1982: 170-172). Raja dianggap sebagai pribadi yang memusatkan kekuatan dan kekuasaannya, maka keraton merupakan institusi pendamping dalam proses pemusatan itu. Keraton tidak hanya dihayati sebagai pusat politik dan budaya, melainkan juga sebagai pusat keramat kerajaan (Heine-Geldern, 1982: 6).

Dua corak pergantian Raja dan Sulthan di Nusantara mengalami pergeseran sistem akibat dari masuknya Portugis dan VOC. Seiring monopoli VOC dalam bidang perdagangan dan jalur pelayaran, maka berubah status VOC menjadi imperium Kolonial Belanda menjadikan kedudukan kerajaan-

kerajaan berada di bawah penguasa Kolonial Belanda. Akibat dari pergeseran kekuasaan itu, terjadilah posisi aparat birokrasi tradisional menjadi agen kolonial Belanda, yang bekerja untuk mengeksploitasi rakyat. Di satu pihak kelihatannya Belanda masih menghormati para bangsawan (birokrasi tradisional), namun di pihak lain birokrat tradisional hanyalah sebagai pelaksana di bawah pemerintah kolonial Belanda. (Emmerson, 1977: 5). Menurut Donald pada abad ke 16, tepatnya tahun 1511 Portugis masuk ke Indonesia, kemudian disusul oleh VOC Belanda pada tahun 1596 di Banten. Hubungan kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan Belanda pada mulanya mempunyai status yang sederajat, dalam perkembangannya kekuasaan Raja dan Sulthan di Nusantara menjadi subordinat dari Kekuasaan Kolonial Belanda dimana wilayah kekuasaannya dijadikan Residen atau keresidenan.

Seperti kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan oleh Kolonial Belanda dengan disahkannya Gemeente Cheirebon (Kota Cirebon), yang mencakup luas 1.100 Hektar, dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370). Pada masa kemerdekaan Indonesia, kata Kesulthan diganti dengan kata Keresidenan Cirebon dan tidak lagi merupakan pusat dari pemerintahan dan pengembangan agama Islam. Hal serupa juga dialami Kesultanan Palembang yang sudah dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1923, bahkan sultan terakhir yang berkuasa dibuang ke Batavia. Pengangkatan tersebut menarik karena setelah lebih 200 tahun institusi keraton dan sultannya tidak ada sekarang dimunculkan kembali oleh sekelompok masyarakat Palembang. Kolonial Belanda memperkenalkan konsep negara modern yang berbeda dengan proses suksesi kepemimpinan kesatuan politik berbentuk kerajaan atau kesultanan.

Konsep kerajaan di masa lalu selalu dikaitkan dengan pemusatan kekuasaan kepada seorang raja, maka dalam masyarakat modern, negara mempunyai batas geografi yang kekal memisahkan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Tetapi lebih penting dari itu, suatu Negara mempunyai identitas tersendiri yang dicirikan oleh asal-usul dan perkembangan sejarah serta keunikan dalam aspek bahasa dan budaya. Negara akhirnya menjadi sebuah

entitas politik yang kekal (Wan The dan Daniel Peret, 1999: xvi). Hal ini berbeda dengan masa lalu, karena masalah teritori dalam konsep tradisional nusantara khususnya dan Asia Tenggara umumnya mengenai monarki sebenarnya tidak penting. Kerajaan tradisional Asia Tenggara tidak mengenal batas. Barangkali benar pernyataan Ricklefs bahwa Islamisasi yang terjadi di nusantara merupakan proses yang sangat penting, tetapi juga merupakan masa yang tidak jelas (Ricklefs, 2005: 27).

Akhinya dapat dikatakan bahwa Islam tidak sekedar merubah ideologi keyakinan tetapi juga meletakkan dasar terbentuknya sistem kepemimpinan baru tradisional, aspek kepribadian, dan primordialism merupakan potensi kepemimpinan yang juga dituntut kemandirian ekonomi. Semua dimaksudkan untuk membiayai seluruh kehidupan dan institusi yang dipimpin. Gelar yang disandang oleh pemimpin tradisional memperlihatkan ciri dan model kepemimpinan yang diembannya. Gelar-gelar tersebut ada yang mencerminkan keilahian, pengayoman, perlindungan, pemeliharaan tetapi ada juga yang mencerminkan penguasaan. Aspek moral adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam kepemimpinan tradisional. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari masyarakat yang dipimpinnya. Kesediaan berkorban dari anggota masyarakat, termasuk kerelaan mengorbankan harta bendanya dan bahkan jiwanya yang paling berharga, akan terus mendukung bila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan pula kesediaan untuk berkorban guna kepentingan masyarakat.

E. STRUKTUR BIROKRASI DI KERAJAAN-KERAJAAN BERCORAK ISLAM

1. Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati tahun 1575 dan mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613 - 1645). Wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung pernah bercita-cita ingin menyatukan wilayah pulau Jawa di bawah kekuasaannya. Untuk mewujudkan cita-citanya beliau melakukan usaha menyerang VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629 tetapi gagal karena Mataram

kalah persenjataan, jaraknya terlalu jauh, kekurangan bekal, gagal membendung sungai ciliwung dan meninggalnya baurekso. Sepeninggal sultan agung kerajaan mataram mengalami kemunduran dan akhirnya pecah menjadi dua yaitu mataram jogja dan mataram Surakarta (diatur dalam perjanjian giyanti 1775). Tahun 1757 mataram Surakarta pecah menjadi dua lagi yaitu kasunanan dan mangkunegaran, sementara mataram Yogyakarta pecah menjadi dua yaitu kasultanan dan pakualaman. Struktur birokrasi hubungan pusat dan daerah diantaranya :

a. *System pembagian wilayah*

Kerajaan mataram dibagi menjadi beberapa kesatuan wilayah dengan keraton sebagai pusatnya. Wilayah itu antara lain :

- 1) Kutonegara atau kutagara yaitu wilayah keraton yang dipimpin oleh raja.
- 2) Negoro agung yaitu wilayah yang mengitari ibu kota kerajaan yaitu : kedu, siti ageng (bumi ageng), bagelan, dan pajang. Masing-masing wilayah kemudian dibagi menjadi 2 yaitu :
 - a) Wilayah kedu terdiri atas siti bumi dan bumijo
 - b) Wilayah siti ageng terdiri atas siti ageng kiwo dan siti ageng tengen
 - c) Wilayah bagelen terdiri atas daerah sewu dan numpak anyar
 - d) Wilayah pajang terdiri atas penumping dan panekar
 - Mancanegara wetan (jawa timur) dan mancanegara kilen (jawa tengah) yaitu wilayah diluar pantai dan bukan negoro agung. Masing-masing dipimpin oleh seorang bupati. Beberapa bupati dikoordinir oleh wedana bupati
 - Pasisiran wetan dan pasisiran kilen, biasanya sungai serang yang mengalir antara demak dan jepara. Masing- masing pasisiran dipimpin wedana bupati. Pesisir wetan pusatnya di jepara dan perisir kilen pusatnya di tegal.

b. *Susunan pemerintahan*

Susunan pemerintahan mataram adalah sebagai berikut :

- Raja adalah penguasa tertinggi kerajaan

- Wedana lebet jumlahnya 4 yaitu wedana gedong kiwo, wedana gedong tengen, wedana keparak kiwo, wedana keparak tangan, keempat wedana ini dipimpin pejabat tinggi namanya patih lebet.
- Wedana jawi jumlahnya ada 8 yaitu wedana bumi, wedana bumijo, wedana sewum wedana numbak anyar, wedana siti ageng kiwo, wedana siti ageng tengen, wedana penumping, wedana panekar
- Tumenggung ada dua orang yang bertanggung jawab langsung kepada raja
- Bupati yaitu mengepalai daerah mancanegara wetan dan kilen
- Wedana bupati yaitu memimpin pesisiran wetan dan kilen juga Koordinator bupati mancanegara wetan dan kilen
- Abdi dalem pametaan/pemutihan yaitu pejabat keagamaan meliputi penghulu, katib, modin, naib, suronoto
- Penghulu istana yaitu jabatan tertinggi di bidang agama
- Perdikan mutihan yaitu ulama yang mengepalai desa dengan tugas memelihara tempat badah seperti masjid, memberi pelajaran agama di daerahnya.
- Perdikan kuncen yaitu perugas yang memelihara makam keluarga raja.
- Pujangga yaitu pejabat yang memiliki keahlian di bidang sastra, adat seni, babad sejarah, silsilah raja, syair, filsafat dan lain-lain.
- Jeksa yaitu petugas yang membuktikan atas kesalahan pesakitan
- Bangsa pancaniti yaitu tempat siding untuk mengadili pesakitan yang mengadili raja sendiri
- Mertalutut atau singanagara yaitu pelaksana hukuman mati.

c. Hubungan pusat dan daerah

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintahan pusat dengan daerah serta mencegah timbulnya pemberontakan dari daerah perlu ada trik-trik sendiri bagi raja seperti diantaranya ;

- Raja harus berwibawa dan tegas
- Membangun kesetiaan penguasa daerah

- Dalam pengangkatan pejabat perlu seleksi yang ketat yaitu yang loyal pada raja.
- Mengadakan pengawasan yang ketat
- Para pejabat dikumpulkan pada acara tertentu seperti grebeg Maulud untuk mengetahui kesetiaan mereka.
- Para pejabat yang tidak hadir dalam pertemuan perlu dicurigai
- Mengirim telik sandi untuk mengetahui tingkah laku para pejabat yang dicurigai
- Para penguasa daerah harus menyerahkan upeti (glondong pangaren-areng)
- Sering memindahkan pejabat-pejabat untuk menghindari besarnya kekuasaan di daerah
- Perlunya angger-angger (peraturan) untuk menertibkan keadaan ((kartodirdjo, 1993: 298, Berg, 1901: 21-25 vide Leirissa 1993: 7).

2. Kerajaan Banjar

Kerajaan Banjar didirikan oleh pangeran samudra atau sultan Suryanullah setelah masuk Islam pada abad 16 M. *Susunan pemerintahan Banjar meliputi:*

- a) Sultan adalah penguasa tertinggi Banjar
- b) Patih Mangkubumi dan Mantra Sikap mengurus perbendaharaan istana termasuk menarik pajak bea cukai untuk pemasukan kas kerajaan.
- c) Pengapit Mangkubumi adalah penghulu
- d) Patih Bali yaitu petugas sebagai hakim
- e) Patih Muhur yaitu petugas sebagai hakim
- f) Sarawisa (jumlah 50 orang) bertugas membersihkan istana yang dikepalai Raksayuda
- g) Margasari (jumlah 40 orang) bertugas mengawasi raja saat menghadapi para pembesar kerajaan dipimpin Sarayuda
- h) Saragani yaitu petugas yang mengurus senjata seperti tombak, keris, tongkat, panah, perisai, senjata api dan lain-lain. Dikepalai Saradipa/Wangsanala

- i) Mangumbara yaitu kelompok khusus untuk upacara kerajaan
- j) Payang bawat yaitu pembawa alat upacara seperti payang
- k) Singapati/singataka yaitu petugas penjaga keamanan pasar
- l) Warga Sari yaitu petugas yang mengurus bidang ekonomi
- m) Juru gedong bertugas mengurus bidang ekonomi
- n) Anggamarta yaitu sebagai kepala pelabuhan/bea cukai
- o) Juru Bandar yaitu petugas pelabuhan local
- p) Wiramarta yang mengurus bidang perdagangan. Mufti sebagai hakim tertinggi kerajaan yang mengepalai hakim-hakim bawahan
- q) Penghulu Islam yaitu pemuka agama kepala masjid besar
- r) Lalawang kepala distrik
- s) Pembekel yaitu kepala desa tertua yaitu kepala kampung.

3. Kerajaan Aceh dan Kerajaan Palembang

Kerajaan Aceh berdiri abad 17 dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Pada masanya inilah disusun undang-undang dengan tata pemerintahan yang disebut adat mahkota alam. Adapun ***Susunan pemerintahan Aceh terdiri dari*** Kesultanan Aceh dibagi menjadi 3 wilayah Sagi dan wilayah pusat kerajaan. Tiap-tiap Sagi terdiri dari sejumlah mukim. Tiga Sagi di Aceh disebut Sagi XXV mukim. Tiap-tiap Sagi dikepalai seorang Panglima Sagi atau Hulubalang Besar. Setiap distrik atau mukim dikepalai seorang Hulubalang yang memiliki kekuasaan otonom. Tiap mukim terdiri dari beberapa Gampong yang masing-masing dikepalai seorang Keuci. Gampong dibagi menjadi wilayah yang lebih kecil lagi yang memiliki tempat ibadah sendiri yang dikepalai seorang Meusanah.

Adapun ***System pergantian tahta*** Apabila raja meninggal maka anak laki-laki raja yang lahir dari isteri pertama. Apabila tidak ada maka diambilkan dari putra laki-laki lain. Jika tidak ada laki-laki, putrid pun bisa memangku jabatan raja (sultanah). Jika raja pengganti belum dewasa maka ibu atau paman dapat memegang tali kendali pemerintahan.

Hal yang sama juga terjadi di Palembang. Pada masa ***kerajaan Sriwijaya*** dikenal istilah "datu" untuk menyebut raja dan kerajaannya disebut dengan

“kedatuan” atau “kadatuan”, seperti yang tertera pada prasasti-prasasti dari abad ke-7 Masehi. Sementara gelar untuk raja pada masa pengaruh Islam ketika zaman kesultanan Palembang Darussalam yaitu *“Ki Gede”, “panembahan”, “sultan” dan “susuhunan”*. Seperti telah disebutkan di atas bahwa konsep Negara dan kedudukan raja di Asia Tenggara, termasuk Indonesia tidak terlepas dari regalia atau benda-benda pusaka. Oleh karena itu konsep Negara di masa lalu lebih sering dikaitkan dengan kuasa, pengaruh, wibawa dan ketokohan seorang raja yang lebih dekat dengan istilah *kingdom*. Hal ini berbeda dengan konsep Negara modern yang bermakna teritori (Wan The, 1999: xx). Untuk kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk menyelusuri proses penggantian raja-raja dan sultan di Palembang dapat dilihat dalam buku *“Het Sultanaat Palembang”* yang disusun oleh Woelders berdasarkan beberapa naskah yang disimpan di Leiden Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1, TR- 3 dan Teks KI-4 (Woelders, 1975).

Selain itu Sultan mempunyai seorang penasehat Agama dan seorang sekretaris. Juga didampingi pelaksana pemerintahan sehari-hari sebagai pelaksana harian dan didampingi oleh Kepala Pemerintahan setempat sebagai Kepala Daerah. Tiga orang sebagai anggota Dewan Menteri terdiri dari pangeran Natadiraja, pangeran Wiradinata dan pangeran Penghulu Nata Agama yang mengatur tentang seluruh permasalahan Agama Islam. Ini terjadi pada masa Pangeran Ario Kusumo Kemas Hindi ditahun 1666, ia memproklamkan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam dan beliau dilantik sebagai sultan oleh Badan Musyawarah Kepala-kepala Negeri Palembang dengan gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam serta mendapat legalitas pula dari Kerajaan Istanbul (Turki Usmani).

Namun dari naskah-naskah lama yang disusun oleh Woelders tampak juga adanya perbedaan, utamanya dalam masa kekuasaan para raja dan sultan saat memerintah. Meskipun demikian, naskah-naskah itu semuanya mencantumkan nama Ki Gede Ing Sura sebagai penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi tidak selalu sama. Teks UBL - 6 (*Kitab Toeroenan Radja-radja di dalam negeri Palembang*), misalnya

menyebutkan bahwa genealogi raja-raja Palembang dimulai dari Sayyidina Husin. Perbedaan lama kekuasaan atau tahun masa kekuasaan para raja dan sultan yang memerintah, tentunya dapat dikaitkan dengan masa penulisan naskah-naskah tersebut yang semuanya berasal dari setelah kesultanan Palembang dihapuskan. Teks UBL 4 - 6 ditulis pada tahun 1851; sementara teks UBL - 7 ditulis antara tahun 1863 - 1880 (Woelders, 1975).

Heine Geldern juga mengemukakan bahwa pada kerajaan yang bertradisi Hindu-Budha terdapat anggapan struktur kerajaan sebagai mikrokosmos dengan alam semesta sebagai makrokosmos (Geldern 1982). Karena itu dalam hubungan kerajaan sebagai pusat dengan segala unsur di sekitarnya disesuaikan dengan susunan alam. Konsep tersebut tidak menjadi hilang pada saat kesatuan politik yang ada di nusantara dipengaruhi oleh budaya Islam, yang kemudian dikenal dengan istilah “kesultanan”. Meskipun demikian tidak berarti semua kesatuan politik yang pernah hidup di Indonesia di masa lalu menggunakan istilah tersebut, tetapi tetap dalam bentuk “kerajaan”.

Bahkan pada masa berlangsungnya kedua istilah tersebut tidak pernah dikenal, baik dalam tradisi tulis maupun lisan. Pada masa itu lebih dikenal istilah “Nagara” atau “negeri”. Di nusantara tidak dikenal istilah Negara di masa lalu, begitupun juga dengan istilah “kerajaan” pada masa pengaruh Hindu-Budha atau “kesultanan” pada masa pengaruh Islam. Istilah-istilah tersebut baru muncul di kemudian hari untuk menunjukkan adanya lembaga pemerintahan (kesatuan politik) yang pernah ada di Indonesia. Masyarakat tradisional lebih mengenal pimpinan (kepala suku) mereka yang dipilih secara demokratis, tanpa proses pewarisan seperti halnya lembaga kerajaan atau kesultanan yang baru dikenal setelah terjadi kontak budaya dengan dunia luar.

Dalam naskah-naskah kuna yang ditemukan hampir di seluruh nusantara untuk menyebut suatu kesatuan politik digunakan istilah “negeri”. Hal ini juga terjadi di Palembang. Penggunaan istilah kerajaan atau kesultanan Palembang tidak pernah ditemukan dalam karya sastra tradisional Melayu Palembang. Istilah negeri dalam karya sastra Melayu baru mulai dipakai sejak abad ke-14 Masehi, yaitu dalam Hikayat Muhammad Hanafiyah. Istilah “negeri” juga

ditemui beberapa kali dalam Hikayat Raja Pasai yang disusun sekitar abad ke-14 Masehi atau pada awal abad ke-15 Masehi (Perret, 1999: 1). Namun demikian, penggunaan istilah “negeri” sejak 500 tahun yang lalu membuktikan bahwa konsep ini telah terbentuk dalam masyarakat Melayu. Dengan mengacu pada naskah-naskah Melayu yang berjumlah 32 buah,

Daniel Perret sampai pada suatu kesimpulan bahwa konsep “negeri” berasal dari bahasa Sanskerta *nāgara* yang sudah mulai digunakan pada prasasti Purnawarman pada abad ke-5 Masehi. Hanya saja istilah *nagara* tidak digunakan dalam prasasti-prasasti Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi dan prasasti-prasasti Jawa antara abad ke-8 sampai dengan 13 Masehi. Di Jawa istilah ini baru muncul pada masa pemerintahan raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Istilah *nagara* dan *nagari* disebut dalam Kitab Negarakrtagama dari tahun 1365 Masehi (*Ibid.*).

Kekuasaan yang pernah ada dalam sistem pemerintahan Palembang diantaranya Kerajaan Sriwijaya yang menjadikan Palembang sebagai pusat pemerintahan berbasis pada maritim. Kerajaan Sriwijaya runtuh selanjutnya berdiri Kerajaan Palembang yang kemudian digantikan dengan Kesultanan Palembang Darussalam ketika Islam mulai berkembang di wilayah Palembang.

Sistem pemerintahan dan pengaturan masyarakat serta pelaksanaan hukum tidak banyak mengalami perubahan ketika Palembang berada di bawah sistem kesultanan. Hubungan para penguasa dengan sulthan bersifat *seba atau suatu kunjungan penguasa suatu daerah kepada sulthan dalam kurun waktu tertentu membawa barang-barang berharga* kepada sulthan yang berkuasa. Perubahan sistem kekuasaan baru berubah ketika Belanda menguasai wilayah Palembang pada tahun 1817 (Poesponogoro:1975)

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam didasarkan pada prinsip tradisional, yaitu adanya hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Artinya, sultan adalah orang yang mendapat kharisma dan legitimasi, yang memiliki kekuatan diri sebagai *gusti* dan *kawula* karena mendapat wahyu dari Tuhan. Sedangkan struktur pemerintahannya berbentuk feodalisme, yaitu sultan berperan sebagai pemimpin, priyayi pembantu perantara kekuasaan, dan juga sekaligus sebagai rakyat atau abdi kesultanan.

Wewenang pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh sultan yang bertindak sebagai kepala eksekutif sekaligus kepala keagamaan, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam melaksanakan tugas harian pemerintahan, sultan dibantu oleh tiga orang eksekutif. *Pertama*, Pangeran Penghulu Nataagama yang bertugas dalam urusan keagamaan dan syariat Islam. *Kedua*, Pangeran Natadirajo, yaitu pembantu sultan dalam bidang pelaksanaan kebijaksanaan, hukum, dan ekonomi atau keuangan di ibukota dan mancanegara. Pangeran Natadirajo dibantu oleh Pangeran Citra sebagai hulubalang yang juga bertindak sebagai aparat keamanan. *Ketiga*, Syahbandar¹⁵, yaitu pembantu sultan yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah perdagangan dan urusan luar negeri, seperti memungut bea dan cukai bagi kesultanan dan sultan, serta melaksanakan dan menjaga hukum laut Melayu .(Retno, 2002: 119).

Pemerintahan tersusun dengan adanya pembagian menurut wilayah dan hukum, yaitu ibukota kesultanan yang berupa keraton dan mancanegara yang berupa lingkungan di luar wilayah ibukota kesultanan. Pembagian wilayah mancanegara tidak didasarkan atas pertimbangan teritorial, namun lebih disebabkan karena faktor kegunaan atau manfaat wilayah tersebut. Atas dasar itulah, maka muncul wilayah-wilayah sebagaimana berikut:

- a) Sindang, yaitu wilayah yang dimanfaatkan sebagai batas Kesultanan Palembang agar warganya dapat mempertahankan daerahnya dari serangan dari luar. Warga di wilayah ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau pungutan tertentu.
- b) Sikep, yaitu dusun atau marga yang secara khusus menjadi tanggung jawab golongan priyayi yang disebut dengan “jenang”. Hanya saja, kekuasaannya sebatas masa jabatannya saja. Sebagai golongan rakyat,

¹⁵ Menurut Manarfa (1948:7) jabatan *kapita[lao]* dan *sabandara (syahbandar)* termasuk *pangka*, sedangkan Van den Berg (1939) dan Zahari (1977) berpendapat sebaliknya. Seorang *syahbandar* membawahi sekitar 20-40 *jurubahasa* (Schoorl 2003:126 [#8]). Salah seorang *syahbandar* Pelabuhan (Lihat Suryadi 2007:176). Jabatan *syahbandar* amat penting karena peran Buton sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal dagang lokal dan asing yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di bagian barat Nusantara (misalnya Surabaya dan Batavia) ke wilayah bagian timurnya (seperti Ternate dan Ambon). Di samping itu, jabatan ini penting, juga karena sumber nafkah orang Buton adalah perdagangan dan pelayaran dengan kepintaran yang cukup tinggi dalam membuat perahu dagang (Ligvoet 1878:9). Namun, seperti di beberapa kerajaan lokal lainnya di Nusantara, jabatan *syahbandar* Buton juga termasuk kursi “basah” dan sarat dengan penyelewengan (Schoorl 2003:103).

pihak petani bisa diperkenankan untuk membuka tanah (*sikep*), namun harus membayar pajak atas tanah dan hasil pertanian. Meskipun demikian, baik golongan priyayi maupun rakyat petani, mereka sama-sama tidak berhak mewariskan jabatan dan tanahnya.

- c) Daerah yang dikuasai langsung oleh sultan atau disebut dengan "*pungutan*". Pajak tidak berlaku di wilayah ini, namun yang berlaku adalah "*siban*" dan "*tukon*", yaitu semacam monopoli komoditi oleh sultan yang dijual kepada rakyat. Dikatakan sebagai bentuk monopoli karena memang harganya lebih tinggi dari pasaran di ibukota kesultanan. Dalam pajak model *tiban*, yang dibayarkan adalah hasil bumi, sedangkan dalam *tukon* adalah berupa uang. Dengan kata lain, *pungutan* tersebut sebagai ganti pajak terhadap rakyat yang menempati daerah ini. (Djohan Hanafiah, 1991, Amin, 1986).

Pada masa Kesultanan Palembang lama, pernah terkenal suatu lembaga elit yang disebut dengan istilah "*Fexo*" atau saudagar raja Melayu (I.J. van Sevenhoven, 1971: 42-45, Blusse, 1987:74). Kriteria orang yang masuk dalam lembaga ini adalah orang yang kaya (hartanya). Lembaga ini biasanya menempati posisi sebagai wakil sultan, seperti sebagai pembesar keraton atau sebagai pemimpin di beberapa distrik kesultanan. Proses penempatannya biasanya ditentukan atas dasar kemampuan yang dimilikinya. Lembaga ini merupakan sumber keuangan bagi sultan sehingga orang-orang yang termasuk dalam *fexo* mendapat kepercayaan dan kasih sayang dari sultan. Struktur sosial dan budaya penduduk dalam pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam terbagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Priyayi. Golongan ini merupakan turunan raja-raja (sultan-sultan) atau kaum ningrat. Kedudukan ini biasanya diperoleh atas dasar keturunan atau atas perkenan dari sultan sendiri.
- 2) Rakyat. Golongan ini terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok "*miji*" atau di daerah pedalaman disebut dengan istilah "*mata-gawe*", yang mencakup seperti petani dan sebagainya. Kelompok ini biasanya

menggalang orang-orang yang mau berperang bersama sultan atau melakukan pekerjaan tangan dan karya-karya seni. Setiap *miji* mempunyai sejumlah “*alingan*” (keluarga), yang tugasnya adalah membantu pekerjaan *miji*. *Kedua*, kelompok “*senan*”, yaitu golongan rakyat yang lebih rendah dari *miji*, namun memiliki keistimewaan tersendiri. Maksudnya, kelompok ini tidak boleh dipekerjakan oleh siapapun kecuali hanya untuk sultan, misalnya membuat atau memperbaiki perahu-perahu dan rumah-rumah sultan atau mendayung perahu untuknya. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam runtuh, banyak hal yang mulai luntur seiring perkembangan zaman. Misalnya, corak Kota Palembang yang dulunya lebih bernuansa Islam kini sudah tidak kentara lagi. Di samping itu, kota ini mengalami perubahan yang cukup pesat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebab, banyak penduduk dari berbagai daerah di Sumatra Selatan yang datang ke Palembang untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Perbedaan karakteristik lingkungan fisik Palembang ini lazimnya disebut daerah iliran dan uluan yang dipergunakan untuk membedakan antara kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi di sekitar aliran sungai-sungai yang banyak mendominasi daerah Karesidenan Palembang. Istilah iliran dan uluan tidak hanya membedakan kondisi geografis saja, melainkan juga menyangkut beberapa khas lainnya, seperti tercermin baik dalam sosio-ekonomi maupun kultur politiknya. Dasar pemisahan antara kedua kawasan itu pada prinsipnya berdasarkan pada tradisi adat setempat, yang dapat diartikan sebagai aturan-aturan normatif yang menentukan bentuk perilaku individu dan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup mereka selaku anggota masyarakat. Adat juga merupakan kunci mekanisme sosial yang dipelihara bersama secara turun-temurun. Kedua istilah iliran dan uluan ini jelas terlihat dalam sistem ketatanegaraan dalam zaman kesultanan, yang membedakan kawasan ini sebagai daerah Kepungutan dan Sindang.

Secara etimologi daerah Kepungutan berasal dari kata pungut, mengacu kepada daerah iliran, di daerah sultan dan para pembesar kesultanan berkuasa secara langsung serta berhak menyelenggarakan bermacam jenis pungutan baik berupa pajak maupun tenaga kerja terhadap rakyatnya. Daerah Kepungutan yang berpusat di kota Palembang merupakan suatu tipe masyarakat perairan sungai dan lebih berorientasi pada perdagangan, yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan daerah uluan. Kasultanan Palembang berpusat di kota Palembang, sekaligus merupakan bandar pelabuhan sehingga tidak mengherankan jika masyarakatnya sangat heterogen. Berbagai kelompok etnik asing seperti Cina, Arab, dan Eropa turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membedakan antara kawasan iliran dan uluan. Bentuk kemakmuran kesultanan juga berupa berkembangnya bidang kesenian dan kesusasteraan pada saat itu. Dalam kurun waktu 1750-1800, Kesultanan Palembang Darussalam pernah menjadi pusat sastra Melayu setelah Kesultanan Aceh yang menjadi pusat kesusasteraan sebelumnya mengalami masa stagnasi.

Pada masa kepemimpinan Prabu Anom, Kesultanan Palembang Darussalam berada di bawah kontrol kekuasaan Belanda. Pada tahun 1823, ia melakukan pemberontakan kepada Belanda karena kontrak yang dibuat pihak kolonial sangat merugikan kedudukannya sebagai sultan. Pada tahun ini pula ia sudah tidak lagi memimpin kesultanan karena dipecat oleh Belanda dan pada tahun 1925 ia baru bisa ditangkap yang menyebabkan dirinya dibuang ke Manado. Pemerintah Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1925.

Pemerintah Belanda sebenarnya berharap bahwa Kesultanan Palembang Darussalam masih tetap eksis. Berdasarkan pengakuan dari keluarga keturunan Sultan Badaruddin II di Ternate yang diteliti oleh seorang budayawan, Djohan Hanafiah, pihak Belanda pernah menawarkan kepada Sultan Badaruddin II agar mau memimpin kembali. Namun, Sultan Badaruddin II menolak secara tegas. Alasannya, ia tidak ingin terjadi perpecahan. Ia pun berpesan agar sebaiknya Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan saja.

BAB III
TRADISI MELAYU ISLAM DALAM PELEMBAGAAN KEKUASAAN SULTAN
DI KESULTANAN PALEMBANG

A. ARTI NAMA PALEMBANG DAN GEORAFISNYA

1. Makna Nama Palembang

Nama Palembang banyak mempunyai arti. Pengertian yang mendekati kenyataan adalah apa yang diterjemahkan oleh R.J.Wilkinson dalam kamusnya 'A Malay English Dictionary' (Singapore, 1903): lembang adalah tanah yang berlekuk, tanah yang rendah, akar yang membengkak karena terendam lama di dalam air. Menurut *Kamus Dewan* (karya Dr. T.Iskandar, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), lembang berarti lembah, tanah lekuk, tanah yang rendah. Untuk arti lain dari lembang adalah tidak tersusun rapi, terserak-serak. Sedangkan menurut *bahasa Melayu*, lembang berarti air yang merembes atau rembesan air. Arti **Pa** atau **Pe** menunjukkan keadaan atau tempat. Menurut I.J. van Sevenhoven (1971: 12), Palembang berarti tempat tanah yang dihanyutkan ke tepi, sedangkan *Stuerler* menerjemahkan Palembang sebagai tanah yang terdampar. Pengertian Palembang tersebut kesemuanya menunjukkan tanah yang berair. Ini tidak jauh dari kenyataan yang ada, bahkan pada saat sekarang, yang dibuktikan oleh data statistik tahun 1990, bahwa masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang di kota Palembang. Sebagai catatan tambahan, di Kotamadya sekarang ini masih tercatat sebanyak 117 buah anak-anak sungai yang mengalir di tengah kota. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya.

Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkauan dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah:

- Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu : Pegunungan Bukit Barisan
- Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah

- Daerah pesisir timur laut

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Kapan nama **Palembang** “lahir” tepatnya belum dapat diperkirakan. Apakah nama ini lahir sejak Sriwijaya runtuh atau sebaliknya nama Palembang lahir lebih dahulu sebelum nama Sriwijaya “lahir”. Dari sumber Cina, yaitu kronik *Chu-fan-chi*, karya *Chau Ju-kua* tahun 1225, disebutkan nama **Pa-lin-fong (Palembang)**, adalah salah satu bawahan *San-fo-tsi*. *Wang Ta-yuan* dalam catatan perjalanannya *Tao-i chih-lio* (1349-1350), membedakan antara *San-fo-tsi* dengan *Ku-kang (Kiu-Kiang)*, yaitu dua buah nama dan tempat yang berbeda. Namun menurut Slamet Muljana (2007:10)

San-fo-tsi adalah bekas kerajaan di tahun 1339 yang kemudian melahirkan tiga kerajaan yakni Dharmacraya (Jambi), Palembang, dan Minangkabau (pagaruyun). Sebelum kedatangan Adityawarman , hanya ada dua kerajaan yakni Dharmacraya dan Palembang kelanjutan dari kerajaan Lama Melayu dan Sriwijaya. . Yang dimaksud dengan Kerajaan *San-fo-tsi* adalah Palembang itu sendiri bekas dari kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1374 datang utusan Manaha Po-Lin-Pang menghadap Kaisar Ming memohon surat pengakuan dan bantuan bala tentara. (*ibid*). Namun dalam tahun yang sama *San-fo-tsi*, ditaklukan oleh kerajaan Jawa (Majapahit) untuk penghabisan kalinya, kemudian nama *San-fo-tsi*, diganti dengan *Chiu-chiang* artinya pelabuhan lama dan sungai lama.

Menurut Ma-huan dalam *Ying-yai-Sheng-lan* ditulis tahun 1416, menyatakan bahwa *Ku-kang* adalah negeri yang dahulunya disebut *San-fo-tsi (San-bo-tsai)*. Dari kronik-kronik Cina, sebagian mengatakan bahwa pengertian *San-fo-tsi* dapat berarti Palembang dan juga Jambi. *J.L.Moens* mempertegas bahwa yang disebut kerajaan *San-fo-tsi* bukan hanya satu kerajaan saja, dia menyarankan bahwa ahli sejarah harus membedakan “*San-fo-tsi Palembang*” dan “*San-fo-tsi Melayu*”. Sayangnya *J.L. Moens* tidak tuntas menyelesaikannya. Uka menandakan bahwa berita Tionghoa tentang musafir Budhhis I-tsing dalam perjalananya ke India dan kembalinya singgah di *Shih-li fo shih* atau *San-fo-tsi* atau *Fo-shih* yang

oleh G.Coedes diidentifikasi dengan Sriwijaya seperti dikenali dalam prassasti tertua Kedatuan Sriwijaya yang terdapat di Kedukan Bukit yang menyebutkan Dapunta Hyang dengan tentaranya membuat kota (Marwuot wanua). Sriwijaya pada tanggal 5 Asada 604 Saka (16 Juni 682 Masehi). Kota inilah yang kemudian dianggap sebagai kota Palembang saat ini. (Uka, 2006: catatan seminar Laksmana Chengho di Palembang Hotel Royal Asia).

Menurut A. Dahana salah satu kesukaran yang dihadapi dalam membaca buku tulisan Ma Huan adalah dalam mencocokkan nama-nama wilayah ejaan bahasa Tionghoa kuno dengan nama sebenarnya. Khusus untuk Palembang nama-nama yang berhasil diungkapkan adalah San Fo Ji (mengacu pada Sriwijaya), Pa Li Fong, Po Lin Bang atau Jiu Jiang (pelabuhan lama atau sungai lama) (A. Dahana, 2006: 6 Agustus).

Banyak penulis sejarah berpendapat kekeliruan penulisan Cina karena San-fo-tsi (Suarnabhumi atau Pulau Emas) dengan hanya menyebutkan nama pulau saja, tidak mendetil dengan nama-nama kerajaan di bagian pulau tersebut. Nama Palembang pada zaman klasik, selain dalam catatan kronik Cina, juga tertulis dalam *Nagarakertagama* karangan Prapanca pada tahun 1365.

Di dalam *Pupuh XIII* disebutkan negara-negara bawahan Majapahit di daerah Melayu adalah; Jambi, Palembang, Dharmasraya, Toba dan seterusnya. Setelah zaman Islam nama Palembang menjadi populer dengan dimuatnya di dalam *Babad Tanah Jawi* (1680) dan *Sejarah Melayu* (1612). Sejarah Melayu aslinya ditulis sekitar tahun 1511, ditulis kembali dari pelbagai versi, antaranya oleh Abdullah ibn Abdulkadir Munsyi yang menulis kembali teks tahun 1612. Teks yang menceritakan Palembang dari Sejarah Melayu:

Ada sebuah negeri di tanah Andalas, Perlembang namanya, Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak-cucu Raja Sulan; Muara Tatang nama sungainya. Adapun negeri Perlembang itu, Palembang yang ada sekarang inilah. Maka Muara Tatang itu ada sebuah sungai, Melayu namanya; di dalam sungai itu ada sebuah bukit Seguntang Mahameru namanya.

Palembang sebagaimana fakta sejarah diatas adalah Palembang yang georafisnya meliputi Batanghari Sembilan dan Negeri Luar. Daerah Batanghari

Sembilan adalah daerah sembilan sungai utama yang bermuara di sungai Musi masing-masing yaitu (1) Sungai Banyuasin (2) Sungai Kikim (3) Sungai Kelingi (4) Sungai Lakitan (5) Sungai Lintang (6) Sungai Rawas (7) Sungai Lematang (8) Sungai Ogan dan (9) Sungai Komering, sedangkan yang dimaksud dengan negeri luar adalah (1) Kepulauan Bangka dan (2) Kepulauan Belitung. (Rahim 1998: 11) .Hal ini dipertegas dan dibuktikan ketika masa kolonial Belanda yang membagi wilayah Palembang menjadi Dua Keresidenan (1). Keresidenan Palembang yang wilayahnya meliputi Prop. Sumsel saat ini, (2). Keresidenan Bangka Belitung yang wilayahnya meliputi Propinsi Babel saat ini.

2. Keadaan Georafis Palembang

Palembang pada tahun 1553-1814 merupakan ibukota Kesultanan Palembang. Kemudian pada masa kolonial Belanda menjadi ibukota Residensi Palembang. Residensi Palembang ini merupakan salah satu dari tiga residensi yang terdapat di Sumatera Bagian Selatan. Luas Karesidenan Palembang kurang lebih 84.692 km². Daerah Palembang sebagian besar dataran rendah tempat mengalirnya Sungai Musi beserta anak cabangnya. Keterikatan penduduk dengan lalu lintas di perairan Sungai Musi yang padat dengan perahu-perahu dayung dan kapal-kapal yang datang pergi, membawa kota Palembang dijuluki sebagai Venesia van Indie (Sevenhoven : 1971: 22-30) .

Satu segi yang paling esensial yang tak dapat diragukan dalam mengulas lingkungan alam Palembang adalah ketergantungan penduduk setempat terhadap lalu lintas perairan sungai. Sungai Musi merupakan sungai terbesar di daerah ini yang membelah dua kota Palembang menjadi dua. Ciri daerah aliran sungai, bukanlah khusus untuk kota Palembang saja, melainkan untuk Sumatera Selatan umumnya. Sebutan lain untuk daerah ini adalah Batanghari Sembilan, suatu istilah "tradisional" untuk menyebut sembilan buah sungai besar yang merupakan anak Sungai Musi, yakni : Klingi, Bliti, Lakitan, Rawa, Rupit, Batang, Leko, Ogan, dan Komering. Bagian barat Palembang merupakan daerah berbukit yang memanjang hingga kaki Bukit Barisan, khususnya yang terletak antara hulu Sungai Rawas di bagian utara dann Sungai Komering di bagian selatan dengan pusat Dataran Tinggi Gunung Dempo.

Dataran tinggi ini terletak 3159 m diatas permukaan air laut, merupakan hulu dari sungai-sungai Batanghari Sembilan. Dataran Tinggi Pasemah terletak antara hulu Sungai Lintang dan Lematang lebih dekat ke kaki Gunung Dempo. Di bagian selatan terdapat Dataran Tinggi Semendo dan Dataran Tinggi Ranau, yang merupakan rangkaian Bukit Barisan yang menjorok ke timur dan berbatasan dengan Lampung di ujung selatan. Di daerah ini terletak Gunung Seminung (1964 m) dengan Danau Ranau di bagian kaki gunung yang berada pada ketinggian 500-700 m.

Dataran tinggi ini merupakan hulu Sungai Ogan dan Komering yang mengalir ke dataran rendah. Berbeda dengan kawasan dataran tinggi, dataran rendah mencapai luas sekitar 71.000 km² (83 %) dari luas keseluruhan Palembang. Sebagian besar merupakan kawasan hutan basah berpaya-paya dan hampir sepanjang tahun dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Curah hujan cukup tinggi sekitar 2.500-3.600 mm. Akibatnya genangan air dalam hutan berpaya-paya mempengaruhi struktur tanah. Jenis tanahnya banyak mengandung asam, rapuh, dan berwarna kemerahan. Proporsi energi mineral cukup besar yang dapat menjadi sumber ekonomi tambang yang sangat potensial bagi Palembang (Anonim : 1984: 12).

Ciri karakteristik lingkungan alam di sekitar kawasan dataran rendah ini adalah terbentuknya kantong-kantong lahan tertentu yang secara alami terbentuk karena aliran-aliran sungai. Jenis tanahnya pematang, lebak, rawa, dan talang dengan masing-masing sifatnya menghasilkan pola pertanian khas dataran rendah aliran sungai. Pada awal abad ke-20 penduduk Palembang tercatat 684.710 jiwa. Dibandingkan dengan luas tanahnya, keadaan penduduk ini menyajikan proporsi perbandingan yang sangat tidak seimbang. Pada saat yang sama penduduk Jawa dan Madura sekitar 30 juta jiwa. Perbedaan karakteristik lingkungan fisik Palembang ini lazimnya disebut daerah iliran dan uluan yang dipergunakan untuk membedakan antara kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi di sekitar aliran sungai-sungai yang banyak mendominasi daerah Karesidenan Palembang (Suparlan , 2001: 10 Desember).

Istilah iliran dan uluan tidak hanya membedakan kondisi geografis saja, melainkan juga menyangkut beberapa khas lainnya, seperti tercermin baik dalam sosio-ekonomi maupun kultur politiknya. Dasar pemisahan antara kedua kawasan itu pada prinsipnya berdasarkan pada tradisi adat setempat, yang dapat diartikan sebagai atura-aturan normatif yang menentukan bentuk perilaku individu dan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup mereka selaku anggota masyarakat. Adat juga merupakan kunci mekanisme sosial yang dipelihara bersama secara turun-temurun.

Kedua istilah iliran dan uluan ini jelas terlihat dalam sistem ketatanegaraan dalam zaman kesultanan, yang membedakan kawasan ini sebagai daerah Kepungutan dan Sindang. Secara etimologi daerah Kepungutan berasal dari kata pungut, mengacu kepada daerah iliran, di daerah sultan dan para pembesar kesultanan berkuasa secara langsung serta berhak menyelenggarakan bermacam jenis pungutan baik berupa pajak maupun tenaga kerja terhadap rakyatnya. Daerah Kepungutan yang berpusat di kota Palembang merupakan suatu tipe masyarakat perairan sungai dan lebih berorientasi pada perdagangan, yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan daerah uluan. Kasultanan Palembang berpusat di kota Palembang, sekaligus merupakan bandar pelabuhan sehingga tidak mengherankan jika masyarakatnya sangat heterogen. Berbagai kelompok etnik asing seperti Cina, Arab, dan Eropa turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membedakan antara kawasan iliran dan uluan.

B. SEJARAH KERAJAAN PALEMBANG

Sejarah berdirinya kerajaan Palembang tidak terlepas dari runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-12. Kerajaan Sriwijaya runtuh akibat dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit. Ketika Sriwijaya runtuh sebagai pusat niaga, maka lahirlah suatu daerah atau kota yang dalam ejaan China disebut dengan sebutan *Palinfong* (yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kota Palembang). Sepeninggalan Sriwijaya, kota ini tetap eksis sebagai kota niaga yang di dalamnya masih terdapat suatu tumpuan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang masih dikenal sebagai *Ku-kang* (dalam bahasa China) atau Pelabuhan

Lama. Kota Palembang menjadi tumpuan pelabuhan internasional yang secara khusus banyak disinggahi pedagang-pedagang dari China. Bahkan, kota ini pernah menjadi *enclave* (daerah kantong) China selama kurang lebih 200 tahun. Ketika Kota Palembang berada dalam kontrol ekonomi para pedagang China, Pangeran Palembang, Parameswara, terpaksa meninggalkan kota ini pada tahun 1397. Hal ini menunjukkan sudah ada hubungan dagang meskipun hubungan tersebut tidak dalam bentuk kerja sama yang adil (A. Khalik R. Muhibat, 2007: 6, Slamet Mulyana, 2007: 9-11)

Sesudah tahun Saka 1400 atau tahun masehi 1478, Majapahit jth dalam kekuasaan Panembahan Jinbun alias Raden Fatah, Sulthan Demak , periode sesudah tahun 1478 merupakan post period kerajaan Majapahit sebagai negara bawahan kesulthanan Demak, dalam masa tersebut ada dua nama penguasa Majapahit yang diangkat untuk menjadi penguasa Majapahit oleh Raden Fatah (Panembahan Jimbun) yakni Orang Tionghoa yang bernama Njoo Lay Wa masa kekuasaannya hanya 8 tahun Njoo Lay Wa mati terbunuh dalam satu pemberontakan tahun 1486 (Slamet Mulyana 2007 : 29). Selanjutnya Raden Fatah mengangkat Dyah Ranawijaya (*Abhiseka Giridrawardhana*) keturunan Raja Singawardhana dan menantu raja Kertabumi.yang memerintah sampai tahun 1527.(*ibid*).

Raden Fatah sendiri (Penembahan Jinbun) adalah peranakan Tionghoa, putra raja Kertabumi,lahir dari putri China, Jinbun sendiri diasuh oleh Arya Damar alias Jaka Dilah alias Swan Liong, Kapten China yang menetap di Kerajaan Palembang, putra raja Wikramawardhana yang lahir dari putri China. Arya Damar sendiri diangkat oleh Prabu Brawijaya menjadi Menteri di Majapahit, selanjutnya diangkat menjadi raja bawahan Majapahit di Palembang melalui pelabuhan Gresik.(*ibid*).

Dalam Babad Tanah Jawi diceritakan bahwa Jaka Dilah alias Arya Damar alias *Swan Liong* dari tahun 1433-1447 menjadi raja bawahan Majapahit di Palembang, penempatan Arya Damar pada waktu itu, jatuh dalam masa pemerintahan Rani Suhita, putri Wikramawardhana yang lahir dari Kusumawardhani.Jadi yang menempatkan Arya Damar di Palembang sesungguhnya Rani Suhita saudara sepapak dari Arya Damar sendiri (Slamet Mulyana, 2007 : 88). Kronik Kelenteng Semarang menceritakan bahwa Arya Damar alias Swan Liong pada tahun 1443, oleh Gan Eng Chu sebagai Kapten China di Palembang pindahan dari Semarang. Arya Damar ketika di Palembang merangka dua

jabatan penting yakni Raja bawahan Majapahit Di Palembang masa post period dan juga Kapten China di Palembang.

Ketika Islam sudah menguat di Demak dan pengaruh Majapahit mulai melemah Arya Damar memintah kepada Raden Fatah untuk naik tahta di Kerajaan Palembang mengantikan dirinya , dan Raden Kusen (putra Arya Damar) menjadi Patih Kerajaan Palembang. Namun keduanya menolak selanjutnya berlayar menuju pantai Timur Jawa (Surabaya) dan berguru pada Sunan Ampel (*ibid*). Pada saat itu, Kerajaan Majapahit juga tidak bisa menempatkan adipatinya di kota ini karena China telah memilih Liang Tau Ming sebagai pemimpin Palembang. Sayangnya, pada masa kekuasaan China, Palembang pernah menjadi sarang para bajak laut China yang menyebabkan permasalahan akut di kota ini. Kerajaan Palembang berdiri sekitar abad ke-15 (Uka , 2006: 7-16) . Ario Damar merupakan pendiri kerajaan ini.

Ia sebenarnya mewakili Kerajaan Majapahit di *Palembang Lamo* (atau nantinya disebut Kerajaan Palembang), dengan gelar Adipati Ario Damar yang berkuasa antara tahun 1455 hingga tahun 1486. Ketika ia datang ke Palembang, rakyat dan penduduk di daerah ini sebenarnya sudah masuk Islam. Diperkirakan, ia akhirnya ikut memeluk Islam dengan mengubah namanya menjadi Ario Abdillah atau Ario Dillah (dalam bahasa Jawa, *dillah* berarti lampu) (Slamet Mulyana : 2007 : 27-33)

Ario Dillah pernah mendapat hadiah dari Prabu Kertabumi Brawijaya V, yaitu diberikan salah seorang selirnya yang berketurunan China dan telah memeluk Islam, yang bernama Puteri Champa. Ketika dibawa ke Palembang, Puteri Champa tengah mengandung. Lahirlah kemudian seseorang bernama Raden Fatah di istana Ario Dillah yang dulu dinamakan *Candi Ing Laras*. Raden Fatah kemudian dididik oleh Ario Dillah dengan pengetahuan Islam yang kemudian mengantarkan dirinya sebagai ulama besar. Anak kandung Ario Dillah sendiri yang merupakan hasil perkawinan dengan Puteri Champa adalah Raden Kusen. Jadi, Raden Fatah adalah saudara lain bapak dengan Raden Kusen. Setelah Ario Dillah wafat, kekuasaan. (Retno, 2005: 11) ¹⁶.

¹⁶ Kerajaan Palembang sempat kosong hingga tahun 1486. Hal itu terjadi karena Palembang termasuk dalam kekuasaan Majapahit. Banyak keturunan Ario Dillah, termasuk Raden Fatah yang kemudian hijrah ke Demak. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana kemudian eksistensi Kerajaan Palembang kembali berdiri setelah Kerajaan Demak hancur. Tidak ada sumber tertulis resmi yang dapat menyebutkan kapan Kerajaan Majapahit hancur. Majapahit diperkirakan runtuh pada tahun 1478 akibat serangan kerajaan-kerajaan Islam

Pada saat itu, Sunan Ampel menunjuk Raden Fatah sebagai penguasa seluruh tanah Jawa. Pusat kekuasaan kemudian dipindahkan ke Demak. Pada tahun 1481, Raden Fatah mendirikan Kerajaan Islam Demak. Pendirian kerajaan tersebut juga mendapat bantuan dari daerah-daerah lainnya yang telah lepas dari Majapahit, seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. (Woelders, 1975 : 33-45).

Kerajaan Demak pernah menjadi pusat niaga pada abad ke-15. Raden Fatah mendapat gelar Senapati Jimbun Ngabdu'r-Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panata'Gama. Ia wafat pada tahun 1518, dan digantikan puteranya, yaitu Pati-Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Setelah Pangeran Sabrang Lor wafat pada tahun 1521, tahta kekuasaan kemudian dipegang oleh saudaranya, yaitu Pangeran Trenggono hingga tahun 1546. Setelah itu, di Kerajaan Demak terjadi perebutan kekuasaan antara saudara Pangeran Trenggono (Pangeran Seda ing Lepen) dan anaknya (Pangeran Prawata). Perebutan kekuasaan ini menyebabkan terjadi pertumpahan darah antar saudara. Pangeran Seda ing Lepen dibunuh oleh Pangeran Prawata.

Sebagai buntut dari peristiwa ini, Pangeran Prawata beserta keluarganya dibunuh oleh anak Pangeran Seda ing Lepen yang bernama Arya Penangsang atau Arya Jipang. Menantu Raden Trenggono yang bernama Pangeran Kalinyamat dari Jepara juga dibunuh. Pertumpahan tidak berhenti di sini, bahkan masih berlanjut. Pada tahun 1549, Arya Penangsang dibunuh oleh Adiwijaya yang juga seorang menantu dari Pangeran Trenggono atau terkenal dengan sebutan *Jaka Tingkir* yang ketika itu menjabat Adipati Kerajaan Pajang. Pada masa Jaka Tingkir ini, Keraton Demak dipindahkan ke Pajang akibat serangan Kerajaan Pajang. Perpindahan ini sebagai pertanda berakhirnya kekuasaan Kerajaan Demak yang berdiri sejak tahun 1481 hingga tahun 1546.

Ketika Kerajaan Pajang menyerang Demak, terdapat sekitar 24 orang keturunan Pangeran Trenggono (atau juga keturunan Raden Fatah) berhijrah ke Palembang yang dipimpin oleh Ki Gede Sedo ing Lautan. Pada tahun 1547, Ki Gede Sedo Ing Lautan menempati posisi Kerajaan Palembang yang telah lama vakum sebagai raja ke-2. Ia berkuasa hingga tahun 1552. Salah seorang *suro* (perwira) Kerajaan Demak bernama Ki Gede Ing Suro yang juga ikut dalam rombongan Ki Gede Sedo Ing Lautan kemudian menjadi raja ke-3 di Kerajaan Palembang tahun 1552-1573. (Graff dan Pigeaud, 2001: 337).

Meski sudah hijrah ke luar Jawa, ia dan para keturunannya masih memiliki ikatan ideologis dengan pusat keraton di Jawa hingga zaman Mataram. Setelah Jaka Tingkir wafat, Kerajaan Pajang kemudian dipimpin oleh Arya Pangiri. Pada masa kepemimpinannya, terjadi pergolakan politik yang amat pelik. Ia diserang oleh kekuatan massal yang terdiri dari Pangeran Benowo (putra Jaka Tingkir yang tersingkir) dan kekuatan Mataram (dipimpin Panembahan Senapati atau Senapati Mataram, putra Kyai Ageng Pemanahan atau Kyai Gede Mataram). Arya Pangiri kemudian dapat dikalahkan oleh Senapati Mataram, yang menyebabkan terjadinya pemindahan Keraton Pajang ke Mataram pada tahun 1587. Tahun ini dikenal sebagai awal berdirinya Kerajaan Mataram. Pangeran Mataram merupakan keturunan dari Raden Fatah dan Raden Trenggono.

Adanya pertalian darah inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan yang baik antara Kerajaan Palembang dan Kerajaan Mataram pada saat itu. Hubungan tersebut masih terjalin erat hingga masa kekuasaan Raja Amangkurat I (raja ke-4). Di samping itu, hubungan kedua kerajaan tersebut juga dalam bentuk kerjasama. Hingga akhir tahun 1677, Kerajaan Palembang masih setia kepada Kerajaan Mataram yang dianggap sebagai pelindungnya, terutama dari serangan Kerajaan Banten yang telah dilakukan sejak tahun 1596. Pada tahun 1610, Kerajaan Palembang pernah melakukan kontak dengan VOC. Awalnya, VOC enggan berhubungan dengan Kerajaan Palembang. Bahkan, semasa pemerintahan Pangeran Sideng Kenayan, telah dibuka Kantor Perwakilan Dagang VOC (*Factorij*) di Palembang, yaitu melalui perantara Gubernur Jendral di Batavia, Jacob Specx (1629-1632). Namun, pada tahun 1659, Keraton Kuta Gawang beserta benteng-bentengnya hancur akibat diserbu oleh VOC. (disari dari Van Leur (1960: 88-99)).

Hancurnya keraton tersebut sebagai pertanda berakhirnya eksistensi Kerajaan Palembang. Kehancuran tersebut berpengaruh pada pemindahan keraton dan pemukiman penduduk ke arah yang lebih ke hulu, yang terletak antara Sungai Rendang dan Sungai Tengkuruk. Daerah ini kemudian dikenal dengan istilah Beringin Janggut. Keraton Kuta Gawang kini berada di kompleks PT. Pusri, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dari bentuknya, keraton ini menandai adanya akulturasi kebudayaan antara budaya Jawa dan Melayu, yang kemudian disebut dengan kebudayaan Palembang. Setelah kehancuran Kerajaan Palembang, maka lahirlah Palembang yang

memiliki kepribadian sendiri dan merasakan hak kemerdekaan sendiri pula, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam.

C. SEJARAH SULTAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSALAM

Pada tahun 1659, di Palembang juga berdiri sebuah kesultanan yang memiliki corak tersendiri dan berbeda dengan Kerajaan Palembang sebelumnya, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Pendiri kesultanan ini adalah Sultan Jamaluddin atau dikenal dengan sebutan Sultan Ratu Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman, yang pada masa akhir hayatnya bergelar Sunan Cinde Walang. Kesultanan Palembang Darussalam berdiri selama hampir dua abad, yaitu sejak tahun 1659 hingga tahun 1825. Sebelum kesultanan ini berdiri sebenarnya telah ada terlebih dahulu Kerajaan Palembang yang merupakan cikal bakal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam.

Bedanya dengan Kerajaan Palembang, Kesultanan Palembang Darussalam lebih bercorak Islam karena menerapkan syariat Islam serta menjadikan al-Qur'an dan hadits sebagai konstitusi pemerintahan. Sultan Ratu Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman atau disebut dengan Sunan Cinde Walang adalah raja pertama di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia memerintah selama 45 tahun.

Dengan masa kekuasaan yang begitu panjang, ia telah meletakkan tata kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang kuat di kesultanan ini. Dalam bidang pemerintahan, ia menerapkan sistem perwakilan di daerah pedalaman atau dikenal dengan istilah *raban* dan *jenang*. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuatnya dituangkan dalam bentuk *piagem* (piagam), yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah yang masuk dalam pengaruh kekuasaan Palembang, seperti Bangka, Belitung, sebagian Jambi (Muara Tembesi), Bengkulu (Kepahiang/Rejang), dan Lapung (Tulang Bawang/Mesuji).

Sunan Cinde Walang pernah melakukan aliansi internasional antara Palembang, Jambi, dan Johor. Aliansi ini hanya bersifat insidental dan situasional. Namun, aliansi ini kadang justru menimbulkan konflik di antara mereka sendiri karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam bidang pertanian, ia mewajibkan bagi daerah-daerah tertentu untuk mengembangkan tanaman lada. Ia juga membuat sistem perairan yang dibuat antara Ogan, Komering, dan Mesuji, yang tidak saja digunakan untuk pertanian, namun juga untuk kepentingan pertahanan. Setelah Sunan Cinde Walang meninggal pada tahun

1706, tahta kekuasaan kesultanan kemudian dipegang oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714).

Ia merupakan sultan yang dikenal gagah berani dan banyak menyelesaikan permasalahan dengan senjata. Akibatnya, Kesultanan Palembang pernah kehilangan salah satu daerah kekuasaannya, yaitu Muara Tembesi di Jambi. Ketika Jayo Ing Lago tidak lagi berkuasa, terjadi kemelut politik pada saat itu perihal siapa yang pantas menggantikannya. Pangeran Purbaya, yang seharusnya menggantikan Jayo Ing Lago meninggal karena diracun. Tahta kekuasaan kemudian dipegang adik Jayo Ing Lago, Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724). Putra-putra Jayo Ing Lago, yaitu Raden Lembu dan Pangeran Mangkubumi Mohamad Ali menolak keputusan tersebut dengan melakukan pemberontakan. Sultan Agung Komaruddin kemudian berinisiatif untuk berdamai dengan kedua keponakannya tersebut dengan cara mengangkat Pangeran Mangkubumi Mohamad Ali sebagai Sultan Anom Muhamad Alimudin dan Raden Lembu sebagai Pangeran Jayo Wirakmo.

Namun tetap saja keputusan tersebut belum dapat memuaskan kedua belah pihak karena ternyata Pangeran Jayo Wikramo lebih diuntungkan dengan mendapatkan putri Sultan Agung Komaruddin sebagai pasangannya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik antar saudara. Pangeran Jayo Wirakmo memenangkan peperangan tersebut yang mengantarkan dirinya sebagai sultan dengan gelar Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758)¹⁷. Bila (Faille 1971: 14, Rahim, 1998: 80, Retno, 2004) Dilihat dari sisi

¹⁷ Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Badaruddin I) merupakan sosok pemimpin yang berwawasan luas dan memiliki pengalaman yang amat memadai. Ia pernah mengagas pentingnya memperbarui kesultanan dengan mengintrodusir pengetahuan dan teknologi yang baru, tanpa meninggalkan tradisi dan agama yang telah lama mapan. Ia telah melakukan perubahan dan pembangunan Kesultanan Palembang ke arah yang lebih maju. Di antara bentuk bangunan fisik yang didirikan pada masanya, yaitu: Masjid Agung, Kuta Batu (Kuta Lama), Makam Lemabang, tambang timah Bangka, terusan-terusan di pedalaman. Ia juga mengembangkan sistem perdagangan dan ekonomi Kesultanan Palembang ke arah yang lebih maju. Pada masanya syiar dan dakwah keagamaan Islam mulai berkembang pesat. Maka, tidak aneh jika dikatakan bahwa banyak ulama di Nusantara yang berasal dari wilayah Kesultanan Palembang ini. Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Badaruddin I) merupakan sosok pemimpin yang berwawasan luas dan memiliki pengalaman yang amat memadai. Ia pernah mengagas pentingnya memperbarui kesultanan dengan mengintrodusir pengetahuan dan teknologi yang baru, tanpa meninggalkan tradisi dan agama yang telah lama mapan. Ia telah melakukan perubahan dan pembangunan Kesultanan Palembang ke arah yang lebih maju. Di antara bentuk bangunan fisik yang didirikan pada masanya, yaitu: Masjid Agung, Kuta Batu (Kuta Lama), Makam Lemabang, tambang timah Bangka, terusan-terusan di pedalaman. Ia juga mengembangkan sistem perdagangan dan ekonomi Kesultanan Palembang ke arah yang lebih maju. Pada masanya syiar dan dakwah keagamaan Islam mulai berkembang pesat. Maka, tidak aneh jika dikatakan bahwa banyak ulama di Nusantara yang berasal dari wilayah Kesultanan Palembang ini.

periode pemerintahan yang berkuasa di Palembang pada masa tersebut, paling tidak dapat dibedakan dari garis silsilah pemegang kekuasaan yakni ; periode Kerajaan Palembang (sebagai cikal bakal Kesultanan Palembang) dan periode Kesultanan Palembang Darussalam itu sendiri. Yakni ;

a. Periode Kerajaan Palembang:

- 1) Ario Abdillah (Ario Dila, sebelumnya bernama Ario Damar) (1455-1486)
- 2) Pangeran Sedo Ing Lautan (1547-1552)
- 3) Kiai Gede Ing Suro Tuo (1552-1573)
- 4) Kiai Gede Ing Suro Mudo (Kiai Mas Anom Adipati Ing Suro) (1573-1590)
- 5) Kiai Mas Adipati (1590-1595)
- 6) Pangeran Madi Ing Angsoko (1595-1629)
- 7) Pangeran Madi Alit (1629-1630)
- 8) Pangeran Sedo Ing Puro (1630-1639)
- 9) Pangeran Sedo Ing Kenayan (1639-1650)
- 10) Pangeran Sedo Ing Pesarean (1651-1652)
- 11) Pangeran Sedo Ing Rajek (1652-1659)

b. Periode Kesultanan Palembang Darussalam:

- 1) Sultan Ratu Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam (1659-1706)
- 2) Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714)
- 3) Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno (1714-1724)
- 4) Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758)
- 5) Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo (1758-1776)
- 6) Sultan Muhammad Bahaudin (1776-1804)
- 7) Sultan Mahmud Badaruddin II (1804-1821)
- 8) Sultan Ahmad Najamuddin II atau Husin Dhiauddin (1813-1817)
- 9) Sultan Ahmad Najamuddin III atau Pangeran Ratu (1819-1821)
- 10) Sultan Ahmad Najamuddin IIV atau Prabu Anom (1821-1823)

Dilihat dari asal silsilah berdasarkan garis keturunan raja-raja yang berkuasa pada masa kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang yakni :

| No | Nama Penguasa | Tahun | Makam | Keturunan |
|----|--|-------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Ario Dillah (Ario Damar) | 1455 - 1486 | Jl. Ario Dillah III, 20 ilir | Anak Brawijaya V |
| 2 | Pangeran Sedo ing Lautan (diganti putranya) | s.d 1528 | 1 Ilir, di sebelah Masjid Sultan Agung | Keturunan R. Fatah |
| 3 | Kiai Gede in Suro Tuo (diganti saudaranya) | 1528 - 1545 | 1 Ilir, halaman musim Gedeng Suro | Anak R Fatah |
| 4 | Kiai Gede in Suro Mudo (Kiai Mas Anom Adipati ing Suro/Ki Gede ing Ilir) (diganti putranya) | 1546 - 1575 | 1 Ilir, kompleks makam utama Gedeng Suro | Saudara Kiai Gede in Suro Tuo |
| 5 | Kiai Mas Adipati (diganti saudaranya) | 1575 - 1587 | 1 Ilir, makam Panembahan selatan Sabo Kingking | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 6 | Pangeran Madi ing Angsoko (diganti adiknya) | 1588 - 1623 | 20 ilir, candi Angsoko | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 7 | Pangeran Madi Alit (diganti saudaranya) | 1623 - 1624 | 20 Ilir, sebelah RS Charitas | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 8 | Pangeran Sedo ing Puro (diganti keponakannya) | 1624 - 1630 | Wafat di Indralaya | Anak Kiai Gede in Suro Mudo |
| 9 | Pangeran Sedo ing Kenayan (diganti keponakannya) | 1630 - 1642 | 2 Ilir, Sabokingking | |
| 10 | Pangeran Sedo ing Pasarean (Nyai Gede Pembayun) (diganti putranya) | 1642 - 1643 | 2 Ilir, Sabokingking | Cucu Kiai Mas Adipati |
| 11 | Pangeran Mangkurat Sedo ing Rejek (diganti saudaranya) | 1643 - 1659 | Saka Tiga, Tanjung Raja | Anak Pangeran Sedo ing Pasarean |
| 12 | Kiai Mas Hindi, Pangeran Kesumo Abdurrohim (Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidul Imam) (diganti putranya) | 1662 - 1706 | Candi Walang (Gelar Sultan Palembang Darusslam 1675) | Anak Pangeran Sedo ing Pasarean |
| 13 | Sultan Muhammad (Ratu) Mansyur Jayo ing Lago (Diganti saudaranya) | 1706 - 1718 | 32 Ilir, Kebon Gede | Anak Kiai Mas Hindi |

| | | | | |
|----|---|-------------|---|--|
| 14 | Sultan Agung Komaruddin Sri teruno (diganti keponakannya) | 1718 - 1727 | 1 Ilir, sebelah Masjid Sultan Agung | Anak Kiai Mas Hindi |
| 15 | Sultan Mahmud Badaruddin I Jayo Wikromo (diganti putranya) | 1727 - 1756 | 3 Ilir, Lamehabang Kawmah Tengkurap | Anak Sultan Muhammad Mansyur Jayo ing Lago |
| 16 | Sultan/Susuhunan Ahmad Najamuddin I Adi Kesumo (diganti putranya) | 1756 - 1774 | 3 Ilir, Lemahabang (wafat 1776) | Anak Sultan Mahmud Badaruddin I |
| 17 | Sultan Muhammad Bahauddin | 1774 - 1803 | 3 Ilir, Lemahabang | Anak Sultan Ahmad Najamuddin I |
| 18 | Sultan/Susuhunan Mahmud Badaruddin II R. Hasan | 1803 - 1821 | Dibuang ke Ternate (wafat 1852) | Anak Sultan Muhammad Bahauddin |
| 19 | Sultan/Susuhunan Husin Dhiauddin (adik SMB II) | 1812 - 1813 | Wafat 1826 di Jakarta. Makam di Krukut, lalu dipindah ke Lemahabang | Anak Sultan Muhammad Bahauddin |
| 20 | Sultan Ahmad Najamuddin III Pangeran Ratu (putra SMB II) | 1819 - 1821 | Dibuang ke Ternate | Anak SMB II |
| 21 | Sultan Ahmad Najamuddin IV Prabu Anom (putra Najamuddin II) | 1821 - 1823 | Dibuang ke Manado 25-10-1825. Wafat usia 59 tahun | Anak Sultan Husin Dhiauddin |
| 22 | Pangeran Kramo Jayo, Keluarga SMB II. Pejabat yang diangkat Pemerintah Belanda sebagai Pejabat Negara Palembang | 1823 - 1825 | Dibuang ke Purbalingga Banyumas. Makam di 15 Ilir, sebelah SDN 2, Jl. Segaran | Anak Pangeran Natadiraja M. Hanafiah |

Sumber: 'Kesultanan Palembang', Nanang S. Soetadji

D. POLA -POLA TRADISI PENGGANTIAN KEKUASAAN RAJA DAN SULTAN

Proses Islamisasi berlangsung dengan cara mengakomodasi budaya esoterik masyarakat agraris yang kuat sehingga melahirkan corak Islam yang sinkretik seperti Islam kejawen .

Sementara pada tahap berikutnya Islamisasi tidak mendapat kesulitan dalam

membenarkan nilai-nilai budaya eksotik yang tumbuh dikota-kota pelabuhan dagang sehingga melahirkan corak Islam yang relatif baru yakni Islam yang menegakkan secara murni ajaran-ajarannya, dan akhirnya mendorong munculnya lembaga- atau intitusi-intitusi Islam yang beraplikasi pada pembentukan tema budaya baru dan pola sosial yang baru juga . Seperti pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara Islam menjadi suatu intitusi politik yang sangat penting bahkan menjadi dasar legitimasi penguasa, umpamanya kata *Kholifatullah Penatagama* , *Sri Sultan* .atau kedalam kajian kitab-kitab wirid seperti *Serat Wirid Hidayat Djati Raden Ngabehi Ranggawarsita*.

Kenyataan sejarah ini berkembang di pulau-pulau Sumatera dan Sulawesi seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai Aceh, Kesultanan Deli Serdang, Kesultanan Palembang Darussalam, Kesultanan Bone dan Gowa.- atau wilayah yang umumnya bekas kerajaan Islam. Upaya untuk memberikan penjelasan tentang kaitan erat antara dinamika Islam dengan perkembangan dunia material adalah satu bidang yang bisa dikatakan sudah klasik, tapi dengan relevansi yang sebenarnya bisa terus-menerus terbaru. Komodifikasi sosial yang dibawa oleh suksesi kekuasaan ternyata tidak mengurangi peran agama dalam masyarakat, jika bukan malah memperkuatnya.

Dalam sejarah Kesultanan Palembang proses Islamisasi melalui jalur gerakan perdagangan berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan pribumi. Seperti jaringan bisnis para pedagang Arab biasanya paralel dengan jaringan keagamaan, sosial dan politik. Dalam Kesultanan Palembang bahkan ada kecenderungan menarik karena para penasihat Sultan biasanya adalah juga para pedagang dan pengusaha kapal yang sukses. Sebab pada abad 18 menggambarkan peran penting orang muslim dari Arab, Gujarat dan Bengali di dalam kegiatan ekonomi , sosial dan politik di beberapa wilayah seperti Maluku, Makassar, Palembang dan Perkalongan. (Bambang 2002: 292). Tidak mengerankan jika Orang Arab Muslim memiliki posisi yang istimewa di mata kesultanan Palembang, selain menjadi guru agama Islam (ulama kesultanan) juga mendapatkan keistimewaan lainnya seperti ; Orang Arab boleh bertempat tinggal di daratan dan dimakamkan diperkuburan keluarga Sultan. Sultan juga memberikan hak istimewa kepada para ulama- pujangga yang sebagian besar keturunan Arab (Taufik Abdullah, 1987: 203).

Peeters mengatakan dilingkungan kesultanan Palembang orang Arab Muslim dari Hadramaut mempunyai kedudukan khusus. Orang Belanda yang pernah mengunjungi keraton Palembang menyaksikan, bahwa jika pembesar kerajaan raja, mereka harus menyembah sampai menyentuh lantai, sedangkan orang Arab boleh duduk dikursi sultan (1998:15). Lebih dari itu, kesultanan Palembang membolehkan orang Arab membangun perkampungan komunitas Arab sendiri dan dikepalai oleh salah seorang dari mereka serta dianugrahi oleh sultan gelar Pangeran seperti Pangeran Umar, Pangeran Abdul Rahman bin Hasan Al-habsyi (JL. Van Sevenhoven , 1971:33-34).

Pada episode perkembangan Islam Nusantara abad 13- 19, ternyata peran dan pengaruh Islam dalam turut membentuk proses konversi suksesi sultan-sultan di dalam Kesultanan Palembang , didukung dengan terbentuknya jaringan kekerabatan yang tidak hanya memiliki fungsi sosial dan keagamaan, fungsi ekonomis melainkan juga fungsi politik yang sangat kuat, berbagai bentuk pengantian kekuasaan pada abad tersebut ternyata juga menjadi jembatan konversi bagi kerajaan islam lainnya. Melalui jaringan inilah akhirnya berbagai kegiatan kesultanan berlangsung diantaranya adalah pergantian kekuasaan dan gelar Islam yang dikenakan. Faktor lainnya adalah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bukan saja sebagai sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus merupakan kekuatan alternatif yang cukup diperhitungkan. Islam merupakan daya dobrak bagi pengikutnya untuk menghancurkan tatanan sosial yang timpang. Islam juga merupakan kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme.

Islampun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada tahun 100 H (718 M), saat raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srinindravarman mengirim surat kepada Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dari Khilafah Bani Umayyah, meminta mengirimi da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi:

"Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu- bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya."

Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Sringarvarman, yang semula Hindu, masuk Islam sehingga Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sriwijaya Islam. Sayangnya, pada tahun 730 M, Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya yang masih menganut Budha. (Syair ini diterbitkan oleh M.O. Woelders, 1975, 195-6)

Menurut Taufik Abdullah, ada tiga pola dalam proses pembentukan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, ketika Samudera Pasai berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-17 ketika kerajaan Gowa-Tallo resmi masuk Islam. *Pertama*, pola Samudera Pasai. Lahirnya Kerajaan Samudera Pasai berlangsung melalui perubahan dari negara yang segmenter, atau mereuah menurut istilah *Bustanus Salatin*, ke negara yang terpusat. Di sini proses Islamisasi sejalan dengan proses pembentukan kerajaan terpusat, yang menggantikan kerajaan segmenter. Sebagaimana halnya sebuah kerajaan baru, Samudera Pasai tidak saja berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman, tetapi juga harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga. (Berg, 1902: 10, Uka, 1993: 297, Taufik Abdullah, 2002).

Dalam proses perkembangannya menjadi negara terpusat, Samudera Pasai juga menjadi pusat pengajaran agama. Pola dari negara segmenter menjadi negara terpusat, juga diambil oleh Aceh Darussalam, yang setelah membebaskan diri dari Pidie, kemudian mengalahkan Samudera Pasai pada tahun 1524. Kecenderungan historis yang sama juga diperlihatkan oleh Sulu dan Manguindanao. *Kedua*, pola Melaka. Baik *Sejarah Melayu* maupun laporan Portugis memperlihatkan bahwa Islamisasi Malaka dimulai setelah para pedagang Islam dan para "mullah" berhasil mengislamkan keluarga kerajaan atau, bisa juga raja mengambil inisiatif untuk menjadikan dirinya penganut Islam. Dengan kata lain, proses Islamisasi berlangsung dalam satu struktur negara yang, seperti dikatakan dalam *Sejarah Melayu*, telah memiliki basis legitimasi geneologis. Pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan juga dapat ditemukan di kota-kota pelabuhan yang lain. Ternate dan Gowa-Tallo diislamkan oleh masyarakat dagang masing-masing, yang jumlah serta peran politiknya terus berkembang. Tidak seperti di Samudera Pasai, Islamisasi di Malaka, Gowa-Tallo dan sebagainya (Kartodirdjo, 1993: 298).

Tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Islam tidak mengubah desa menjadi suatu bentuk baru dari organisasi kekuasaan, seperti umpamanya yang terjadi di

Samudra Pasai. Konversi agama dijalankan, tetapi pusat kekuasaan telah ada lebih dulu. Dari perbandingan beberapa tipe Islamisasi dan pembentuknya negara ini, menurut Taufik Abdullah, muncul dua pola yang menonjol. Yang pertama adalah situasi di mana Islam memainkan peranan dalam pembentukan negara. Yang kedua adalah keadaan di mana Islam harus menghadapi masalah akomodasi struktural. Tetapi dalam kedua pola perpindahan agama tersebut, negara, baik yang berupa kadipaten-kadipaten yang terletak di pinggir-pinggir sungai maupun kerajaan maritim yang relatif terpusat, berperan sebagai "jembatan penyebrangan" Islamisasi bagi wilayah sekitarnya.

Ketiga, pola Jawa. Di sini Islam tampaknya tidak punya kebebasan untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan, sebagaimana di Pasai. Soalnya jelas: Islam sudah harus berhadapan dengan sistem politik dan kekuasaan yang sudah lama mapan, dengan pusatnya keraton Majapahit. Benar, komunitas pedagang muslim sudah mendapat tempat di pusat-pusat politik pada abad ke-11 dan kemudian membesar pada abad ke-14. Baru pada abad tersebut komunitas itu menjadi ancaman yang serius bagi keraton pusat. Ini pun setelah Majapahit melemah, menyusul konflik internal keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal.

Bahkan Fachry Ali (1986 :32). Berpendapat bahwa kenyataan tersebut bukan merupakan sesuatu yang asing bagi Islam. Sejak awal kelahirannya, Islam telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan alternatif yang mampu mengubah setiap bentuk tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan dan diktum-diktum universal. Kondisi tersebut didorong juga oleh penyebaran Islam yang massif di Nusantara, diikuti munculnya kerajaan-kerajaan baru bercorak Islam pada abad 13, ternyata menciptakan momentum baru bagi hubungan-hubungan social, politik, agama antara Timur Tengah dan Nusantara. Bahkan manakalah Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), posisinya digantikan Aceh yang mengambil inisiatif bersama kerajaan Islam lainnya seperti Demak untuk menghadapi kekuasaan Portugis di perairan selat Malaka.

Kerajaan Majapahit melemah, menyusul konflik internal keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal. Situasi yang runyam di pusat keraton itulah, yang membuka peluang kepada para saudagar kaya di berbagai kadipaten di wilayah pesisir untuk menjauh dari kekuasaan raja. Berbekal keuntungan besar dari perdagangan

internasional, para pedagang besar itu tidak saja masuk Islam, tapi juga membangun komunitas-komunitas politik yang independen.

Maka begitulah, kita kemudian mengenal Demak, Jepara, Rembang, Tuban, Gresik dan Surabaya, tampil sebagai pusat-pusat perdagangan, aktivitas agama dan politik. Sesudah keraton pusat menjadi goyah, maka keraton-keraton kecil mulai bersaing untuk menggantikan keraton pusat ~ dan Demaklah akhirnya yang menggantikan. Kerajaan ini, dengan posisinya barunya itu, tidak saja memegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi "jembatan penyeberangan" Islam yang paling penting di Jawa. Walaupun mencapai keberhasilan politik dengan cepat dan mainkan peran sebagai "jembatan penyeberangan" keagamaan paling penting, Demak tidak mempunyai kebebasan struktural. Sebagai pengganti keraton pusat, Majapahit, Demak tidak saja harus menghadapi masalah legitimasi politik, tetapi juga panggilan kultural untuk kontinuitas. Dilema kultural dari dominasi politik Islam di dalam suasana tradisi Ciwa-Budhistik, dengan konsep kesusastraan yang konsentrik, telah jauh menukik ke dalam kesadaran, menjadi lebih jelas setelah keraton dipindahkan oleh anak angkat Sultan Trenggana, Jaka Tingkir, ke Pajang di pedalaman.

Menurut Taufik Abdullah, dilema ini menjadi lebih penting dengan muncul dan tampilnya Mataram sebagai pemegang hegemoni (1588). Masih menurut pandangannya bahwa tidak seperti pola Samudra Pasai, di mana Islam mendorong pembentukan negara yang supra-desa, juga tidak seperti pola Malaka, di mana keraton di-islamkan, di Jawa, Islam tampil sebagai penantang, untuk kemudian menggantikan kekuasaan yang ada. Ini adalah dilema kultural dari orang baru dalam sebuah bangunan politik lama.

Karena itu, Proses Islamisasi di Asia Tenggara, seperti sering disebutkan, umumnya berlangsung damai. Ini berbeda dengan Islamisasi, misalnya di Persia dan Turki, yang sering melibatkan kekuatan militer. Agen Islamisasi di kawasan ini pada umumnya pedagang, guru-guru sufi, (ulama) pengembara, *wandering scholar* ~ dan bukan tentara yang didatangkan dari Jazirah. Menurut Azra, pola penyebaran seperti itu, tak syak lagi membuat kawasan muslim Asia Tenggara jauh dari usaha sentuhan Arabisasi. Meski kawasan ini secara kultural tidak mengalami Arabisasi, bahasa Arab telah memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial keagamaan kaum muslimin.

Banyak perbendaharaan kata Arab yang digunakan, tidak saja yang berkaitan dengan soal-soal keagamaan, tapi juga menyangkut politik. Misalnya, *daulat, sultan, malik, khalifah, baiat, tadbir, harb, jihad, wathan, majlis, umat, siyasat, musyawarah*, dan sebagainya. Selain itu, ada juga bahasa Persia yang masuk dalam kosa-kata Melayu yang berkaitan dengan politik. Misalnya, “diwan” (dewan), “johan” (pahlawan), “syah”, “tahta”, “lasykar”, “nakhoda”, dan “syahbandar”. (Hasan Muarif Ambary 1998: 24-9; Azyumardi Azra 1999 : 77: 9).

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1970: 67-78), orang-orang Arab yang mula-mula menyebarkan agama Islam di kepulauan Nusantara, sengaja memilih bahasa Melayu sebagai pengantarnya. Ada persamaan nasib, antara bahasa Arab dan Melayu, kata guru besar bahasa dan kesusteraan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia yang asal Bogor itu. "Orang-orang Arab telah memperkenalkan diri mereka pada daerah ini sejak sebelum Islam, yaitu sejak zaman Jahiliyah. Seperti bahasa Arab zaman Jahiliyah, bahasa Melayu pun tidak merupakan bahasa estetik dalam bidang agama."

Kalaupun bahasa Arab bernilai tinggi, itu terutama dalam sastra rakyat. Sedangkan bahasa Melayu, kata Al-Attas, pengetahuan kita mengenai bahasa yang satu ini "boleh dibilang hampa belaka, dan mungkin, sebagai sastera rakyat, penggunaan bahasa kuno itu hanya dalam bentuk tradisi lisan." Al-Attas tampaknya menolak pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu merupakan *lingua franca*. Soalnya pada zaman pra-Islam, perdagangan di kawasan ini tidak meluas pasarannya. Lagi pula, kata dia, kalau bahasa Melayu merupakan *lingua franca* waktu itu, mengapa ia tidak mencapai peringkat sebagai bahasa sastra? Bahasa Melayu menjadi bahasa sastra memang setelah kedatangan Islam, dengan Hamzah Fanshuri sebagai tokoh utamanya.

Selain itu, masyarakat Melayu adalah masyarakat pedagang, sebagaimana halnya masyarakat Arab Jahiliyah. "Keadaan bahasa Arab yang demikian dapat kita bandingkan dengan bahasa Melayu Kuno; sebagaimana halnya bahasa Arab tidak dipergunakan atau mengambil peranan sebagai bahasa agama yang bersifat estetik seperti bahasa-bahasa Yunani-Romawi Kuno dan Iran-Parsi Kuno, begitu juga bahasa Melayu Kuno tidak dipergunakan untuk mengambil peranan sebagai bahasa agama-agama Hindu-Budha." Di Nusantara peran itu memang diambil oleh bahasa Jawa Kuno dan bahasa Sansekerta.

Selain itu, kedatangan Islam yang diikuti dengan konversi penduduk kawasan Asia Tenggara menjadi Islam, maka abjad Arab pun diadopsi. jika semula bahasa Melayu

hanya merupakan bahasa pasaran yang terbatas, setelah kedatangan Islam mengalami revolusi. Selain diperkaya oleh kosa kata bahasa Arab dan Parsi, bahasa Melayu juga dijadikan sebagai bahasa pengantar utama Islam di seluruh Nusantara, dan pada abad ke-16 berhasil mencapai peringkat sebagai bahasa sastra dan agama yang tinggi dan menggulingkan kedaulatan bahasa Jawa dalam bidang-bidang ini. Dengan ini pula bahasa Melayu-Indonesia itu harus dianggap sebagai bahasa Islam, dan mungkin merupakan yang kedua terbesar dalam dunia Islam.

Kembali ke bahasa politik. Hampir bisa dipastikan, ketika entitas politik Islam terbentuk pada akhir abad ke-13, dengan tegaknya kerajaan Samudera Pasai, maka pemakaian kosa kata politik Islam pun semakin meluas pula. Mengapa ? ada beberapa alasan geopolitik yang mendukung cepatnya Islam diterima oleh masyarakat saat itu antara lain : Kepulauan Melayu merupakan gerbang masuk terdepan bagi pelayaran ke timur. Karena itu tidak heran jika kerajaan-kerajaan Islam awal seperti Samudra Pasai (1270-1514 M) dan Malaka (1400-1511 M) muncul di sini. Kerajaan-kerajaan ini tumbuh dari pelabuhan atau bandar dagang, dan menjadi kerajaan Islam setelah rajanya memeluk agama Islam. Dengan munculnya kerajaan-kerajaan ini maka perlembagaan Islam, termasuk lembaga pendidikan, dapat didirikan. Semua itulah yang memungkinkan penyebaran agama Islam dan transformasi budayanya dapat dilakukan.

Faktor lain bagi pesatnya perkembangan Islam ialah mundurnya perkembangan agama Hindu dan Buddha, mengikuti surutnya kerajaan Hindu dan Buddha yang diikuti oleh mundurnya peranan politiknya. Abad ke-13 M ketika agama Islam mulai berkembang pesat di kepulauan Melayu, sebagai contoh, ditandai dengan mundurnya kerajaan Sriwijaya atau Swarnabhumi. Pusat imperium Buddhis di Nusantara ini mulai mengalami kemunduran disebabkan rongrongan dua kerajaan Hindu Jawa - Kediri dan Singasari - disusul dengan krisis ekonomi yang membelitnya. Seabad berikutnya negeri ini dua kali diserbu Majapahit, sebuah imperium Hindu yang mulai bangkit di Jawa Timur. Serbuan terakhir pada penghujung abad ke-14 M menyebabkan negeri itu hancur dan tamat riwayatnya (Wolter 1970).

Mundurnya kerajaan Sriwijaya menyebabkan daerah-daerah taklukannya melepaskan diri dan muncul menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka. Di antaranya ialah Lamuri, Aru, Pedir, Samalangga dan Samudra di pantai timur, dan Barus di pantai barat. Menjelang

akhir abad ke-13 M, kerajaan-kerajaan kecil itu berhasil dipersatukan dan bergabung di bawah imperium baru, Samudra Pasai. Setelah rajanya yang pertama, Meura Silu memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Malik al-Saleh, kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam. Pada tahun 1340 M Sriwijaya diserbu oleh Majapahit yang menjadikan negeri itu semakin lemah dan kehilangan pamor. Sebaliknya Samudra Pasai, walaupun juga digempur oleh Majapahit dan banyak sekali harta kerajaan itu yang dirampas, masih dapat melanjutkan eksistensinya sebagai bandar dagang utama di Selat Malaka.

Seperti telah dikemukakan, terbentuknya institusi-institusi politik di Nusantara selalui diawali oleh masuk Islam-nya raja-raja lokal, lalu diikuti para elite dan rakyat. Maka begitulah, "kerajaan" pun segera berubah menjadi "kesultanan", sedangkan sang "raja" mendapat julukan "sultan" atau "malik", di samping sebutan "raja" itu sendiri. Perubahan ini, menurut Azra, boleh dibilang lancar-lancar saja, seperti tampak pada kasus penguasa Pasai, Merah Silu, yang kemudian menjadi Sultan Malik al-Shalih itu.

Gelar sultan yang disandang raja-raja Islam di Nusantara, bukan melulu pemberian para guru sufi, seperti yang dilakukan oleh Syekh Isma'il kepada raja Pasai tadi. Bahkan di antaranya ada yang mengusahakan sendiri kepada penguasa politik dan keagamaan di Timur Tengah. Termasuk Pangeran Rangsang, pendiri kerajaan Mataram yang lebih bercorak "Jawaisme" ketimbang Islam, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung itu. Kegigihan para penguasa muslim di Nusantara untuk memperoleh gelar sultan dari otoritas politik dan keagamaan di Timur Tengah, tidak hanya menunjukkan hasrat kuat mereka untuk memperoleh legitimasi tambahan, tetapi juga mengisyaratkan keinginan untuk mengasosiasikan diri dengan pusat-pusat politik keagamaan Islam. Dengan kata lain, mereka ingin diakui sebagai bagian integral dari *Dar al-Islam*. Contoh yang paling konkret adalah acah yang secara resmi menyatakan kepada penguasa Turki Usmani sebagai *vasal state* Kesultanan Usmani.

Satu hal yang agaknya perlu digaris-bawahi, sehubungan dengan penggunaan bahasa politik Islam itu. Yakni, penempatan raja pada kedudukan yang sangat tinggi di hadapan warga masyarakat. Seperti halnya di pelbagai entitas politik muslim di Timur Tengah, warga masyarakat politik di tanah Melayu pun disebut *ra'yat*. Mereka yang digembala atau dituntun (*ra'iyah*). ini, di hadapan penguasa menyebut diri mereka "patik", "hamba", atau "abdi". Tak syak lagi, penguasa adalah "penggembala" atau "tuan"

yang bertanggung jawab langsung kepada Tuhan atas gembala atau sahaya-sahaya mereka. Kekuasaan mereka kemudian diperkukuh lagi melalui konsep "daulat". Berbeda dengan makna aslinya yaitu "berputar, beralih, berganti, memilih, atau menunjuk seseorang menggantikan yang lain, dalam bahasa politik Islam di Nusantara, kata ini mengandung arti sebagai kekuatan dan kekuasaan yang tinggi dan besar, meliputi lahir dan batin. Bahasa politik Islam di Nusantara memang mengenal pula kosa kata seperti "amanah", "adil", "*amar ma'ruf nahy mungkar*", yang diperuntukkan bagi para penguasa dalam hubungan mereka dengan rakyat. Tapi harus kita akui, bahasa politik Islam di Nusantara, seperti juga di negeri-negeri muslim lainnya, lebih banyak yang pro-penguasa.

Setidak-tidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan orang Melayu mengidentifikasi diri dan kebudayaannya dengan Islam. Pertama, faktor perdagangan; kedua, perkawinan, yaitu antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi pada tahap awal kedatangan Islam; ketiga, faktor politik seperti mundurnya kerajaan Hindu dan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya; keempat, faktor kekosongan budaya pasca runtuhnya kerajaan Buddhis Sriwijaya di kepulauan Melayu; kelima, hadirnya ulama sufi atau faqir bersama tariqat-tariqat yang mereka pimpin; keenam, pengislaman raja-raja pribumi oleh para ulama sufi atau ahli tasawuf; ketujuh, dijadikannya bahasa Melayu sebagai bahasa penyebaran Islam dan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan Islam; delapan, mekarnya tradisi intelektual baru di lingkungan kerajaan-kerajaan Melayu sebagai dampak dari maraknya perkembangan Islam. Faktor perdagangan telah sering dikemukakan. Agama Islam muncul di Nusantara disebabkan kehadiran pedagang-pedagang Muslim dari negeri Arab dan Persia sejak abad ke-8 dan 9 M. Dengan ramainya kegiatan pelayaran dan perdagangan yang dilakukan kaum Muslimin pada abad-abad berikutnya, terutama dari abad ke-11 hingga abad ke-17 M, perkembangan agama Islam ikut marak pula.

Pada mulanya komunitas Islam tumbuh di kota-kota pesisir yang merupakan pelabuhan utama atau transit pada zamannya. Di sini tidak sedikit pedagang Muslim asing itu tinggal lama dan kawin mawin dengan penduduk setempat. Semua itu merupakan cikal bakal berkembangnya komunitas Islam di Nusantara. Kegiatan perdagangan dan penyebaran Islam kemudian juga melibatkan penduduk pribumi, termasuk orang Melayu dan etnik-etnik pesisir lain yang meleuk agama Islam. Tradisi

dagang (merantau untuk berniaga) lantas tumbuh di kalangan etnik pesisir ini. Penekanan terhadap syariah ini juga melahirkan pandangan hidup yang lebih berorientasi kepada aktivitas sosial dan keduniaan.

Karena berbagai alasan yang dapat dimengerti, yaitu demi tegaknya syiar Islam dan kokohnya perkembangan masyarakat Islam, penekanan terhadap syariah ini mendapat sambutan luas dari ulama dan raja-raja pesisir, serta sejumlah tariqat sufi dan pesantren-pesantren di berbagai pelosok Nusantara. Penguasa pesisir menyambut baik karena memerlukan kepastian hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban negara, serta dalam mengatur kegiatan perdagangan di dalam dan dengan luar negeri. Peranan ulama dan martabatnya lantas lebih naik lagi di mata masyarakat. Mereka juga semakin terlibat jauh dalam birokrasi pemerintahan dan ikut menentukan kebijakan politik. Tidaklah mengejutkan apabila pusat-pusat kekuasaan Islam yang telah tersebar luas di Nusantara pada abad ke-18 M berlomba-lomba melahirkan ulama-ulama terkemuka di bidang fiqih dan syariah. Contoh terbaik ialah Abdul Samad al-Falimbangi¹⁸, Arsyad al-Banjari, Daud al-Fatani, Nawawi al-Bantani, dan lain-lain. Mereka adalah ahli tasawuf, tetapi cenderung menekankan signifikansi syariah dan fiqih. (Azra 1999 : 27-3; Ibrahim Alfian : 2005).

Pola penerapan syariat dalam pemerintahan lokal dan pengintegrasian terma-terma politik dan muamalah ke dalam tradisi masyarakat Muslim sebagaimana berlaku di Aceh, juga diikuti oleh kerajaan-kerajaan pesisir lain di kepulauan Nusantara seperti di Kalimantan, Sulawesi, Banten, Madura, Bima, dan Palembang. Penerapan ini lebih

¹⁸ Memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan tersebut, *beberapa orang penulis Mesir* muncul dalam berbagai disiplin ilmu, maka penulis Palembang (al-Falimbani) lahir dan muncul selaku ulama` penulis pejuang, terutama dalam bidang *ilmu fiqh aspek jihad fi sabilillah*. Beliau ini dikenal sebagai Syekh Abdus Shomad al-Falimbani (1150/1736-1200/ 1785),¹⁸ ulama asal Palembang yang anti kaum penjajah Barat selaku kaum kafir Harbi. Dalam pandangan al-Falimbani tentang jihad lebih banyak memakai ayat dan hadits sebagai landasan berfikirnya; pertama, menurutnya, sebagai muslim diwajibkan memerangi orang-orang kafir (harbi, pen) di medan peperangan seperti terjadi di Nusantara pada abad ke-18 Masehi; tidak hanya itu, al-Falimbani menganjurkan supaya seorang muslim berjihad melawan hawa nafsu (takut mati, pen) baik (harus berani hidup, pen) untuk dirinya sendiri, maupun (untuk/ karena) orang lain; *kedua*, jihad yang dianjurkan oleh al-Falimbani adalah jihad muthlaq, yaitu memerang (para) penentang Islam. Pemikirannya ini dilator-belakangi oleh/ karena pada saat itu, umat Islam di Nusantara, khususnya di negeri jajahan Palembang berada dalam kekuasaan colonial (Belanda VOC, pen) Umat Islam tidak diperbolehkan memperoleh hak-hak mereka sebagai rakyat pribumi dan tidak diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam (dalam dunia bisnis?). . Bukan mustahil, pengaruh pemikiran al-Falimbani ini menjadi landasan kebijaksanaan Sri Paduka Sultan Mahmud Badaruddin dan para menteri serta rakyatnya dalam melawan serangan pasukan Belanda, dan pasukan sekutunya.

ditekankan pada soal-soal yang berhubungan dengan kewajiban mempelajari agama dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dan tentunya ketatanegaraan serta kepemimpinan. Dalam kasus Indonesia, Syariah dan tasawuf dipandang oleh ahli-ahli sejarah kebudayaan sebagai sendi utama terbentuknya peradaban dan kebudayaan Islam.

Seperti halnya, Dinamika gerakan perdagangan dan para pendakwah yang dilakukan oleh orang Arab di Palembang berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan pribumi. Jaringan bisnis para pedagang Arab ini biasanya paralel dengan jaringan keagamaan dan sosial serta politik. Di Palembang bahkan ada kecenderungan menarik karena para penasehat sultan biasanya adalah juga para pedagang dan pengusaha kapal yang sukses. Pada abad 18 menggambarkan peran penting orang muslim Arab, Gujarat dan Bengali di dalam kegiatan ekonomi di beberapa wilayah seperti Maluku, Makassar, Palembang dan Perkalongan. Selain menjadi pedagang besar mereka juga bertindak sebagai pedagang perantara, pengusaha transportasi dan rentenir (Bambang : 292:2002).

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, Keraton dijadikan sebagai pusat studi Islam dan sastra. Dalam tradisi Kraton Melayu menulis merupakan pekerjaan yang terhormat. Munculnya keraton sebagai pusat studi Islam dan sastra tentu saja karena mendapat patronase Sultan. Setelah kemunduran Aceh sebagai pusat studi Islam, muncul Palembang sebagai pusat studi Islam dan sastra (1750-820 M). Kebiasaan memelihara ulama keraton telah dirintis sejak masa Sultan Mahmud Badaruddin I (1742-1757 M). Di masa inilah muncul penulis Palembang Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad yang telah menerjemahkan dan memberikan syarah kitab *Jawharat al-Tawhid* karangan Ibrahim Laqani ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1750. Syekh Syihabuddin bin Abdullah Muhammad mukim di Mekkah dan tulisannya dikirim dari Mekkah (Rahim 1998: 92).

Bahkan Retno (2005) secara arkeologis menyatakan bahwa Salah satu sumber berita Arab yang menyebutkan kemegahan dan kejayaan (kekayaan) Raja (kerajaan) Sriwijaya berasal dari abad IX-X Masehi, yaitu Kitab *Al-Masalik Wal Mamaliki* yang ditulis oleh Ibn Hordadzbah dari tahun 844-848 M; Berita Arab dari Saudagar Sulayman tentang pelayarannya ke Timur berjudul *Akhbaru's Shin Wa'I Hind* (Kabar-kabar Cina dan

India) ditulis tahun 851 Masehi; Berita Arab dari ibn Al-Fakih pada tahun 902 Masehi; Berita Arab dari Abu Sayd tahun 916 Masehi; dan Berita Arab dari Abu Hasan Ali Al-Mas'udi seorang ahli geografi yang berjudul *Marju'z Zahab wa Ma-adinu'l Jauhar* pada tahun 955 Masehi.

Ini disebabkan karena Islam mempunyai dua tradisi yang saling melengkapi, terus dipertahankan dan dikembangkan, serta selalu diperbarui, yang mengikat baik tampilan universal dan kosmopolitannya di satu pihak, dan tampilan lokal dan nasionalnya di lain pihak. Dua tradisi ini menyediakan sumber-sumber ide dan ilham yang berlimpah bagi kreativitas penganutnya. Yang pertama, tradisi besar yang terkandung dalam tasawuf filosofis dan syariat. Jika syariat memuat ketentuan-ketentuan hukum positif dalam menjalankan peribadatan dan keharusan membangun tatanan masyarakat Muslim yang berpegang pada al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka tasawuf mempunyai pandangan dunia yang inklusif yang mendorong bangkitnya budaya dagang dan aktivisme dalam kegiatan sosial dan intelektual. Yang kedua, tradisi kecil seperti tercermin dalam mistisisme populer yang dikembangkan tariqat-tariqat sufi dan aliran-aliran fiqih tertentu yang di Indonesia telah benar-benar berfungsi, terutama dalam membentuk budaya-budaya lokal yang unik.

Dua tradisi ini berkembang sebagai kelanjutan dari dialog lama antara kecenderungan ortodoksi dan heterodoksi, rasionalitas dan mitos, keperluan akan tertib sosial dan anarki, hukum Tuhan dan adat istiadat buatan manusia, kota dan desa (Gellner 1981). Begitulah tahap II dan III perkembangan Islam di kepulauan Melayu sangat ditentukan oleh pesatnya perkembangan ilmu tasawuf dan syariat. Pada tahap kedua, derasnya proses islamisasi kepulauan Melayu itu ditandai dengan dua gejala dominan dalam kehidupan intelektual: Pertama, munculnya banyak sekali karangan, baik prosa maupun puisi, berisi renungan-renungan tasawuf yang mendalam tentang masalah ketuhanan dan hubungan manusia dengan Tuhan, serta arti penciptaan dan kedudukan manusia di alam dunia; Kedua, munculnya teori kekuasaan yang bertolak dari pendekatan sufistik dan diungkapkan melalui karya sastra (Taufik Abdullah 2002 : 67).

Gejala pertama tampak pada karya Hamzah Fansuri, berupa sejumlah risalah tasawuf yang begitu filosofis dan mendalam, seperti *Syarab al-'Asyiqin* (Minuman Orang Berahi) dan *Asrar al-'Arifin* (Rahasia Ahli Makrifat), serta syair-syairnya yang indah dan

memikat. Dalam karangan-karangan sufi dari Barus itu derasnya proses islamisasi kebudayaan Melayu tampak bukan saja pada persoalan yang dikemukakan, tetapi juga pada konsep-konsep yang mendasari pemikirannya. Gejala kedua tampak pada munculnya kitab ketatanegaraan bercorak sastra, *Taj al-Salatin* (Mahkota Raja-raja), karangan Bukhari al-Jauha.. Buku ini selesai ditulis pada 1603 M menguraikan adab pemerintahan yang ideal menurut Islam.

Konsep-konsep dan pemerintahan raja-raja Melayu banyak diturunkan dari kitab ini. Negara tidak lagi dipandang sebagai sekadar refleksi dari kedirian seorang raja, tetapi juga sebagai pranata yang merupakan terwujudnya kesatuan yang harmonis antara raja dan rakyat, makhluk dan Khaliq, yaitu dengan melaksanakan keadilan dalam pemerintahan. Raja yang adil dan dipandang sebagai 'Bayang-bayang Tuhan di muka bumi' (*Zill Allah fi al`ardh*), sedang raja yang zalim dan menurutkan egonya disebut 'Bayang-bayang Iblis di muka bumi'

Berdasarkan anggapan ini penulis *Taj al-Salatin* mengemukakan bahwa selama raja yang tidak adil tidak menimbulkan kekacauan dan anarki, maka tidaklah terlalu diacuhkan apalagi dihormati. Ini karena mereka ini telah memalingkan wajahnya dari Allah, menyimpang dari hukum Tuhan dan menolak syariat. Konsep tentang tatanan pemerintahan yang ideal menurut Islam juga dipertegas. Yaitu dengan mengukuhkan lembaga yudikatif (*qadi*) yang berperan merumuskan dan melaksanakan hukum Islam, serta mendampingi raja dalam menjalankan pemerintahan. Pemberlakuan lembaga yudikatif ini juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan raja agar tidak sewenang-wenang. Didukung oleh fungsi ulama sebagai pemberi legitimasi bagi kekuasaannya, raja lantas tidak dapat berbuat sewenang-wenang (Abdul Hadi W. M. 2003 : 22-42).

Selain itu , khusus untuk Kesulthanan Palembang pengaruh Islam dapat dengan mudah ditemukan pada penggunaan Bahasa Arab dan Tulisan Arab Melayu , ini disebabkan Islam tumbuh dan berkembang ke luar jazirah Arabiyah dan sekitarnya hingga sampai ke negeri Shin (Tiongkok), bahkan menyebar pula ke kawasan Asia dan Asia Tenggara, akhirnya tibalah ke wilayah Kepulauan Nusantara pada abad ke-13 M. Diantara penduduk negeri di kawasan Asia yang bahasanya dipengaruhi oleh bahasa Islam (Arab *Fushshah*) dan menggunakan huruf Arab, diantaranya adalah India (bahasa Urdu), Iran (bahasa Parsi), dan wilayah Kepulauan Nusantara (bahasa Melayu dan Jawi).

Bahasa Melayu tersebar ke wilayah Thailand Selatan (Fatani); Philipina Selatan, Brunei, Malaka, dan Palembang . Kalau bahasa Melayu Aceh diduga pernah menjadi bahasa resmi kerajaan Islam Samudra (Sumatera)Pasai, sebagaimana pernah dilaporkan oleh Marcopolo tahun 691.H/ 1292 M (maka yang menjadi bahasa resmi kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah (1479-1528) adalah bahasa Jawi yang juga menggunakan huruf Arab Gundul. Huruf Arab gundul digunakan pula untuk menulis dan menyalin bahasa Sunda sebagai bahasa resmi kerajaan Islam Banten dan sekitarnya, kemudian digunakan pula secara resmi sebagai bahasa kerajaan Islam Palembang 19 (Al-Jami'ah, No. 5-6, 1968:73), ini menunjukkan pengaruh sosio politik Islam pada masa Kesulthan Palembang.

Dengan adanya penyebaran Islam di Indonesia maka mempengaruhi budaya masyarakat setempat seperti terlihat dari berbagai macam peninggalannya berupa Masjid, Batu nisan, serta Mata Uang dan lain sebagainya. Khusus mengenai mata uang yang ada pada saat itu memiliki ciri-ciri yang menunjukkan pengaruh Islam berupa tulisan dan bahasa Arab yang terdapat pada mata uang tersebut. Mata uang atau koin yang terdapat di Kesultanan Palembang Darussalam (KPD) tidak ditemukan nama-nama Sultan berkuasa / yang memerintah pada saat uang tersebut dicetak, melainkan hanya berisi tulisan Seperti berikut ini *Masruf Fi Balad Palembang*”, atau “*Al Syulthon fi Balad Palembang*”, atau “*Hadza Fulus Palembang*”, serta “*Khalifah fi Balad Palembang Darussalam*”. dan “*Alamat Sultan*”. (Rahim, 1998: 289)

¹⁹. Proses ini tidak saja sebatas bergesernya bahasa melayu ke bahasa Arab namun jua diperkuat dengan proses kekerabatan dan pemukiman (geopolitik yang dilakukan oleh orang Arab di kesulthan Palembang. Seperti Dengan demikian , terbentuklah jaringan kekerabatan yang tidak hanya memiliki fungsi sosial dan keagamaan melainkan juga fungsi ekonomis yang sangat kuat. Melalui jaringan inilah akhirnya berbagai kegiatan ekonomi berlangsung. Komunitas pedagang Arab di Palembang terkonsentrasi di sekitar pasar, pelabuhan, pusat pemerintahan diperkotaan. Mujib (2001:47), mengemukakan, sejak awal abad 18 M disekitar sungai Musi telah menetap orang Arab di Palembang .Pemukiman orang Arab saat ini disebut kampung Arab di Kelurahan 7 Ulu, 12 Ulu, 13 Ulu 14 Ulu , 16 Ulu. Orang Arab yang bermukim di 7 Ulu umumnya dari suku Arab *al-Haddad, al Attas, as-Sahab, al-Kaff. As Saqqaf* dan mereka kebanyakan adalah keturunan *Sayyid* (turunan Nabi SAW), mata pencarian mereka adalah berdagang. Sementara di perkampungan Arab 14 Ulu dihuni oleh suku Arab *al-Habsyi, al-Munawar, al-Haddad, al -kaff dan alAssegaf* , Mata pencarian orang-orang Arab yang menghuni perkampungan di atas adalah pedagang. Data arkeologis menunjukkan perkampungan Arab diatas memang menjadi pusat perekonomian terutama perdagangan yang hingga kini masih dapat ditemui seperti adanya pasar 16 Ilir yang menyatu dengan perkampungan Arab di Kuto Batu , berseberangan dengan perkampungan 7, 12, 13 dan 14 Ulu. Bahkan pelabuhan Boom Baru Palembang berseberangan dengan kampung Arab 13 dan 14 Ulu.

Hal ini berbeda dengan uang/koin kuno di Kesultanan yang lain adakalanya dicantumkan alamat Sultan, tahun memerintah, atau nama raja yang sedang memerintah sewaktu mata uang tersebut dikeluarkan, contohnya pada koin/mata uang Samudera Pasai yang menyebutkan nama *Sultan Muhammad Malik az Zahir as sultan al-die* (Sukanti, dkk. 2001: hal. 15). Dan Koin Jambi yang bertuliskan Sultan Pangeran Ratu Taha, dan koin Malaka yang tertulis *Muzaffar Shah al Syulthon*, dan disisi sebaliknya tertulis *Nasir al Dunia Wa'l Din* yang berarti *Sukses dunia dan agama*. Pesebaran koin Palembang dan Koin Malaka ditemukan di antara kedua negeri. menurut Kenny Ong, Pemerhati koin nusantara yang tinggal di Malaka, ini menunjukkan bahwa pada zaman itu telah terdapat hubungan dagang antara Palembang dengan Malaka (A. Khalik R. Muhibat, 2007: 6).

Sementara itu, koin kuno peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang diserahkan ke Pemerintah Kota (Dinas Pariwisata) oleh warga yang bernama Abdul Khalik (40). Warga jalan Pangeran Sido Ing Lautan RT 1 No 37 kelurahan Kedukan bukit 35 Ilir, adalah hasil koleksi pribadinya selama kurang lebih satu tahun (sejak 2006). Dari 60 koin yang telah diserahkan kepada Museum Budaya Sultan Mahmud Badaruddin II ini, kebanyakan berasal dari masyarakat sungai Kedukan Bukit dan sekitarnya. Dari hasil pengamatan penulis terhadap 60 koin tersebut diatas, diketahui Koin tertua tercatat tahun 913 H / 1506 M. dan Koin termuda tahun 1253 H / 1837 M. Sebagian besar uang/koin terbuat dari timah dan logam. (Ari :2007. Berita Pagi)

Pada koin tertua tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut; berangka tahun 913 H./1506 M. Di koin tersebut tertulis "*Al Syulthon fi Balad Palembang sanah 913 H*".(Sultan di Negeri Palembang Tahun 913 H. atau 1506 M). ini menyatakan bahwa pada masa tersebut penguasa Palembang telah beragama Islam, meskipun tidak/belum secara terang-terangan (memakai gelar Sultan) hanya sebatas di Mata Uang/koin (lihat Tabel Pesebaran Koin Palembang).

Berdasarkan fakta diatas dapatlah diambil suatu kesimpulan tentang teori perkembangan Islam di Palembang bahwa pada saat itu perkembangan Islam sudah cukup pesat hal ini dapat dibuktikan dengan adanya koin Palembang yang dicetak dengan menggunakan Bahasa dan Huruf "Arab Gundul" (Arab Melayu). Pada saat itu

penyebaran agama Islam telah berkembang seiring dengan runtuhnya kekuasaan Kerajaan Majapahit di Indonesia,

Bukti lain yang menunjukkan bahwa Agama Islam telah berkembang pesat di Palembang adanya pemakaian nama-nama Islami pada para Penguasa Palembang seperti “Ario Dilla/Ario Abdillah” Adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang(1455-1486). Dan Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat (PRSJM I sampai PRSJM VI). Kemudian ditemukan juga koin yang berangka tahun 1023 H / 1613 M. Di koin tersebut tertulis “*Al Sulthon fi Balad Palembang sanah 1023 H*”. (Sultan di Negeri Palembang Tahun 1023 H. atau 1613 M). Koin ini dibuat Pada masa pemerintahan Pangeran Mading Angsoko yang memakai gelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat II (PRSJM.II).

Dengan adanya koin yang dicetak pada tahun 913 H / 1506 M. oleh Pangeran Sidoring Lautan dan tahun 1023 H / 1613 M. oleh Pangeran Mading Angsoko bukan berarti Kesultanan Palembang Darussalam dimulai sejak tahun tersebut, hanya sebatas pemakaian Huruf dan bahasa Arab Melayu, hal ini dikarenakan kedua raja tersebut tidak pernah memproklamkan dirinya memakai gelar Sultan seperti yang dilakukan oleh Pangeran Ario Kesumo (Ki Mas Endi). Pada masa pemerintahan Ki Mas Endi / Pangeran Ario Kesumo Abdurrahim (1069-1118 H / 1659-1706 M). Ia secara tegas memakai gelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Imam. Selain memakai gelar Sultan Abdurrahman agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan dengan mengganti Kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, pada masa pemerintahannya ditemukan 2 jenis Koin Palembang yang tertulis “*Masruf Fi Balad Palembang Sanah 1091 H*”. (Dicetak di Negeri Palembang tahun 1091 H atau 1677 M), dan “*Al Sulthon fi Balad Palembang sanah 1113 H*”. (Sultan di Negeri Palembang Tahun 1113 H. atau 1699 M).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (SMB.I) 1136-1171 H / 1724-1758 M. dicetak Koin Kesultanan yang bertuliskan “*Khalifah fi Balad Palembang Darussalam Sanah 1162 H*” (Pemimpin di Negeri Palembang Darussalam tahun 1162 H). Yang bila diartikan secara meluas bahwa di Negeri Palembang Darussalam pada tahun 1162 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun 1784 Miladiah/Masehi dipimpin oleh seorang Pemimpin (Sultan). Pada masa SMB I koin dicetak dengan 2 bentuk yaitu Lingkaran penuh dan lingkaran dengan lubang ditengah-tengah.

Kemudian Koleksi koin Kesultanan Palembang Darussalam bertambah lagi ragamnya. Setelah ditemukan Koin yang dicetak pada tahun 1198 H. / 1784 M. yang bertuliskan "*Hadza Fulus Palembang sanah 1198 H*". (Inilah Uang Palembang dibuat Tahun 1198 H atau 1784 M) koin dicetak pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahuaddin 1190-1218 H. / 1776-1803 M. Adapun yang menjadi Ciri khas Koin selain tidak mencantumkan nama Sultan, hanya dicetak pada satu sisi saja (dicetak hanya sebelah) pada sebaliknya dibiarkan kosong atau polos .Sultan Muhammad Bahauddin adalah salah satu Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang paling sering mencetak uang, setidaknya tercatat sebanyak 7x (Enam kali). Berdasarkan hasil temuan yang ada bahwa Sultan telah mencetak uang pada tahun emisi sebagai berikut; tahun 1193 H. / 1779 M, 1198 H / 1784 M, 1200 H / 1786 M, 1201 H / 1787 M, 1202 H / 1788 M, 1203 H / 1789 M, 1211 H / 1797 M. Sultan Mahmud Badaruddin II naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 1803 M Ia mulai menerbitkan jenis mata uang baru 2 tahun kemudian (1219 H / 1805 M). Dengan bentuk Segi Delapan dan terdapat lubang pada bagian tengahnya, Bentuk ini mengingatkan kita dengan stempel SMB II yang juga berbentuk persegi Delapan. pada koin dituliskan *Masruf Fi Balad Palembang Sanah 1091 H*". (Dicetak di Negeri Palembang tahun 1219 H atau 1805 M) 20.

Hal ini menegaskan kembali apa yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra (2000 : 28), tentang empat hal yang ingin disampaikan oleh historiografi tradisional lokal: (1) Islam di Nusantara dibawa langsung dari Tanah Arab, (2) Islam diperkenalkan langsung oleh para guru atau juru dakwah "profesional", (3) orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah para penguasa, dan (4) sebagian besar para juru dakwah "profesional" datang di Nusantara pada abad XII dan XIII.

²⁰. Hasil penelitian Mujib menandakan bahwa proses intitusi social dan politik Islam dapat dibuktikan dari banyaknya bukti arkeologis, filologis dan sosio culture yang masih dapat dijumpai saat ini seperti Bangunan-bangunan pemukiman Arab masih utuh dan asli dan tidak berbaur dengan bangunan baru, adalah perkampungan Arab di Lorong Al Munawwar, Kelurahan 13 Ulu. Perkampungan Arab di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II terletak di tepi Sungai Musi dan tepi muara Sungai Ketemenggungan. Suku-suku yang didiaminya mayoritas adalah suku Al-Munawwar, yang menjadi nama lorong masuk utama perkampungan ini. Selain itu, masih ada suku Al-Habsyi, Al-Hadad, dan Al-Kaff. Rumah-rumah tinggal yang ada di kanan kiri lorong ini merupakan bangunan rumah dengan gaya arsitektur yang khas pada zamannya. Arab dan Islam meruakan dua hal yang tidak bias dilepaskan terhadap perjumpaan ideologi Islam dan Melayu di Nusantara ini. (Mujib , 2001:47),

E. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam didasarkan pada prinsip tradisional, yaitu adanya hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Artinya, sultan adalah orang yang mendapat kharisma dan legitimasi, yang memiliki kekuatan diri sebagai *gusti* dan *kawula* karena mendapat wahyu dari Tuhan. Sedangkan struktur pemerintahannya berbentuk feodalisme, yaitu sultan berperan sebagai pemimpin, priyayi pembantu perantara kekuasaan, dan juga sekaligus sebagai rakyat atau abdi kesultanan.

Wewenang pemerintahan sepenuhnya dipegang oleh sultan yang bertindak sebagai kepala eksekutif sekaligus kepala keagamaan, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dalam melaksanakan tugas harian pemerintahan, sultan dibantu oleh tiga orang eksekutif. *Pertama*, Pangeran Penghulu Nataagama yang bertugas dalam urusan keagamaan dan syariat Islam. *Kedua*, Pangeran Natadirajo, yaitu pembantu sultan dalam bidang pelaksanaan kebijaksanaan, hukum, dan ekonomi atau keuangan di ibukota dan mancanegara. Pangeran Natadirajo dibantu oleh Pangeran Citra sebagai hulubalang yang juga bertindak sebagai aparat keamanan. *Ketiga*, Syahbandar²¹, yaitu pembantu sultan yang bertanggung jawab dalam mengurus masalah perdagangan dan urusan luar negeri, seperti memungut bea dan cukai bagi kesultanan dan sultan, serta melaksanakan dan menjaga hukum laut Melayu. (Retno, 2002: 119).

Pemerintahan tersusun dengan adanya pembagian menurut wilayah dan hukum, yaitu ibukota kesultanan yang berupa keraton dan mancanegara yang berupa lingkungan di luar wilayah ibukota kesultanan. Pembagian wilayah mancanegara tidak didasarkan atas pertimbangan teritorial, namun lebih disebabkan karena faktor kegunaan atau manfaat wilayah tersebut. Atas dasar itulah, maka muncul wilayah-wilayah sebagaimana berikut:

²¹ Menurut Manarfa (1948:7) jabatan *kapita[lao]* dan *sabandara (syahbandar)* termasuk *pangka*, sedangkan Van den Berg (1939) dan Zahari (1977) berpendapat sebaliknya. Seorang *syahbandar* membawahi sekitar 20-40 *junubahasa* (Schoorl 2003:126 [#8]). Salah seorang *syahbandar* Pelabuhan (Lihat Suryadi 2007:176). Jabatan *syahbandar* amat penting karena peran Buton sebagai pelabuhan transit bagi kapal-kapal dagang lokal dan asing yang berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di bagian barat Nusantara (misalnya Surabaya dan Batavia) ke wilayah bagian timurnya (seperti Ternate dan Ambon). Di samping itu, jabatan ini penting, juga karena sumber nafkah orang Buton adalah perdagangan dan pelayaran dengan kepintaran yang cukup tinggi dalam membuat perahu dagang (Ligvoet 1878:9). Namun, seperti di beberapa kerajaan lokal lainnya di Nusantara, jabatan *syahbandar* Buton juga termasuk kursi “basah” dan sarat dengan penyelewengan (Schoorl 2003:103).

- 1) Sindang, yaitu wilayah yang dimanfaatkan sebagai batas Kesultanan Palembang agar warganya dapat mempertahankan daerahnya dari serangan dari luar. Warga di wilayah ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak atau pungutan tertentu.
- 2) Sikep, yaitu dusun atau marga yang secara khusus menjadi tanggung jawab golongan priyayi yang disebut dengan “*jenang*”. Hanya saja, kekuasaannya sebatas masa jabatannya saja. Sebagai golongan rakyat, pihak petani bisa diperkenankan untuk membuka tanah (*sikep*), namun harus membayar pajak atas tanah dan hasil pertanian. Meskipun demikian, baik golongan priyayi maupun rakyat petani, mereka sama-sama tidak berhak mewariskan jabatan dan tanahnya.
- 3) Daerah yang dikuasai langsung oleh sultan atau disebut dengan “*pungutan*”. Pajak tidak berlaku di wilayah ini, namun yang berlaku adalah “*siban*” dan “*tukon*”, yaitu semacam monopoli komoditi oleh sultan yang dijual kepada rakyat. Dikatakan sebagai bentuk monopoli karena memang harganya lebih tinggi dari pasaran di ibukota kesultanan. Dalam pajak model *tiban*, yang dibayarkan adalah hasil bumi, sedangkan dalam *tukon* adalah berupa uang. Dengan kata lain, pungutan tersebut sebagai ganti pajak terhadap rakyat yang menempati daerah ini. (Djohan Hanafiah, 1991, Amin, 1986).

Pada masa Kesultanan Palembang lama, pernah terkenal suatu lembaga elit yang disebut dengan istilah “*Fexo*” atau saudagar raja Melayu (*I.J. van Sevenhoven*, 1971: 42-45, *Blusse*, 1987:74). Kriteria orang yang masuk dalam lembaga ini adalah orang yang kaya (hartanya). Lembaga ini biasanya menempati posisi sebagai wakil sultan, seperti sebagai pembesar keraton atau sebagai pemimpin di beberapa distrik kesultanan. Proses penempatannya biasanya ditentukan atas dasar kemampuan yang dimilikinya. Lembaga ini merupakan sumber keuangan bagi sultan sehingga orang-orang yang termasuk dalam *fexo* mendapat kepercayaan dan kasih sayang dari sultan. Struktur sosial dan budaya penduduk dalam pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam terbagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- 1) Priyayi. Golongan ini merupakan turunan raja-raja (sultan-sultan) atau kaum ningrat. Kedudukan ini biasanya diperoleh atas dasar keturunan atau atas perkenan dari sultan sendiri.

- 2) Rakyat. Golongan ini terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok “*miji*” atau di daerah pedalaman disebut dengan istilah “*mata-gawe*”, yang mencakup seperti petani dan sebagainya. Kelompok ini biasanya menggalang orang-orang yang mau berperang bersama sultan atau melakukan pekerjaan tangan dan karya-karya seni. Setiap *miji* mempunyai sejumlah “*alingan*” (keluarga), yang tugasnya adalah membantu pekerjaan *miji*. *Kedua*, kelompok “*senan*”, yaitu golongan rakyat yang lebih rendah dari *miji*, namun memiliki keistimewaan tersendiri. Maksudnya, kelompok ini tidak boleh dipekerjakan oleh siapapun kecuali hanya untuk sultan, misalnya membuat atau memperbaiki perahu-perahu dan rumah-rumah sultan atau mendayung perahu untuknya. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam runtuh, banyak hal yang mulai luntur seiring perkembangan zaman. Misalnya, corak Kota Palembang yang dulunya lebih bernuansa Islam kini sudah tidak kentara lagi. Di samping itu, kota ini mengalami perubahan yang cukup pesat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebab, banyak penduduk dari berbagai daerah di Sumatra Selatan yang datang ke Palembang untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Perbedaan karakteristik lingkungan fisik Palembang ini lazimnya disebut daerah aliran dan uluan yang dipergunakan untuk membedakan antara kawasan dataran rendah dan kawasan dataran tinggi di sekitar aliran sungai-sungai yang banyak mendominasi daerah Karesidenan Palembang. Istilah aliran dan uluan tidak hanya membedakan kondisi geografis saja, melainkan juga menyangkut beberapa khas lainnya, seperti tercermin baik dalam sosio-ekonomi maupun kultur politiknya. Dasar pemisahan antara kedua kawasan itu pada prinsipnya berdasarkan pada tradisi adat setempat, yang dapat diartikan sebagai atura-aturan normatif yang menentukan bentuk perilaku individu dan masyarakat yang mempengaruhi cara hidup mereka selaku anggota masyarakat. Adat juga merupakan kunci mekanisme sosial yang dipelihara bersama secara turun-temurun. Kedua istilah aliran dan uluan ini jelas terlihat dalam sistem ketatanegaraan dalam zaman kesultanan, yang membedakan kawasan ini sebagai daerah Kepungutan dan Sindang.

Secara etimologi daerah Kepungutan berasal dari kata pungut, mengacu kepada daerah aliran, di daerah sultan dan para pembesar kesultanan berkuasa secara langsung

serta berhak menyelenggarakan bermacam jenis pungutan baik berupa pajak maupun tenaga kerja terhadap rakyatnya. Daerah Kepungutan yang berpusat di kota Palembang merupakan suatu tipe masyarakat perairan sungai dan lebih berorientasi pada perdagangan, yang mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan daerah uluan.

Kasultanan Palembang berpusat di kota Palembang, sekaligus merupakan bandar pelabuhan sehingga tidak mengherankan jika masyarakatnya sangat heterogen. Bermacam kelompok etnik asing seperti Cina, Arab, dan Eropa turut aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membedakan antara kawasan iliran dan uluan. Bentuk kemakmuran kesultanan juga berupa berkembangnya bidang kesenian dan kesusasteraan pada saat itu. Dalam kurun waktu 1750-1800, Kesultanan Palembang Darussalam pernah menjadi pusat sastra Melayu setelah Kesultanan Aceh yang menjadi pusat kesusasteraan sebelumnya mengalami masa stagnasi.

Pada masa kepemimpinan Prabu Anom, Kesultanan Palembang Darussalam berada di bawah kontrol kekuasaan Belanda. Pada tahun 1823, ia melakukan pemberontakan kepada Belanda karena kontrak yang dibuat pihak kolonial sangat merugikan kedudukannya sebagai sultan. Pada tahun ini pula ia sudah tidak lagi memimpin kesultanan karena dipecat oleh Belanda dan pada tahun 1925 ia baru bisa ditangkap yang menyebabkan dirinya dibuang ke Manado. Pemerintah Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1925.

Pemerintah Belanda sebenarnya berharap bahwa Kesultanan Palembang Darussalam masih tetap eksis. Berdasarkan pengakuan dari keluarga keturunan Sultan Badaruddin II di Ternate yang diteliti oleh seorang budayawan, Djohan Hanafiah, pihak Belanda pernah menawarkan kepada Sultan Badaruddin II agar mau memimpin kembali. Namun, Sultan Badaruddin II menolak secara tegas. Alasannya, ia tidak ingin terjadi perpecahan. Ia pun berpesan agar sebaiknya Kesultanan Palembang Darussalam dibubarkan saja.

F. SEJARAH SUKSESI RAJA DAN SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM

Retno (2002) menyatakan bahwa sistem penggantian raja-raja yang ada di Indonesia tampaknya sudah dibakukan sedemikian rupa dalam bentuk tradisi dan adat masing-masing. Meskipun demikian, sejarah juga mencatat seringnya terjadi konflik di

antara para elit kerajaan pada saat proses penggantian raja. Apalagi jika raja yang memerintah sebelumnya tidak menunjuk calon penggantinya atau belum mengangkat putra mahkota. Intrik di antara para pangeran seringkali mewarnai proses penggantian raja, yang tidak jarang berbuntut pada kematian pada kematian salah satu diantaranya. Hal seperti itu juga berlaku untuk kerajaan atau Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk menyelusuri proses penggantian raja-raja dan sultan di Palembang dapat dilihat dalam buku “Het Sultanaat Palembang” yang disusun oleh Woelders berdasarkan beberapa naskah yang disimpan di Leiden Belanda. Naskah tersebut diberi Kode Teks UBL 4 - 7, TR-1, TR- 3 dan Teks KI-4 (Woelders, 1975).

Susunan raja-raja dan para sultan yang memerintah di Palembang juga termuat pada tabel 1 yang disusun oleh Husni Rahim dengan mengacu pada berbagai sumber (Rahim, 1998). Dari susunan tersebut terlihat adanya perbedaan, karena tabel yang dibuat oleh Husni Rahim dirunut mulai dari Aria Dilah, sementara yang lainnya dimulai dari Ki Gede Ing Suro. Namun dari naskah-naskah lama yang disusun oleh Woelders tampak juga adanya perbedaan, utamanya dalam masa kekuasaan para raja dan sultan saat memerintah. Meskipun demikian, naskah-naskah itu semuanya mencantumkan nama Ki Gede Ing Sura sebagai penguasa pertama di Palembang. Meskipun sebagai cikal bakal genealogi tidak selalu sama. Teks UBL - 6 (*Kitab Toeroenan Radja-radja di dalam negeri Palembang*), misalnya menyebutkan bahwa genealogi raja-raja Palembang dimulai dari Sayyidina Husin.

Perbedaan lama kekuasaan atau tahun masa kekuasaan para raja dan sultan yang memerintah, tentunya dapat dikaitkan dengan masa penulisan naskah-naskah tersebut yang semuanya berasal dari setelah kesultanan Palembang dihapuskan. Teks UBL 4 - 6 ditulis pada tahun 1851; sementara teks UBL - 7 ditulis antara tahun 1863 - 1880 (Woelders, 1975). Mengenai proses penggantian kekuasaan di Palembang sejak masa pemerintahan Ki Gede Ing Suro sampai dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam oleh pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1823. Dalam naskah-naskah kuna Palembang yang terangkum dalam buku “Het Sultanaat Palembang” dan tradisi lisan masyarakat Palembang diketahui bahwa yang berkuasa di Palembang pertama kali ialah Ki Gede Ing Sura Tua. Menurut kajian Graff dan Pigeaud, Ki Gede Ing Sura Tua dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede

Ing Sura Tua merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintahan di Palembang pada tahun 1541.

Angka tahun ini diperoleh Graff dan Pigeaud berdasarkan catatan de Kock (Graff dan Pigeaud, 2001: 337). Hal ini berbeda dengan catatan Sturler yang menyebut angka tahun 1549 sebagai angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura Tua di Palembang (Sturler, 1843). Angka tahun ini ternyata disetujui oleh Graff dan Pigeaud, karena pada tahun 1541 Sultan Trenggono masih berkuasa di Demak. Terlepas dari perbedaan angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura tersebut, yang jelas tokoh ini tidak pernah dimakamkan di Palembang, karena ia meninggal saat dalam pelayaran kembali ke Jawa. Menurut Husni Rahim masa kekuasaan Ki Gede Ing Suro 21 tahun. Husni Rahim juga menyebutkan bahwa sebelum Ki Gede Ing Sura pernah berkuasa Pangeran Sido Ing Lautan yang masa kekuasaannya berlangsung selama 5 tahun. Sementara menurut teks TR. 1 masa kekuasaannya adalah 22 tahun.

Jika melihat masa kekuasaannya yang lama, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kondisi Palembang stabil. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika sebelum kembali ke Jawa, dia sudah memberi mandat kepada saudaranya, Ki Gede Ing Sura Muda untuk melaksanakan pemerintahan di Palembang. Tokoh ini memerintah Palembang sejak tahun 1572 - 1589 atau selama 17 tahun. Angka tahun yang disebutkan oleh Husni Rahim ini ternyata berbeda dengan yang terdapat dalam teks TR. 1. karena menyebutkan masa kekuasaannya hanya satu tahun, yaitu mulai tahun 968 Hijriah. Ki Gede Ing Sura Muda inilah kemungkinan yang membangun kompleks pemakaman di Gedingsuro. Tokoh ini juga dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Ilir atau Kyai Mas Anom Adipati Ing Suro. Jika Ki Gede Ing Suro Ilir baru diganti pada tahun 977 Hijriah, maka seharusnya masa kekuasaannya sekitar 9 tahun, bukannya satu tahun. Perbedaan lama kekuasaan Kemas Depati yang disusun oleh Husni Rahim dan TR. 1 adalah 7 tahun.

Masa kekuasaan antara 9 - 17 tahun tidak dapat dikatakan singkat, karenanya Ki Gede Ing Suro Ilir kemudian menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yaitu Pangeran Kemas Dipati (1589-1594), sehingga lama kekuasaannya hanya lima tahun. Angka tahun ini ternyata juga mengalami perbedaan dengan yang tercantum pada teks TR. 1., karena menyebutkan angka tahun 977 Hijriah sebagai awal masa pemerintahannya dan baru

diganti tahun 989 Hijriah atau berkuasa selama 12 tahun. Terlepas dari perbedaan masa kekuasaan tersebut, yang jelas pada tahun 1595 kekuasaan berpindah tangan kepada saudaranya yaitu Pangeran Madi Angsoka (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang memerintah sekitar tahun 1594-1627 atau sekitar 34 -35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka ini terjadi perang “kafir” dengan Bantam. Lamanya masa pemerintahan Madi Angsoka (34-35 tahun) menunjukkan kondisi perekonomian dan perpolitikan di masa itu yang relatif stabil dan aman.

Ketika Pangeran Madi Angsoka wafat terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman isterinya (saudara Pangeran Madi Angsoka) dan kemenangan di pihak paman. Meskipun demikian yang menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit (anak Ki Gede Ing Suro Mudo) yang disebut Raja Depati (1629-1630). Pangeran Madi Alit hanya berkuasa selama satu tahun dan beliau mati terbunuh karena perkara wanita (Faille 1971: 14). Pangeran Madi Alit kemudian digantikan oleh saudaranya Pangeran Seding Puro atau juga disebut Pangeran Made Sokan yang dikenal dengan Raden Aria yang merupakan anak Kyai Mas Adipati dan memerintah sekitar tahun 1629-1636. Masa kekuasaan Raden Aria yang hanya tujuh tahun terhitung singkat, tapi mengingat sebutannya Pangeran Seding Puro (artinya meninggal di Pura atau kraton), maka kematiannya kemungkinan disebabkan karena karena sakit yang telah lama diderita selama masa pemerintahannya, oleh karena itu ada kemungkinan sebelum wafat masih sempat meninggalkan wasiat dan menunjuk seseorang untuk pengganti dirinya sebagai penguasa di kerajaan Palembang.

Raden Aria kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Isteri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang (*Ibid.*, hlm. 21). Pada masa pemerintahan Pangeran Seding Kenayan ini sempat terjadi ketegangan dengan pihak Belanda di Batavia berkaitan dengan pelanggaran kontrak yang dilakukannya pada tanggal 20 Oktober 1642 yang menguntungkan pihak Belanda. Pangeran Sedo Ing Kenayan tidak memenuhi isi kontrak dan menaikkan harga lada pada tahun 1647, sehingga Belanda tidak memperoleh keuntungan dari monopolinya (Rahim, 1998: 73). Meskipun terjadi “ketegangan” dengan Belanda tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu tidak berpengaruh banyak dan relatif stabil, sehingga dapat memerintah selama kurun waktu

16 tahun. Pada masa pemerintahan inilah “lahir” *Undang-Undang Simbur Cahaya*, yang oleh masyarakat Palembang diyakini merupakan hasil karya Ratu Sinuhun (istri Pangeran Sido Ing Kenayan). Kestabilan masa pemerintahan Seding Kenayan juga didukung fakta bahwa dia diganti setelah meninggal.

Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Seding Pesariyan (1652-1653) yang kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Seding Rajak (1653-1660). Jika melihat dari julukannya Pangeran Seding Pesariyan (artinya Pengeran yang meninggal di Pesariyan=tempat tidur), maka masa kekuasaan yang singkat tersebut diduga disebabkan karena raja ini meninggal secara mendadak. Langkah Pangeran Sedo Ing Kenayan yang berani melawan Belanda ternyata juga diikuti oleh penerusnya yaitu Pangeran Seding Rajak yang pada tahun 1657 menangkap dua buah kapal Belanda di perairan Sungai Musi (*Ibid.* : 74). Karena sikap Palembang yang melawan itulah, akhirnya Belanda menyerang dan membakar kraton Kuto Gawang pada tahun 1659, sehingga Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke Inderalaya dan meninggal dunia di sana. Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Ilir. Kedudukannya digantikan oleh Raden Tumenggung atau Ki Mas Endi Ario Kesumo yang kemudian dikenal dengan Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan Susuhunan Cinde Walang.

Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri. Ki Mas Endi menggunakan gelar sultan yang lengkapnya menjadi Sultan Abdurrahman *Khalifatul Mukminin Sayidul Imam*. Sebagai sultan pertama Palembang ia telah mendirikan kraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde Walang. Pengangkatan ini disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian antara Palembang dan Belanda pada tahun 1662. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda diijinkan kembali untuk mendirikan loji dan gudang di tempat yang strategis dan dekat sungai. Loji tersebut dikenal dengan *Loji Sungai Aur* dan letaknya berhadapan dengan Istana Beringinjanggut (*Ibid.*).

Setelah Sultan Abdurrahman yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam adalah Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago yang memerintah pada tahun 1706 – 1714. Pada tahun 1709 ia menobatkan putera sulungnya yaitu Raden Abubakar sebagai putera mahkota dengan gelar Pangeran Ratu Purboyo. Meskipun demikian, putera

mahkota ini tidak sempat menjadi raja karena wafat . Oleh karena itu kemudian adiknya Raden Uju, sebagai penggantinya dan dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Raden Uju kemudian dinobatkan sebagai sultan ketiga di Palembang dengan gelar Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno yang memerintah antara tahun 1714 sampai tahun 1724 (10 tahun).

Tampaknya proses penggantian ini tidak bisa diterima oleh para elit kraton lainnya, yang ditandai dengan adanya perselisihan antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo tentang siapa yang lebih berhak menjadi sultan. Atas permintaan Sultan Komaruddin, Belanda mengirimkan suatu ekspedisi ke Palembang di bawah pimpinan Willem Daams. Ekspedisi ini berhasil mengusir pangeran Mangkubumi dan memperkuat kedudukan Raden Lambu sebagai calon pengganti sultan.

Dua tahun setelah penandatanganan kontrak tersebut, Raden Lambu Pangeran Mangkubumi Jayowikramo diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo atau Sultan Mahmud Badaruddin I. Masa pemerintahannya berlangsung mulai tahun 1724 sampai tahun 1758. Pada tanggal 10 September 1755 terjadi pembaharuan kontrak 2 Juni 1722, yang ditandatangani oleh Paravicini dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayowikramo. Dengan terjadinya perjanjian tersebut berimbas pada kestabilan politik pada masa pemerintahannya sehingga dapat mencapai 34 tahun. Hal ini ditandai dengan dibangunnya kraton Kuto Batu (Kraton Kuto Lamo)

Pada tahun 1758 kekuasaan berpindah kepada anak sulungnya yaitu Pangeran Adi Kesumo, setelah menjadi sultan bergelar Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang berkuasa dari tahun 1758 - 1776. Seperti pendahulunya, pada masa inipun terjadi pembaharuan kontrak dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1763. Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo kemudian digantikan oleh putra sulungnya dengan gelar Sultan Muhammad Bahauddin (1776 - 1803). Pada masa pemerintahannya dilakukan penobatan putra sulungnya Raden Hasan sebagai putra mahkota, pewaris tahta kesultanan, bergelar Raden Hasan Pangeran Ratu. Sultan Muhammad Bahauddin membangun Kuto Besar yang dilengkapi dengan taman dan rumah dan kemudian menempatkannya pada hari Senin tanggal 23 bulan Sya'ban tahun 1211 Hijriah (21

Februari 1797 Masehi). Pangeran Ratu kemudian menempati Kuto Lamo yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.

Menurut buku yang disusun oleh Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kotamadya Palembang pada tahun 1984, yang berjudul “ Sultan Mahmud Badaruddin II” disebutkan bahwa menurut ketentuan yang berlaku maka putra sulung dari seorang raja adalah putra mahkota dan merupakan pewaris tahta yang sah. Meskipun demikian, penetapannya sebagai sultan tetap harus mendapat persetujuan dari hasil musyawarah yang terdiri dari para pembesar istana dan para alim ulama. Berdasarkan musyawarah tersebut pada April tahun 1804 Raden Hasan Pangeran Ratu dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II; sementara Sultan Muhammad Bahauddin bergelar Susuhunan Muhammad Bahauddin. Dari naskah kuna diketahui bahwa sultan berkedudukan di Kraton Lama atau Kraton Kuto Batu, sementara Susuhunan berkedudukan di Benteng Kuta Anyar atau Benteng Kuto Besar.

Pada saat yang bersamaan adik Raden Hasan Pangeran Ratu, yakni Raden Husin Pangeran Adi Menggalo diangkat menjadi Pangeran Adipati Negara sebagai pelaksana harian pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II terjadi pembumihangusan loji Belanda di Sungai Aur pada tanggal 14 September 1811, yang dikenal dengan *Peristiwa Sungai Aur*. Peristiwa ini menandai kemerdekaan Palembang yang telah lama di bawah kekuasaan Belanda. Namun tidak lama setelah itu, yakni pada tanggal 20 Maret 1812 Gubernur Jenderal Raffles mengirim ekspedisi militer ke Palembang, kemudian menyerang Palembang dan berhasil mendudukinya, sehingga Sultan Mahmud Badaruddin II mengundurkan diri ke Muara Rawas setelah menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada adiknya Pangeran Adipati Menggalo Husin Diauddin dan memerintahkan untuk tetap berada di Palembang (Anonim, 1984: 29-30). Raden Muhammad Husin Diauddin diangkat menjadi sultan oleh Inggris dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II (1912-1813) (Rahim, 1998: 80). Pengangkatan itu dimaksudkan untuk mengadu domba antara kakak dan adik.

Belanda mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan pada tanggal 13 Juli 1813 sampai 14 Agustus 1813 (sekitar satu bulan). Pada tanggal 14 Agustus 1813 sampai 23 Juni 1818 Inggris menurunkan Sultan Mahmud Badaruddin II dan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai penguasa Palembang. Di sisi lain

pernah juga terjadi kedua kakak beradik ini memerintah bersama sama, yaitu antara 23 Juni 1818 sampai 30 Oktober 1818. Sultan Ahmad Najamuddin II berkuasa di Kraton Kuto Lamo sebagai sultan muda; sementara Sultan Mahmud Badaruddin II berkuasa di Benteng Kuto Besar sebagai sultan tua.

Pada masa kekuasaannya kali ini, yaitu pada tahun 1819 Sultan Mahmud Badaruddin II menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (Sultan Ahmad Najamuddin III). Pada saat yang bersamaan Sultan Mahmud Badaruddin II bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin. Pada tanggal 1 Juli 1821 keraton diduduki oleh Belanda dan tanggal 3 Juli 1821 Susuhunan Mahmud Badaruddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu ditangkap dan dibuang ke Ternate. Tanggal 26 November 1852 Susuhunan Mahmud Badaruddin wafat, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu wafat tahun 1860.

Untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Palembang, Belanda memanggil kembali Sultan Ahmad Najamuddin II dan anaknya dari pengasingannya di Cianjur. Pada tanggal 16 Juli 1821 - 19 September 1825 Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi sultan Palembang oleh Belanda, sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II bergelar Susuhunan Husin Diauddin. Pada tanggal 22 November 1824 Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dengan sepengetahuan ayahnya memberontak terhadap Belanda, yang menyebabkan ditangkapnya Susuhunan Husin Diauddin dan dibuang ke Batavia dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1825. Sementara Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom baru berhasil ditangkap oleh Belanda pada tanggal 15 Oktober 1825 dan tanggal 19 Oktober 1825 dibuang ke Banda dan lalu ke Menado dan wafat di sana pada tahun 1844 (*Ibid.* Hlm. 287-289). Sebagai akhir dari Kesultanan Palembang adalah dengan dihapuskannya kesultanan dan diserahkan pemerintahannya atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut dapat dibaca dalam maklumat penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada pemerintah Belanda sebagai (Rahim, 1998: 81-82),

Menurut Husni Rahim penghapusan Kesultanan Palembang terjadi sekitar tanggal 18 Agustus 1823, yaitu tanggal penandatanganan maklumat perjanjian penyerahan kekuasaan sekaligus penghapusan Kesultanan Palembang (*Ibid.*) Di Nusantara

umumnya entitas atau masyarakat politik (*political entity*) disebut kerajaan. A.C. Milner menyebutnya sebagai "kondisi memiliki seorang raja". Entitas politik Islam ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari entitas politik pada masa pra-Islam, di mana raja mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sering dipandang sebagai *bodhisattva* alias pribadi yang tercerahkan.

Dan kedatangan Islam tampaknya tidak mengubah esensi entitas politik tersebut, khususnya mengenai raja dan kerajaan, karena konsepsi konsepsi di sekitar soal ini tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan telah mendapatkan legitimasi dari para ulama sendiri. Sebagai akhir dari Kesultanan Palembang adalah dengan dihapuskannya kesultanan dan diserahkan pemerintahannya atas Negeri Palembang dan rakyat Palembang ke tangan Belanda. Penyerahan kekuasaan tersebut dapat dibaca dalam maklumat penyerahan kekuasaan Sultan Palembang kepada pemerintah Belanda sebagai berikut :

“Bahwa inilah surat berita undang-undang. Bahwa Sri Paduka Ratu Ahmad Najamuddin sultan dari negeri Palembang kasih selamat kepada siapa yang melihat atau mendengar bacanya. Bahwa seperti perjanjian yang terbuat dari segala keridaan dari kedua pihak, yaitu antara Gubernemen Nederland dan antara kita Sri Paduka Tuan Sultan supaya membaiki nasibnya rakyat rakyat kita, maka demikian yang dari waktu ini segala titah dan pemerintahan atas negeri Palembang dan atas rakyat rakyat sekalianya dipeganglah oleh gantinya Gubernemen adanya. Adapun kita Sri paduka Tuan Sultan akan duduk di dalam bicara yang menimbang hukuman kesalahan dan ... (tidak terbaca) dunianya. Dan dari hal agama itulah akan diputuskan oleh pangeran penghulu menurut hukum di dalam Alquran; dan apabila tiada menerima putusan penghulu itu, bolehlah ... (tidak terbaca) bicara pada kita. Bahwa segala pemerintahan dari juga-juga dan dari ... (tidak terbaca) atau hasil hasil itulah dipegang oleh gantinya gubernemen adanya. Bahwa kita Sri Paduka Tuan Sultan akan memakai kemuliaan dan hormat kita (tidak terbaca) senantiasa ada mengerjakan itu dengan segala rajin, istimewa supaya menolong pada menjalankan segala aturan dari pemerintahan gubernemen adanya. Bahwa kita berjanji dengan sesungguhnya akan menolong pada menjalankan ketentuan itu demikian adalah menitahkan yang segala priayi dan mantra mantra dan rakyat dari negeri, menjunjung titah dan perintah yang akan diberi oleh gantinya, gubernemen adanya; Bahwa Gubernemen Nederland telah tetapkan dari pada kita punya kehidupan dan bagi kehidupan priayi-priayi dan mantra mantra maka demikian kami tidak dapat lagi pungut hasil dan tidak lagi ...(tidak terbaca) deperti dahulu adanya; Bahwa haruslah yang segala orang yang memegang piagam penyerahan dia kepada gantinya gubernemen yang itu segala piagam yang terberi oleh kita atau oleh Rraja-raja Palembang zaman dahulu adanya. Maka hendaklah diserahkan piagam itu dengan selekas dan yang segala kepala pasirah dan kepala-kepala dusun dan yang lain-lainnya dengan segeranya

sampai kehadapan gantinya gubernemen. Supaya mendengarkan titahnya dari hal piagam-piagam dan dari yang menjadi (tidak terbaca) pada kemudian adanya. Supaya mengetahuilah di dalam seluruh negeri, maka dibaca dan dilekatkan ini surat berita dan disalin dia supaya tertunjuk di tanah uluan dan uluan adanya. Dan terberi oleh kita Sri Paduka Tuan dari Negeri Palembang kepada hari Isnen sebelas hari bulan Zulhijah tahun seribu dua ratus tiga puluh delapan adanya". (Rahim, 1998: 81-82).

Dari paparan tersebut dan data sejarah mengenai para raja dan sultan yang pernah memerintah di Palembang Darussalam dapat diketahui bahwa tidak ada aturan atau hukum yang baku tentang proses penggantian atau pewarisan tahta pada masa Kerajaan Palembang. Dengan kondisi seperti ini rawan terjadinya konflik, karena masing-masing tokoh merasa berhak atas tahta kerajaan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terlihat adanya ketidakaturan garis keturunan dalam hal pewarisan kekuasaan, sehingga muncul saudara-saudara muda atau bahkan adik dari pihak permaisuri bisa menduduki tahta kerajaan atau kesultanan. Hal ini terlihat dari proses suksesi dari masa pemerintahan KI Gede Ing Sura Tua sampai Pangeran Sedo Ing Kenayan, yaitu sejak tahun 1552 - 1652. Selama kurun waktu 100 tahun telah terjadi pergantian kekuasaan di Palembang 10 kali. Dari sepuluh raja tersebut, hanya empat orang raja yang berkuasa lebih dari sepuluh tahun, yaitu Ki Gede Ing Sura Tua 26 tahun; Ki Gede Ing Sura Muda 17 tahun; Pangeran Madi Ing Angsoka 34 tahun dan Pangeran Sedo Ing Kenayan 11 tahun, selebihnya berkuasa kurang dari sepuluh tahun.

Bahkan ada dua orang raja yang berkuasa hanya sekitar satu tahun, yaitu Pangeran Madi Alit dan Pangeran Sedo Ing Kenayan. Selain raja-raja tersebut, Kyai Mas Adipati hanya berkuasa selama 5 tahun; Pangeran Sido Ing Puro 9 tahun; dan Pangeran Sedo Ing Rajek 7 tahun. Konflik intern para elit kesultanan Palembang ini juga dipicu oleh persaingan antara saudara seayah lain ibu untuk memperebutkan kekuasaan. Isteri para raja yang lebih dari satu merupakan salah satu pemicu timbulnya konflik intern di kalangan keluarga raja Palembang (Retno, 2004: 34).

Keadaan ini baru dapat teratasi sejak Kyai Mas Hindi atau Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim memproklamasikan pembentukan Kesultanan Palembang dan terlepas dari Mataram. Hal ini tampak dari penunjukkan putra mahkota, yang tidak lain adalah anak pertama sultan dengan permaisuri. Putra mahkota ini diberi gelar Pangeran Ratu Meskipun aturan tertulis mengenai hak pewarisan tahta sebelum Sultan Mahmud

Badaruddin II belum diketahui sumber tekstualnya, namun dari naskah-naskah lama Palembang dapat diketahui bahwa sebelum sultan yang berkuasa meninggal atau turun tahta, dia telah mengangkat seorang putra mahkota dengan gelar Pangeran Ratu. Penobatan sebagai putera mahkota tersebut, bahkan sering juga dilanjutkan dengan penobatan yang bersangkutan sebagai sultan baru lengkap dengan gelarnya.

Sementara itu, sultan yang lama masih tetap memerintah, tetapi kemudian mengambil gelar “Susuhunan”. Walaupun sultan baru sudah diangkat, tidak berarti “sultan lama” yang bergelar susuhunan langsung “lengser keprabon” atau turun dari tahta, sehingga tidak memegang kendali pemerintahan lagi. Berdasarkan sumber tekstual, ternyata yang terjadi justru sebaliknya, Susuhunan tetap berkuasa penuh berdampingan dengan sultan yang baru saja dinobatkan.

Hal ini juga diperkuat dengan stempel kesultanan Palembang peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berangka tahun 1819 Masehi (1234 H). Pada saat mengeluarkan stempel Sultan Mahmud Badaruddin II sudah meletakkan tahtanya dan menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu. Setelah menobatkan anaknya Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian mengambil gelar susuhunan, seperti yang tertera pada stempel (Retno, 2002: 119).

Di sini justru tampak adanya proses “pembelajaran” bagi pejabat sultan baru dalam soal “kepemimpinan” ataupun pemerintahan sebelum susuhunan melepaskan diri secara penuh sebagai penguasa kesultanan. Atau dalam istilah mutakhir “kaderisasi”. Bukan itu saja, dari sumber tekstual juga diperoleh informasi, bahwa sejak digunakannya Benteng Kuto Besak, maka Putera Mahkota menempati Benteng Kuto Lama, sementara sultan lama atau susuhunan tinggal di Benteng Kuto Besak. Ternyata, perbedaan lokasi bermukim dan masih tetap berkuasanya susuhunan, pada masa kemudian justru dimanfaatkan oleh pihak Belanda dan Inggris untuk lebih memperkeruh proses pengambilalihan kekuasaan (suksesi) di lingkungan kraton Kesultanan Palembang dengan cara mengadu domba di antara keduanya. Usaha ini berhasil baik sehingga dalam masa sebelas tahun, Inggris dan Belanda berhasil mengangkat dan menurunkan kedua adik kakak tersebut sebanyak 6 kali sampai dengan dihapuskannya kesultanan Palembang.

Proses penggantian raja di Palembang baru ditemukan rujukannya pada salah satu naskah kuna “Hikayat Palembang” (Teks UBL 7) yang sekarang tersimpan di Museum Leiden, Belanda menyebutkan tentang proses pengangkatan seorang raja sebagai berikut:

“Adapun cerita dari segala raja-raja yang memerintah diatas tahta kerajaan negeri Palembang itu, terlalu banyak fasal ia berganti-ganti menjadi raja diatas tahta kerajaan memerintah didalam negeri Palembang. Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja dan adakalanya dengan sebab perang dan adakalanya daripada sebab wasiat, yakni pesan. /Tatkala masanya raja lagi hidup, berwasiat kepada sekalian punggawa menteri dan orang besar-besar sekalian dengan sumpah: “Jikalau aku mati, sianu yang akan mengganti aku; tiada aku sukai anakku mengganti akan menjadi raja”. Demikianlah yang dikerjakan oleh segala punggawa menteri dan sekalian orang didalam negeri Palembang sepertimana yang wasiat itu juga. Dan adakalanya dengan sebab berperang dengan orang putih, yaitu Holanda. Dan apabila alah daripada perang itu, Raja Palembang undur di hulu, tiada lagi mau ilir di Palembang, menyuruh saudaranya menjadi ganti jadi raja diatas tahta didalam negeri Palembang menahan bicara orang Putih”. (Woelders, 1921: 74).

Berdasarkan naskah yang ditulis antara tahun 1863 - 1880 (*Ibid.*; 49) tersebut dapat diketahui bahwa proses pergantian raja di kerajaan Palembang Darussalam bisa bermacam-macam, namun satu hal yang harus dicatat adalah kalimat “*Adakalanya dengan aturan betul diganti anaknya menjadi raja ...*”. Kalimat ini menegaskan adanya semacam aturan baku tentang proses pergantian raja yang dianggap sah dan mempunyai legitimasi yang kuat, yaitu bahwa penggantinya adalah anak raja yang memerintah sebelumnya. Meskipun dalam kalimat tersebut tidak menyebutkan anak raja yang mana yang berhak menggantikan raja sebelumnya, namun dari naskah itu juga dapat diketahui bahwa sebelum raja yang berkuasa turun tahta atau meninggal dunia, terlebih dahulu mengangkat putra mahkota dan diberi gelar Pangeran Ratu. Gelar putra mahkota ini pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Husin Diauddin bergelar Prabu Anom, karena gelar Pangeran Ratu sudah digunakan oleh putra mahkota yang diangkat oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Di sisi lain, dari penggalan kalimat dalam naskah tersebut dapat dipastikan bahwa raja yang berkuasa sebelumnya punya otoritas yang tinggi untuk menetapkan penggantinya, meskipun lewat pesan atau surat yang berbentuk wasiat.

Hasil musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, yang menginginkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapan syarat kesulthan Palembang Darussalam untuk

kepentingan sejarah , maka musyawarah adat kemudian menyusun suatu rancangan yang berisi pedoman atau syarat-syarat menjadi sultan. Adapun isi pedoman atau persyaratan-persyaratan sebagai sultan Palembang adalah sebagai berikut (Siregar, 2004: 73-74):

- 1) Beragama Islam, termasuk keluarganya.
- 2) Dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (diutamakan dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II).
- 3) Mempunyai bukti Amanah (berupa benda-benda peninggalan dari sultan-sultan Palembang Darussalam).
- 4) Dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya.
- 5) Dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam.
- 6) Peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
- 7) Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengrusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.
- 8) Berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat.
- 9) Bertempat tinggal di Palembang, mengenal negeri Palembang.
- 10) Berpendidikan yang tinggi minimal SMA.
- 11) Berpengalaman dalam berorganisasi.

Djohan Hanafiah salah satu tokoh Pemerhati Sejarah dan Budayawan Palembang justru memberikan persyaratan yang berbeda. Ia mengemukakan bahwa kriteria menjadi sultan adalah genealogi, geografis, simbol-simbol kerajaan dan pengakuan dari masyarakat (Siregar, 2004: 69). Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Mustofa Al-Azhari, seorang ulama Palembang, Rahmawati Siregar menyebutkan bahwa untuk menentukan seseorang berhak menjadi sultan, tidak hanya dilihat dari faktor genealogi, wilayah, kekuasaan dan pengakuan masyarakat saja, melainkan juga harus dilihat dari segi kepemilikan pesan-pesan khusus dari para leluhur. Artinya yang menjadi sultan adalah orang pilihan dari leluhur. Dan juga didukung oleh legitimasi informal diperoleh seseorang karena kapasitasnya dalam sesuatu bidang dianggap mumpuni oleh masyarakat, misalnya “kyai” untuk ulama. Legitimasi informal ini bisa dilihat dari penerimaan masyarakat sekitar pada yang bersangkutan secara luas dan tanpa pamrih.

Berdasarkan paparan mengenai konsep Negara dan kedudukan raja di atas kaitannya dengan proses penggantian kekuasaan, maka dapat dijelaskan bahwa secara garis besar ada tiga unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang sultan agar kekuasaannya mempunyai legitimasi dan kredibilitas, yaitu genealogis, geografis dan simbol-simbol atau tanda-tanda kebesaran kerajaan (Regalia) yang biasanya merupakan warisan dari para pendahulunya. Tanpa ketiga unsur tersebut legitimasi kedudukan seorang raja menjadi lemah dan rawan pemberontakan. Memang dalam salah satu persyaratan pengangkatan seseorang menjadi sultan adalah kepemilikan benda-benda pusaka umpamanya :

- Tongkat Sultan Mahmud Badaruddin II yang dipakai jika sultan berperang
- Stempel kesultanan Palembang Darussalam
- Istambul (kalung yang berisikan Al-Quran kecil) dari tembaga
- Baju berupa jubah Sultan Mahmud Badaruddin II
- Naskah kuna yang ditulis Sultan Mahmud Badaruddin II
- Naskah kuna zuriat kesultanan

Menurut tradisi, yang disebut benda pusaka kesulthanan (regalia) adalah benda-benda yang dimiliki oleh suatu kerajaan sejak awal berdirinya (raja/sultan pertama), dan benda tersebut diwariskan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Lebih dari itu, benda-benda pusaka tersebut menjadi simbol legitimasi raja yang dinobatkan dan lambang kedaulatan kerajaannya. Bahkan benda-benda regalia ini menjadi bagian terpenting dari ritual pengangkatan seorang raja. Benda pusaka (regalia) ini umum ditemukan pada kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara (Geldern, 1982).

G. ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERGANTIAN SULTAN

Setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya wilayah Palembang mengalami kekosongan pemerintahan selama kurang lebih seratus tahun. Pemerintahan baru muncul pada abad ke enam belas . Ki Gede Ing Suro dianggap sebagai pendiri Kerajaan Palembang yang berkuasa pada abad enambelas. Menurut Wolders (1975) Ki Gede Ing Suro menduduki jabatan sebagai Raja di Palembang yang kemudian disusul dengan Gending Ilir . Ki Gede Ing Suro memerintah di Kerajaan Palembang selama 2 tahun. Raja Ki Gede Ing Suro

kemudian digantikan oleh saudaranya Gending Ilir yang berkuasa selama 1 Tahun dan seterusnya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Gelar sulthan yang digunakan oleh penguasa menandakan bahwa rajanya beragama Islam. Pada awal abad 16 ketika bangsa Eropa hadir di wilayah Palembang mereka berusaha keras untuk mendapatkan komoditi perdagangan secara langsung dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang besar. Disinilah Pengaruh bangsa Eropa terhadap eksistensi seorang Raja, KI Gede, atau Sultan yang tidak saja pengakuan dari kulturnya saja tetapi juga dari kultur keyakinannya. Bangsa Eropa telah berhasil menjadikan Raja yang beragama Islam menambah gelar Sultan, ini dilakukan untuk penguatan kekuasaan dan hukum terhadap penguasa pribumi. Mereka dianugrahi bermacam-macam tanda kebesaran sebagai suatu simbol kekuasaan. Akibatnya di dalam kesultanan Palembang sendiri timbul persaingan antara anggota keluarga raja dan sultan yang ingin berkuasa juga.

Dari sini dapat dilihat bahwa pergantian kekuasaan pada saat Kerajaan Palembang berjalan seperti umumnya terjadi di beberapa Kerajaan di Jawa beraliran Hindu-Buddha yakni geneologi dan martabat. Hal ini juga berlaku dalam membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa daerah di nusantara masih terus berlanjut sampai saat ini. Apalagi jika dilihat bahwa pengangkatan seorang raja (sultan) tidak terlepas dari konsep Negara (kekuasaan), yang tentu saja berbeda dengan konsep negara modern yang diperkenalkan oleh Barat.

Sebab Raja atau Sulthan merupakan tipe kepemimpinan yang menduduki lokasi sosial-historis dengan orientasi nilai yang berbeda-beda, sehingga berbeda pula reaksinya terhadap eksistensinya apakah berupa penolakan, adaptasi, dan asimilasi. Tidak jarang menghadirkan konflik politik yang disebabkan oleh faktor sosiokultural dengan kepentingan ideologi atau nilai tertentu. Tidak kalah pentingnya analisis struktural yang membahas status dan peranan perbagai elite, hubungan dan perbandingan kekuasaan antara mereka, kesemuanya dalam kerangka hirarkis suatu sistem feodal.

Struktur kekuasaan sangat menentukan struktur sosial dengan kedudukan birokrasi yang sangat sentral fungsinya. Dalam hubungan ini sangatlah relevan menelaah kehidupan sosial antara golongan sosial, terutama dalam konteks kepentingan, status

sosial, ideologi, serta sistem nilai-nilainya. Tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa tindakan dan interaksi politik tidak dapat berjalan di luar kerangka kebudayaan politik (*political culture*).

Di sini tindakan, kelakuan, serta sikap perlu dilembagakan. Misalnya peranan seorang tokoh ditentukan oleh struktur masyarakat, atau paling tidak peranannya dijalankan dalam batas-batas struktural masyarakat. Pelaku tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan atau subjektivitas yang demikian.

Dalam kerangka teoritik sosiologi tipe kepemimpinan yang menurut teori Weberian ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya. Pemimpin tipe formal memperoleh kekuasaan dari jabatan atau pemimpin formal, sedangkan tipe informal adalah pemimpin informal, dan pada dia ada kekuasaan karismatis. Dalam konteks Indonesia, tipe formal pada umumnya juga memiliki otoritas tradisional, ialah golongan aristokrasi yang masih mempunyai hak mewariskan jabatan, terutama yang memangku jabatan pamong praja.

Meminjam teori Bendix *power* dan *authority* masyarakat foedal di Eropa. Kemudian Weber pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, juga menjelaskan hubungan *patront-client* melalui teorinya yaitu: (1) teori yang tradisional, (2) kharismatik, dan (3) rasional. Pada hubungan yang tradisional, seorang *patront* memperoleh kedudukannya melalui secara turun temurun. Kekuasaan yang diperoleh secara turun temurun ini dibahas oleh Bendix tetapi kurang membahas tentang *patront-client* pada kepemimpinan rasional. Ia sedikit menyinggung kharismatik seorang penguasa. Pada hubungan kharismatik, seorang *patront* mempunyai *client* yang banyak, diikuti oleh rakyat banyak karena kharismanya, misalnya tokoh-tokoh keagamaan, pendeta, pastor, dan kiai.

Apa yang terjadi pada sistem pergantian kekuasaan di Kesulthanan Palembang Darussalam merupakan suatu perjumpaan berbagai nilai, kepentingan dan kultur, dimanan konsep kepemimpinan didasarkan pada otoritas tradisional yang didasarkan pada pengakuan kultural. Tipe ini memudahkan dalam mempengaruhi masyarakat, karenanya kepemimpinan tradisional tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan *berbasis genealogic-hereditically* (keturunan) dan kharismatik.

Namun, diantara dua tipologi basis kepemimpinan ini, maka kepemimpinan berbasis kharismatik merupakan pelatak dasar setiap kepemimpinan tradisional di berbagai entitas sosial. Konsep Weber tentang kharismatik ini merupakan pembahasan argumentatif-komparatif yaitu pengalaman masyarakat keagamaan di dunia. Pada abad Tengah di Eropa Barat yang dimulai pada abad ke-13, hingga menjelang revolusi industri, ternyata para pendeta sangat mempunyai kewibawaan dalam agama, sosial, politik, ekonomi, sehingga membentuk nilai kharisma.

Di Indonesia pada abad ke-19, kharisma tokoh-tokoh Islam yaitu para kiai menduduki kepemimpinan yang kharismatik. Terlepas dari latar belakang apapun yang mendasari penetapan syarat sebagai sultan adalah keturunan (zuriat) Kesultanan Palembang, secara tradisi ini dapat dibenarkan. Bagaimanapun faktor keturunan atau genealogis menjadi salah satu penentu legalitas dan kedaulatan suatu kesatuan politik di masa lalu. Raja dipandang sebagai pusat Kosmos dan dari raja terpancar kekuatan yang berpengaruh pada alam maupun masyarakat. Penempatan raja sebagai keturunan nabi-nabi dan dewa-dewa dimaksudkan untuk memperkokoh keabsahan (*legitimacy*) sebagai raja. Anggapan ini dikaitkan dengan kepercayaan magis dari wahyu raja (*pulung ratu*) dan konsep tentang garis keturunan darah raja (*trahing kusuma rembesing madu*). Di kalangan masyarakat Jawa terdapat anggapan, bahwa hanya orang yang masih mempunyai darah rajalah yang dapat menjadi raja.

Konsep seperti ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru, karena dalam konsep kekuasaan raja di Jawa, misalnya (dan Asia Tenggara umumnya), kedudukan raja paling sering diabsahkan (juga) dengan membuktikan kesinambungan. Hubungan darah atau pengalaman yang serupa dengan seorang tokoh pendahulu yang agung memungkinkan seseorang ikut tersinari oleh *aura* (sinar) keagungan. Bukan itu saja, justru hal terpenting dari penelusuran genealogi ini adalah bisa menjadikannya mata rantai kesinambungan. Dalam konsep Jawa *trahing kusuma, rembesing madu, wijining tapa, tedaking andana warih* (turunan bunga, tirsan madu, benih pertapa, turunan mulia) adalah ciri-ciri turunan leluhur yang agung dan tak bernoda.

Karena itu, menelusuri silsilah seseorang, bila mungkin asal usul seseorang raja yang berkuasa atau raja bawahan yang besar, merupakan sesuatu yang diusahakan dengan banyak makan waktu dan kesungguhan yang tiada hentinya. Datangnya agama Islam

tidak menghilangkan kebiasaan membuktikan kesinambungan melalui kekerabatan (Berg, 1930: 96 vide Leirissa, 1993: 62) dan ini diperkuat oleh kebiasaan Arab, yang biasanya diikuti oleh orang berpangkat di Jawa, untuk menggabungkan nama salah satu leluhur dengan namanya sendiri. Tuntutan akan kesinambungan juga dinyatakan dalam ketentuan Islam mengenai *isnad*²².

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Palembang tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara ini. Meskipun kesatuan politik ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep Hindu-Budha, sementara Islam terkadang muncul dalam aspek sosio dan politik. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya. Selain kedua aspek di atas, yaitu legalitas dan simbolisasi, yang paling penting adalah struktur organisasi yang “dipimpin” oleh seorang Sultan. Hal ini mengingat gelar “sultan” bisa mengacu kepada seseorang yang menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambing yang bersifat magis dan mistis, yang meyatukan kualitas perlengkapan-perengkapan kekuasaan itu (Kartodirdjo, 1969: 13).

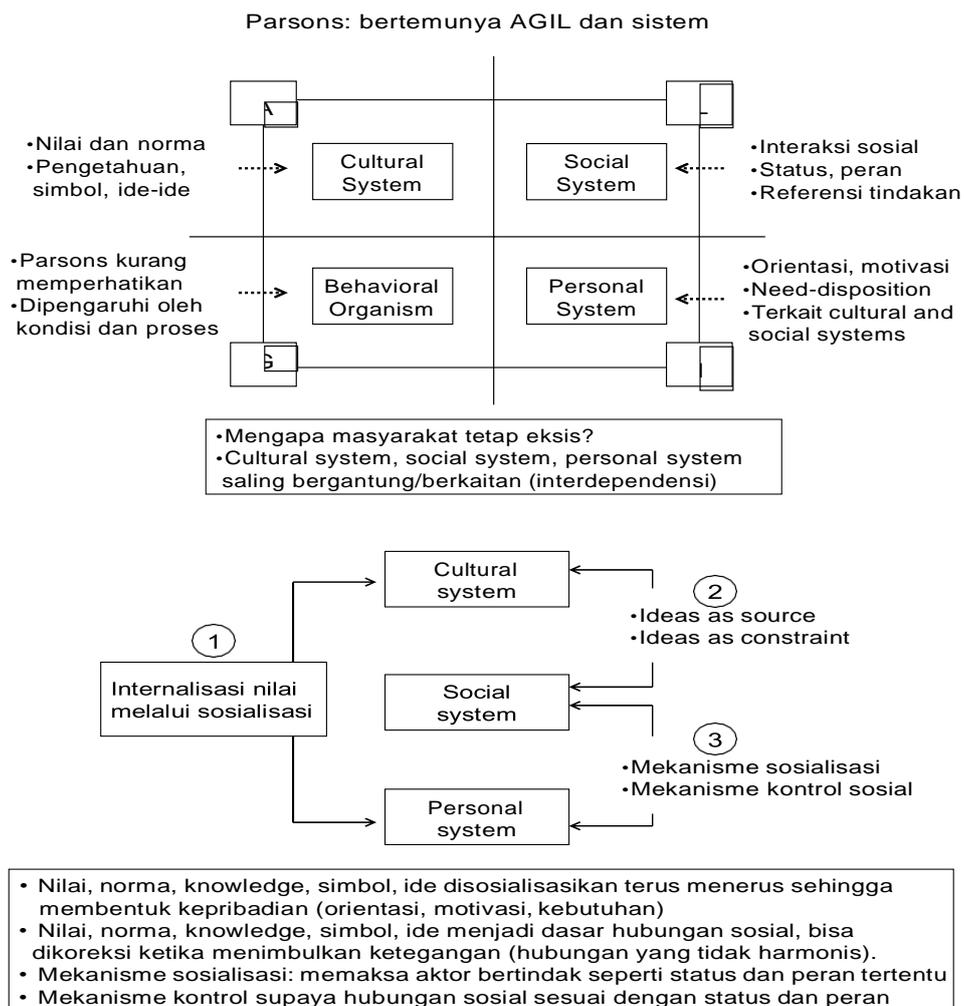
Jadi munculnya dua sultan di kesultanan Palembang merupakan fenomena yang tidak biasa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai status, powershif dan legitimasi. Meskipun baik sultan prabu diraya, maupun sultan iskandar badaruddin dijadikan sebagai sultan hanya sebatas simbolisasi kebudayaan dan kedigjayaan kesultanan Palembang Darussalam. Namun tetap saja posisi sultan pada level symbol kebudayaan memiliki pengaruh yang kuat khususnya bagi masyarakat asli Palembang. Sebab sebagai symbol kebudayaan, maka seorang sultan mampu memainkan beberapa peranan strategis yakni sebagai actor dari system kebudayaan, system social dan system personal. Seorang

²² Pada masa kesultanan Palembang Darussalam penguasa terakhir adalah Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, anak Sultan Ahmad Najamuddin II atau Susuhunan Husin Diauddin. Jadi, menurut tradisi dan adat yang berlaku di Kesultanan Palembang dahulu, sebenarnya yang berhak menjadi sultan berikutnya di Palembang adalah anak keturunan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom ini, yang tidak lain adalah keponakan Sultan Mahmud Badaruddin II. Apalagi sejak kalah perang dengan Inggris dan ditangkap oleh Belanda Sultan Mahmud Badaruddin II tidak pernah berhasil merebut kekuasaannya kembali sampai meninggal di tempat pengasingannya di Ternate. Tentu saja, seseorang yang kalah perang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam pembuatan suatu perjanjian. Meskipun saat di pengasingan mendapat perlakuan seperti layaknya sultan, namun itu bukan sesuatu hal yang istimewa, karena Sunan Banguntapa (Sunan Pakubuwono VI) dari Kasunanan Surakarta juga mendapat perlakuan yang sama. Bahkan dalam pengasingannya di Ambon Paku Buwana VI dibuatkan istana dengan segala kelengkapannya oleh Belanda (Day, 1989: 32-88).

sultan memiliki kemampuan leadership sebab ia juga berperan sebagai pusat sosialisasi dan sekaligus evaluasi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya.

Masyarakat menurut Parsons merupakan jalinan dari sistem didalamnya berbagai fungsi berkerja seperti norma-norma, nilai-nilai, konsensus dan bentuk-bentuk kohensi sosial lainnya. Berjalannya fungsi yang berbeda-beda disebut spesialisasi, dimana setiap fungsi bersifat saling menopang atau sinergis. Satu organ dapat dikomandoi organ lainnya , tetapi pihak yang memberi perintah tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Artinya terjadi hubungan timbal-balik antara pemberi perintah dengan yang diperintah. Kesemuanya itu membangun suatu bentuk koordinasi antar sistem sosial. Inilah yang disebut dengan para pendukung sultan baik Sultan Iskandar maupun Sultan Prabu Diraja terlepas keduanya mempunyai hubungan geneologi dengan sultan Badaruddin II.

Ini biasa dibaca melalui teori Talcott Parson melalui AGIL



Karenanya eksistensi masyarakat yang didalamnya terdiri dari sistem sosial, sistem budaya dan sistem materi, selalu membutuhkan suatu kondisi-kondisi yang menciptakan keberadaan (*condition of existence*). Menurut Parson kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial itu agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, ada empat fungsi penting yaitu AGIL (A) Adaptation, (G) Goal Attainment, (I) Integration, dan (L) Latensi. *Adaptation* (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yg gawat, sistem arus menyesuaikan dengan lingkungannya. *Goal attainment* (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (integrasi): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yg menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur antar hubungan fungsi lain (A,G,L). *Latency* (pemeliharaan pola): sistem harus melengkapi, memelihara & memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yg menciptakan dan menopang motivasi²³

Bertemunya AGIL (prasyarat fungsional) dengan Sistem Sosial menurut Parsons sebagaimana *Organisme perilaku* : sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Fungsi dan sistem menurut Parsons merupakan sistem tindakan yang berkerja seperti organisme perilaku: sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan

²³ Berdasar konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (*adaptation*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (*integration*). Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkait dengan hal peran. Relasi fungsi tidak selalu terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi. Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja. Lihat Margaret Poloma, *Contemporary sociological theory*, terjemahan oleh tim Yasogama, Cet ke 5 ,Raja Grafindo, 2005: 170-175. lihat juga Peter Hamilton , *Reading From Talcott Parsons*, Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo, Tiara Wacana, 1990: 1. Lihat juga George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Terjemahan oleh Alimandan, edisi ke 6, cet ketiga, Pranada Media, 2005: 121.

menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak

Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Mereka memiliki motivasi untuk mencapai kepuasan yang didefinisikan dan dimediasi dalam term-term simbol bersama yang terstruktur secara kultural. Artinya dalam sistem sosial ada : aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, kultur, partisipasi memadai dari pendukungnya. Parsons menyatakan bahwa persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai dalam suatu sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Inilah yang kemudian menjadi perebutan tahta kesultanan Palembang Darussalam yakni kewenangan melakukan internalisasi dan sosialisasi konsekuensi logis dari simbol kebudayaan jabatan sultan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Palembang yang pada masa kesultanan Palembang Darussalam berfungsi sebagai pusat kerajaan, dalam kehidupan masyarakatnya upacara-upacara yang bersifat keagamaan dan yang bersifat umum serta berhubungan dengan kerajaan, telah menjadi adat kebiasaan. Dalam babad-babad, hikayat-hikayat, dan berita-berita asing disebutkan bahwa upacara dan pesta-pesta dihubungkan dengan kerajaan, seperti penobatan raja atau putra mahkota, khitanan, pernikahan putra-putri raja, kelahiran putra-putri raja, dan lain-lain, yang berkenaan dengan kehidupan raja dengan keluarga; upacara dan pesta dengan penerimaan utusan-utusan kerajaan asing, upacara Maulud Nabi, hari raya, dan hari-hari besar lainnya. Upacara-upacara dan pesta-pesta tersebut biasanya dimeriahkan oleh bermacam-macam keramaian yang melibatkan seluruh komponen masyarakat

Salah satu tugas sultan menjadi seorang umaro, artinya beliau menjadi penasihat agama pada pemerintahan. Keberadaan Kesultanan Palembang bukan hanya bidang budaya saja melainkan juga ada unsur politik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pengangkatan raja-raja atau sultan-sultan yang pernah memerintah di Palembang tidaklah berbeda dengan yang ada di kesultanan-kesultanan lain yang pernah ada di bumi nusantara ini. Meskipun kesatuan politik ini bernafaskan Islam, namun sesungguhnya masih meneruskan apa yang telah ada pada masa sebelumnya, yaitu Konsep Hindu-Budha, sementara Islam hanya sebagai baju luarnya saja. Hal yang sama juga berlaku untuk aspek-aspek legalitasnya.

Sebagai kesultanan yang bersifat maritim dan absolut, tampaknya rujukan yang bisa diarahkan satu-satunya monarki absolut yang masih ada di Asia Tenggara adalah Kesultanan Brunei Darussalam. Namun, asal kesultanan ini bukan dari kerajaan agraris seperti yang melahirkan peradaban keraton, tetapi dari suatu kesultanan di muara sungai dan laut seperti, kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain (Ongkhokham, 2003: 59).

Berlainan dengan di kesultanan laut, di kerajaan agraris kesatuan politik (sacral) masih tetap ada selagi pusaka-pusaka masih ada, dan sitihinggil (tahta) masih berada di

tempat suci. Singkat kata, selama ada keraton maka kerajaan masih ada dan raja masih diakui oleh masyarakatnya. Bahkan kerajaan yang fungsi politiknya telah dihapuskan ratusan tahun lalu, seperti keraton-keraton di Cirebon, fungsi budaya dan sakralnya tetap bertahan. Hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan maritim, karena meskipun raja (sultan) dan keratonnya masih ada, namun keberadaannya tidak diakui lagi oleh masyarakatnya. Beberapa contoh bisa dikemukakan di sini ialah Kesultanan Deli di Sumatera Utara, yang sultannya juga seorang perwira; kesultanan Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

B. SARAN

Perhatian yang khusus kepada nilai-nilai budaya harus menjadi fokus yang terus dikumandangkan oleh semua pihak, baik pemerintah yang memegang otoritas, ataupun warga masyarakat yang langsung berada dalam lingkup adat tersebut. Kedua belah pihak harus tetap bersinergi dalam proses peletarian nilai-nilai lokal terutama dalam proses dan pola bentuk pembentukan dan pemberhentian Raja dan sultan dalam tradisi kerajaan di Palembang darussalam. Selama ini nilai-nilai lokal hanya digunakan sebagai pelengkap narasi-narasi pelengkap seremonial kebudayaan serta adat istiadat. Pemerintah harus menjadikan nilai-nilai lokal adat sebagai landasan fundamental dan standar acuan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang berintegritas dan profesional. Selain itu, persoalan-persoalan di masyarakat terkait gejolak sosial-politik, terkadang harus berdasarkan nilai-nilai sebagai dasar penyelesaiannya, yang sudah *mahfum* dengan nilai-nilai adat. falsafah hidup masyarakat Palembang tanpa harus menanggalkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang berdaulat..✍

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Masykuri, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Abdullah Taufik (2002). "Pemikiran Islam di Nusantara Dalam Perpektif Sejarah". Makalah Diskusi Peluncuran Buku *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta 5 September 2002
- Adeng. Muchtar Ghazali (2005), *Ilmu Studi Agama*: Bandung, Pustaka Setia
- Antonio Giddens, (1990), *The Consequences of Modernity*: Stanford, Calif, Stanford University
- _____,(2000), *Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial* (terjemahan): Jakarta , Gramedia
- Anderson, Benedict R, OG (1972) , *The Idea of Power in Javanese Culture* dalam Claire Hott (ed), *Culture and Politics in Indonesia* , Itaca :Cornel University press
- Ali. Fachri. (1986). *Refleksi " Paham Kekuasaan Jawa" Dalam Indonesia Modern*. Jakarta: PT Gramedia
- A. William , (1985), *Haviland, Antropologi* : Jakarta, Erlangga
- Azra, Azyumardi, (1999) , *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*: Jakarta, Rajawali Press
- _____, (1999). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* Bandung: Mizan,
- _____, (2002), *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan
- Ali. Fachri. (1986), *Refleksi " Paham Kekuasaan Jawa" Dalam Indonesia Modern*. Jakarta: PT Gramedia
- Behrend, Timothy Earl. (1982). *Kraton and Cosmos in Traditional Java. A Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Master of Arts (History) at the University of Wisconsin-Madison.*
- Bahtiar Effendi, (1998), *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia*, Jakarta: Paramadina

- Banton . Michael, (1973), *Antropological Approaches to The Study of Religion*: London, Tavistock Publicaion,
- Bryan S. Turner, (1991) *Religion and Social Theory*, London (UK) , AKM Associates
- Coser, Lewis A, (1975), *Structure and Cobflict*, Dalam peter M . Blau (ed), *Approaches to the study of Sosial Structure*, New York: The Free Press
- Dale F, Eickleman dan James Psicatari, (1998), *Ekspresi Politik Muslim Bandung* : Mizan,
- David Snow, (2001), *Extending and Broadening Blumer’s Conceptualization of Symbolic Interctionicm, Symbolic Interaction*, Dalam *American Sociological Review*
- David McClelland and Winter D.G, (1969), *Motivating Economic Achievement*: New York, The Free Press
- Deddy Mulyana, (2002) , *Metodologi Penelitian Kualitatif: paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*: Bandung, Rosda Karya
- Deliar Noer, (1998), *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*: Bandung, Mizan
- Drewes G.W.J., (1994) "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?", in *Readings on Islam in Southeast Asia*, compiled and edited by Ahmad Ibrahim, Sharon Shiddique and Yasmin Hussain (Singapore: Institute of Southeast Asian)
- Dahana.A. (2006), *Catatan Seminar Laksamana Ceng Ho*, Palembang, 6 Agustus.
- Donal K. Emmerson dan Koentjaraningrat, (1982), *Aspek dalam Penelitian Masyarakat* : Jakarta, Gramedia
- Donald Emmerson (1977)“ *Indonesia’s Elite; Political Culture and Cultural Politics*” makalah dalam seminar Departemen Politik , Monash University, dalam majalah *Indonesia*, no. 31, April ,1981.
- D.H. Burger, (1960), *Sejarah Sosiologis Ekonomis Indonesia*
- Geldern, Robert Heine (1982) *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Terjemahan Deliar Noer. Jakarta: CV. Rajawali.
- Gesick, Lorraine, (1989) Editor, *Pusat, Simbol, Dan Hirarki Kekuasaan Esai-esai Tentang Negara-negara Klasik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Geldern, Robert Heine. 1982. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Terjemahan Deliar Noer. Jakarta: CV. Rajawali.
- G.Goedes (1970), dalam buku *Indianized States of Southeast Asia* .

- Heine-Geldern, Robert von. (1982). "Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara. Terjemahan oleh Deliar Noer. Jakarta: Bhratar
- Hadi, Abdul W.M (2005), *Islam Di Nusantara Dan Transormasi Kebudayaan Melayu* : ICAS Jakarta
- Horikoshi, Hiroko (1987), *Kyai dan Perubahan Sosial* ,Jakarta: P3M
- Hanafiah, Djohan. (1987). *Kuto Gawang Pergolakan dan Permainan Politik dalam Kelahiran Kesultanan Palembang Darussalam*. Parawisata Jasa Utama.
- (1989). *Kuto Besak Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Mas Agung
- , (1991), *Kesultanan Pelambang Darussalam*", dalam Tim penyusun, *Petunjuk Kota Palembang*, (Palembang: Humas Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang,).
- Herwig Zahorka, (2007) *The Sunda Kingdoms of West Java From Tarumanagara to Pakuan Pajajaran with the Royal Center of Bogor*, Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta
- Nurcholish Madjid, (1984) "Islam Punya Konsep Kenegaraan?", dalam *Tempo*, 29 Desember, Naquib Al-Attas, Muhammad Syed. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: Art Printing Works Sdn. Bhd.
- Naquib Al-Attas, Muhammad Syed , (1999) *The Concept of Education in Islam: A Framework for An Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization/ISTAC
- March Block, *Social society*, (1961), Vol. I, Chaniago, The University of Chaniago Press
- Muarif, Hasan Ambari, *Menemukan Peradaban : Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Logos Wacana Ilmu (1998)
- Mulyana, Slamet. (2005). *Runtuhnya Kera- jaan Hindu Jawa dan Timbulnya Ne- gara- Negara Islam Di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS
- J.C van Leur (1955), *Indonesia Trade and society*,Den Haag:VanHoeve
- Kartodirdjo, A. Sartono. 1969. "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial", *Lembaran Sedjarah*, No.4, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

- Lombart, Denys. (2000). *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jilid 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ricklefs M.C., (1990) *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Hardjowidjono Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- R.H. Djajadiningrat, (1982) *Kesultanan Aceh*, terj T.Hamid, Banda Aceh:Departemen P&K,
- Poesponogoro, M. D. dan Notosusanto. N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Edisi ke-4). Jakarta: Balai Pustaka
- Perret, Daniel. (1999) “Konsep ‘Negeri’ dalam Sumber Melayu lama berunsur sejarah dan hukum”, dalam Wan The, Wan Hashim dan Daniel Perret (Ed.). 1999. *Di Sekitar Konsep Negeri*. Kuala Lumpur: EFEO- Institut Alam dan Tammaddun Melayu.
- Purwadi. T.t. *Nyai Roro Kidul dan Legitimasi Politik Jawa*. Yogyakarta: Media Abadi.
- (2003). *Membaca Sasmita Jaman Edan Sosiologi Mistik R. Ng. Ronggowarsito*. Yogyakarta: Persada.
- Syamsuddin, M.Din, (2001), *Islam dan Kepemimpinan Orde baru*, Jakarta, logos
- Sulendraningrat, P.S. (1978). *Sejarah Cirebon*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, (1998), *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* Bandung: Mizan
- Tjandrasmita, Uka (1993). Editor, *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- , (2006): Catatan Seminar Laksmana Chengho di Palembang Hotel Royal Asia 6 Agustus
- Leirissa, R.Z. (1996). *Halmahera Timur dan Raja Jailolo*. Jakarta: Balai Pustaka.
- (1979). “Local Potentates and the Competition for Cloves in Early Seventeenth Century Ternate”, dalam *proceedings seventh IAHA Conference, Bangkok 22-26 August 1977*, Bangkok: Chulalongkorn University Press.
- (1993) *Alat Peraga dan Visualisasi Pelajaran Sejarah, Pengajaran Sejarah,- Kumpulan Makalah Simposium (1995)*, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Wan The, Wan Hashim dan Daniel Perret (Ed.). (1999). *Di Sekitar Konsep Negeri*. Kuala Lumpur: EFEO- Institut Alam dan Tammaddun Melayu.

- Wolders, Michiel Otto. (1975). *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*. “s-Gravenhage.
- Wolters, O. W. (1970). *The Fall of Sriwijaya in Malay History*. Ithaca, New York: Cornell University
- Winsteds, (1969), *A History of Classical Malay Literature*, Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, (The Hague : van Hoeve, 1956), Bab V. Dapat dilihat juga Clifford Geertz, “The Javanese Kijaji; The Changing Role of a Cultural Broker : dalam J. Steward, *Theory of Culture Change* (Urbana : University of Illinois Press, 1955),
- I.J. van Sevenhoven , (1971) (Lukisan tentang Ibukota Palembang, Bhratara, Jakarta
- Zuhdi, Susanto. (1996) *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Anonim (1984). *Sultan Mahmud Badaruddin II*. Palembang: Badan Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Madya Palembang.

GLOSARIUM

- Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya);
- Akulturasasi : Suatu proses sosial dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antara dua budaya yang berbeda sehingga mengakibatkan terbentuknya budaya baru, namun unsur dan sifat budaya yang asli masih tetap ada
- Ekspansi : Perluasan wilayah suatu negara dengan menduduki (sebagian atau seluruhnya) wilayah negara lain; perluasan daerah:
- Birokrasi : Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan
- Evolusioner : Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang evolusi, atau lebih tepatnya asal usul spesies yang memiliki nenek moyang sama, dan penurunan spesies, serta perubahan, penambahan, dan diversifikasinya sejalan dengan waktu.
- Heterodoksi : Menyimpang dari kepercayaan resmi
- Islam ortodoks : Islam Modern
- Inovasi : Pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan:
- Kekuasaan : Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain
- Kesultanan : Kawasan (daerah) yang diperintah oleh sultan; kerajaan;
- Melayu : Suku bangsa dan bahasa di Sumatra, Semenanjung Malaysia, dan di pelbagai daerah di Asia Tenggara;
- Nilai budaya : Nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.

- Pengangkatan : Proses, cara, perbuatan mengangkat; ketetapan atau penetapan menjadi pegawai (naik pangkat dsb);
- Pergantian : Perihal berganti (bergilir, beralih, berubah, bertukar); pergiliran; peralihan; perubahan; pertukaran;
- Perintis : Orang yang memulai mengerjakan sesuatu; pelopor contoh: 'para perintis kemerdekaan mendapat penghargaan dari Pemerintah'
- Pungutan : Daerah yang dikuasai langsung oleh sultan
- Protagonis : Tokoh utama dalam cerita rekaan;
- Politik : Seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional
- Priyayi : Orang yang termasuk lapisan masyarakat yang kedudukannya dianggap terhormat,
- Proses : Runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu
- Pemberhentian : Proses, cara, perbuatan memberhentikan
- Raja : Penguasa tertinggi pada suatu kerajaan (biasanya diperoleh sebagai warisan); orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara: negara kerajaan diperintah oleh seorang
- Sejarah : Asal-usul (keturunan) silsilah; (catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak/sifat masyarakat itu)
- Sultan : Raja; Baginda:
- Sosiologis : Ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial, karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang-orang
- Tradisional : sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun:
- Tradisi : Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat;
- Zuriat : Benih, keturunan atau juga anak cucu. Dalam konteks ilmu Biologi

INDEKS

| | | | |
|---------------------|----------|--|--|
| | A | | 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 91, 94, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118 |
| Akulturasi | | 20 | |
| Analisis | | i, 114 | |
| | B | | Kesultanan iii, v, vii, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 18, 42, 45, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 110, 111, 112, 113, 117, 118, 122, 123, 126, 127, 128 |
| Birokrasi | | 50 | |
| | C | | |
| <i>Charismatic</i> | | 10 | |
| | D | | |
| Dinamika | | 89, 124 | |
| | | | L |
| | E | | <i>Legitimate power</i> 10 Leluhur 113, 117 |
| Ekspansi | | 2 | |
| Esensi | | 108 | |
| Etimologi | | 61, 68, 100 | N |
| Evolusioner | | 7 | Nilai budaya vii, 2, 78, 119 |
| <i>Expert power</i> | | 10 | |
| | | | P |
| | G | | Pangeran 3, 24, 35, 36, 37, 39, 55, 58, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 93, 94, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112 |
| Georafis | | 66 | |
| | H | | |
| Heterodoksi | | 2 | Pemberhentian 2, 4, 5, 6, 18 Pangkatan iii, 4, 49, 105, 107 Perintis 7 Politik vii, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 56, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 104, 105, 108, 115, 116, 117, 118, 122 |
| | I | | |
| ideografik | | 1 | |
| Ideologi | | 7, 33, 50, 115 | |
| Inovasi | | 7 | |
| | K | | |
| Kedatuan | | 54 | |
| Kekuasaan | | vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 30, 34, 35, | <i>Power</i> viii, 10, 116 Priyayi 57, 58, 97, 98 |

Priyayi 59, 99
 Proses 4, 13, 18, 20, 22, 30, 36, 59, 78,
 83, 92, 98, 111
 Proses v, 20
 protagonis 7
 pungutan 58, 59, 61, 68, 98, 100

R

Raja v, vi, vii, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15,
 16, 18, 23, 27, 28, 34, 37, 38, 39, 43,
 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 56, 65, 69,
 70, 72, 77, 80, 89, 91, 103, 111, 114,
 115, 117, 120, 125, 126, 127
 Rakyat 9, 59, 99
 Rasionalisasi 30
Reward power 10

S

Sejarah vii, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 38, 40,
 43, 49, 52, 64, 65, 66, 79, 89, 101,
 109, 112, 127
 Sosiologis 114

T

Toleransi 20, 22
 Tradisi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 20,
 22, 24, 34, 35, 36, 38, 40, 46, 56, 60,
 68, 75, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 99, 101,
 102, 114, 117, 118
 Tradisi i, v, 20, 63, 78

Z

Zuriat 112, 113, 114, 117